

# Jurnal PPKn

*Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

---

**Vol. 5 No. 2 Juli 2017**

---

- **ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KESALEHAN SOSIAL PROPINSI JAWA TIMUR** (Mochammad Rozikin)
- **UPAYA PROGRAM SOLO WASIS DALAM MEWUJUDKAN SOLO KOTA LAYAK ANAK DI KELURAHAN JEBRES SURAKARTA** (Alma Azqiyah)
- **STRATEGI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SMART AND GOOD CITIZEN** (Studi pada Rumah Dongeng Kinciria) (Arin Wahyuni, Triyanto & Widya Noventari)
- **PENGARUH POSKO ADVOKASI BEM UNS DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA RANTAU PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019** (Nafita Rizqiyatul Azkiya)
- **PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA PPKn DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN BEM FKIP UNS TAHUN 2018 SEBAGAI BENTUK CIVIC PARTICIPATION** (Studi pada Mahasiswa PPKn Angkatan 2015-2018 FKIP UNS) (Nurul Hiendayati Mursito)
- **STRATEGI GURU DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI ATAU HIGHER ORDER THINKING SKILLS (HOTS) PESERTA DIDIK MATA PELAJARAN PPKn** (Studi Kasus di SMK Negeri 1 Karanganyar) (Ratih Nur Indah Sari)
- **PENDIDIKAN KARAKTER BAGI WARGA NEGARA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN CYBERBULLYING** (Rika Setyorini)
- **UPAYA HIMPUNAN MAHASISWA PRODI (HMP) PPKN DEMOKRATIA DALAM PEMBENTUKAN SIKAP DEMOKRATIS PENGURUS** (Tesi Lestari)

**ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN  
KEWARGANEGARAAN (AP3KnI) - JAWA TENGAH**

# Jurnal PPKn

*Penelitian dan Pemikiran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

---

Vol. 5 No. 2 Juli 2017

---

- ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KESALEHAN SOSIAL PROPINSI JAWA TIMUR (Mochammad Rozikin)
- UPAYA PROGRAM SOLO WASIS DALAM MEWUJUDKAN SOLO KOTA LAYAK ANAK DI KELURAHAN JEBRES SURAKARTA (Alma Azqiyah)
- STRATEGI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SMART AND GOOD CITIZEN (Studi pada Rumah Dongeng Kinciria) (Arin Wahyuni, Triyanto & Widya Noventari)
- PENGARUH POSKO ADVOKASI BEM UNS DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA RANTAU PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 (Nafita Rizqiyatul Azkiya)
- PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA PPKn DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN BEM FKIP UNS TAHUN 2018 SEBAGAI BENTUK CIVIC PARTICIPATION (Studi pada Mahasiswa PPKn Angkatan 2015-2018 FKIP UNS) (Nurul Hiendayati Mursito)
- STRATEGI GURU DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI ATAU HIGHER ORDER THINKING SKILLS (HOTS) PESERTA DIDIK MATA PELAJARAN PPKn (Studi Kasus di SMK Negeri 1 Karanganyar) (Ratih Nur Indah Sari)
- PENDIDIKAN KARAKTER BAGI WARGA NEGARA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN CYBERBULLYING (Rika Setyorini)
- UPAYA HIMPUNAN MAHASISWA PRODI (HMP) PPKN DEMOKRATIA DALAM PEMBENTUKAN SIKAP DEMOKRATIS PENGURUS (Tasih Lestari)

---

**ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN  
KEWARGANEGARAAN (AP3KnI) - JAWA TENGAH**

# **Jurnal PPKn**

## **ISSN 2303-9412**

### **Penerbit**

Asosiasi Profesi Pendidikan Pancasila & Kewarganegaraan  
(AP3KnI) - Jawa Tengah

### **Mitra Bestari**

Prof. Dr. Udin S. Winataputra, MA. (Universitas Terbuka)  
Prof. Dr. Sapriya, M.Ed. (Universitas Pendidikan Indonesia)  
Dr. Harmanto, M.Pd. (Universitas Negeri Surabaya)  
Dr. Samsuri, M.Ag. (Universitas Negeri Yogyakarta)  
Dr. Nurul Zuriah, M.Si. (Universitas Muhammadiyah Malang)

### **Penanggung Jawab/Pimpinan Redaksi**

Dr. Triyanto, SH., M.Hum. (Universitas Sebelas Maret)

### **Ketua Penyunting**

Dr. Winarno, S.Pd., M.Si. (Universitas Sebelas Maret)

### **Anggota Dewan Penyunting**

Raharjo, S.Pd., M.Sc  
Arif Kriswahyudi, S.Pd.  
Dewi Wulandari, S.Pd.

### **Alamat Redaksi**

Gedung C FKIP UNS  
Jl. Ir Sutami 36 A Surakarta  
Telp/Faks. 0271-646939  
Email: *jurnal\_ppkn@yahoo.com*  
Website: <http://ppkn.org>

# **PENGANTAR REDAKSI**

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah Swt atas terbitnya Jurnal PPKn Vol. 5 No. 2 Juli 2017. Jurnal ini diterbitkan oleh asosiasi PPKn wilayah Jawa Tengah.

Jurnal ini berisi artikel pemikiran dan hasil penelitian dari para guru, dosen, dan pemerhati bidang Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan (PPKn). Jurnal ini dapat menjadi referensi dalam penelitian, pembelajaran, maupun pengembangan ilmu pengetahuan di bidang PPKn. Sasaran pembaca dari Jurnal ini adalah para guru, dosen, mahasiswa, dan pemerhati PPKn.

Kami mengucapkan terimakasih kepada para editor dan tim penyunting jurnal yang telah bekerjasama dengan baik demi terbitnya jurnal ini.

Surakarta, Juli 2017

Redaksi

# DAFTAR ISI

- **ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KESALEHAN SOSIAL PROPINSI JAWA TIMUR (Mochammad Rozikin)..... 1-15**
- **UPAYA PROGRAM SOLO WASIS DALAM MEWUJUDKAN SOLO KOTA LAYAK ANAK DI KELURAHAN JEBRES SURAKARTA (Alma Azqiyah) .....16-25**
- **STRATEGI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM RANGKA MEWUJUDKAN SMART AND GOOD CITIZEN (Studi pada Rumah Dongeng Kinciria) (Arin Wahyuni, Triyanto & Widya Noventari).....26-36**
- **PENGARUH POSKO ADVOKASI BEM UNS DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA RANTAU PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019 (Nafita Rizqiyatul Azkiya) .....37-45**
- **PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA PPKn DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN BEM FKIP UNS TAHUN 2018 SEBAGAI BENTUK CIVIC PARTICIPATION (Studi pada Mahasiswa PPKn Angkatan 2015-2018 FKIP UNS) (Nurul Hiendayati Mursito).....46-56**
- **STRATEGI GURU DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN BERPIKIR TINGKAT TINGGI ATAU HIGHER ORDER THINKING SKILLS (HOTS) PESERTA DIDIK MATA PELAJARAN PPKn (Studi Kasus di SMK Negeri 1 Karanganyar) (Ratih Nur Indah Sari).....57-66**
- **PENDIDIKAN KARAKTER BAGI WARGA NEGARA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN CYBERBULLYING (Rika Setyorini).....67-78**
- **UPAYA HIMPUNAN MAHASISWA PRODI (HMP) PPKN DEMOKRATIA DALAM PEMBENTUKAN SIKAP DEMOKRATIS PENGURUS (Tesi Lestari) .....79-86**

## **ANALISIS PENGUKURAN KINERJA KESALEHAN SOSIAL PROPINSI JAWA TIMUR**

Mochammad Rozikin

Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya Malang

Email: [mail.rozikin@yahoo.com](mailto:mail.rozikin@yahoo.com)

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengukuran kinerja kesalehan social berdasar telaah misi ke 5 RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019. Untuk itu dilakukan telaah terhadap Kegiatan RKPD, Indikator Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Program Prioritas RPJMD dan RKPD Jawa Timur Tahun 2015. Situs penelitian dilakukan pada SKPD Satpol PP, Biro Kesmas, dan Bankesbangpol Provinsi Jawa Timur. Dalam misi kelima RPJMD Provinsi Jawa Timur tahun 2014-2019 yaitu Meningkatkan Kualitas Kasalehan Sosial dan Harmoni Sosial, maka sudah selayaknya diketahui tingkat capaian keberhasilan pelaksanaan misi tersebut sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan adanya pengukuran kinerja. Hali ini diperlukan untuk memberikan arah koreksi upaya mengimplementasikan misi kelima agar tidak terlalu jauh deviasinya antara yang direncanakan dengan capaiannya. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa , dalam usaha meningkatkan kesalehan social di masyarakat Jawa Timur , Pemprov menjalankan 7 program yaitu : 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, 2) Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, 3) Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama, 4) Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, 5) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, 6) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM, dan 7) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan. Namun demikian, program tersebut perlu ditingkatkan jangkauan masyarakat sasaran, dan kualitas konten programnya sehingga memerlukan dukungan penambahan anggaran kegiatan, peningkatan kualitas aparatur SKPD (OPD) terkait, peningkatan koordinasi lembaga, dan perlu ada kesamaan pemahaman konsep kesalehan social.

### **PENDAHULUAN**

Peran pemerintah secara umum yaitu; a) membuat kebijakan (regulasi) untuk mewujudkan ketertiban dalam masyarakat, b) melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengurangi kesenjangan di masyarakat maupun kesenjangan antara kota dan desa serta kesenjangan antar daerah, c) melakukan pemberdayaan untuk tumbuhnya kemandirian masyarakat ,

dan c) memberikan pelayanan public untuk distribusi keadilan social. Khususnya dalam peran pembangunan, diperlukan dukungan semua stakeholder, sebab hakekat pembangunan nasional adalah pembangunan untuk seluruh wilayah Indonesia, dan untuk seluruh masyarakat Indonesia.

Salah satu sector menjadi perhatian pemerintah propinsi Jawa Timur yang dicanangkan dalam RPJMD 2014-2019 misi kelima yaitu

Meningkatkan Kualitas Kasalehan Sosial dan Harmoni Sosial, dengan program yang dijalankan yaitu : 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, 2) Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, 3) Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama, 4) Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, 5) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, 6) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM, dan 7) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Permasalahan yang menjadi titik penting untuk diperhatikan khususnya menyangkut kesalehan sosial terdiri dari beberapa aspek. Aspek pertama terkait agama, dimana dalam dokumen LKPJ AMJ Gubernur Jawa Timur tahun 2009 - 2014 menyebutkan bahwa selama tahun 2009-2012, rasio tempat ibadah di Jawa Timur masih sekitar 5 tempat ibadah per seribu penduduk. Ketersediaan tempat ibadah yang dibandingkan dengan jumlah penduduk menghasilkan jumlah yang cukup kecil. Kondisi tersebut memang tidak secara langsung berpengaruh terhadap ketentraman dan keamanan, akan tetapi jika fasilitas tempat ibadah tidak mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat dikhawatirkan mudah memunculkan konflik terkait agama.

Aspek kedua terkait penegakan hukum yang direpresentasikan dengan angka kriminalitas. Kriminalitas adalah segala macam bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomi dan psikologis yang melanggar hukum yang berlaku serta norma-norma sosial dan agama.

Angka kriminalitas merupakan suatu angka yang menunjukkan kejadian kriminal yang terjadi pada suatu waktu dan daerah tertentu. Berdasarkan data dari Polda Jawa Timur menyebutkan bahwa angka kriminalitas 3 tahun kebelakang mengalami penurunan, akan tetapi yang perlu menjadi fokus perhatian adalah rasio yang dihasilkan menyebutkan bahwa dalam setahun rata-rata terjadi 3-4 tindak kriminal di antara sepuluh ribu penduduk. Meskipun rasio tindak kriminal tersebut cukup kecil akan tetapi potensi-potensi terjadinya kriminalitas masih sangat terbuka. Sedangkan aspek yang terakhir adalah mengenai permasalahan sosial di masyarakat. Di dalam aspek ini di representasikan dengan jumlah penyandang masalah kesejahteraan sosial. PMKS adalah dimana seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan atau gangguan, tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya, sehingga tidak dapat terpenuhi kebutuhan hidupnya secara memadai dan wajar. Berdasarkan data Dinas Sosial kab/Kota se Jawa Timur jumlah PMKS di Jawa Timur terus meningkat dari tahun 2009 hingga tahun 2013. Data pada tahun 2012 menunjukkan jumlah yang sangat besar dimana jumlah PMKS sebesar 3.996.795.

Pengetahuan dan penghayatan masyarakat terhadap kesalehan sosial diharapkan dapat diwujudkan dalam perilaku dan akhlak mulia warga negara sehingga dapat menghasilkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang bermartabat. Sebagaimana telah umum diyakini, agama bukan sekadar mengajarkan tentang hubungan antara pemeluk agama dan

Sang Pencipta, melainkan juga tentang hubungan antar sesama manusia dan hubungan dengan alam sekitarnya. Oleh sebab itu, perwujudan harmoni sosial diarahkan bukan saja untuk meningkatkan kualitas kesalehan individual umat beragama, tetapi juga mendorong terwujudnya kesalehan sosial dan ekologis, serta moralitas publik dalam pengelolaan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Guna mewujudkan Jawa Timur lebih berakhlak, diperlukan landasan kesalehan sosial dalam pemahaman dan pengamalan nilai-nilai agama dan budi pekerti. Kesalehan sosial menjadi salah satu capaian yang diharapkan Pemerintah guna menghasilkan stabilitas situasi dan kondisi atas konflik-konflik yang terjadi akibat SARA. Melalui kesalehan sosial, diarahkan untuk memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika dalam pembangunan, membina akhlak mulia, budi pekerti, memupuk etos kerja, menghargai prestasi, dan menjadi kekuatan pendorong guna mencapai Jawa Timur lebih makmur dan lebih berakhlak. Perwujudan akhlak yang mulia membutuhkan pemahaman, penghayatan, dan pengamalan nilai-nilai agama dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kesalehan sosial dalam beragama juga akan menciptakan iklim kondusif bagi terciptanya harmonisasi kehidupan sosial, sehingga ketegangan sosial yang memicu konflik internal dan/atau antar-umat beragama dapat dicegah secara dini tanpa harus merusak tatanan kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, kualitas kesalehan sosial di suatu daerah secara langsung maupun tidak langsung akan berdampak kepada

Harmoni sosial. Kemampuan Pemerintah untuk mengendalikan secara preventif seharusnya dimulai dari membangun kesadaran masing-masing individu melalui kesalehan individu.

Guna mencapai perwujudan harmoni sosial di Jawa Timur, Pemerintah Provinsi Jawa Timur merumuskan visi dan misi pembangunan jangka menengah dengan memasukkan unsur kesalehan sosial guna mewujudkan harmoni sosial di masyarakat. Visi yang termuat di dalam dokumen tersebut adalah "Jawa Timur lebih Sejahtera, Berkeadilan, mandiri, Berdaya Saing dan Berakhlak". Secara khusus keterhubungan dengan permasalahan kesalehan sosial tergambar dalam penjelasan visi Jawa Timur Lebih Berakhlak dengan penjelasan bahwa kedepan diharapkan. Adapun misi yang sesuai untuk mencapai visi tersebut adalah misi kelima yang menyebutkan "Meningkatkan Kualitas Kesalehan sosial Dan Harmoni sosial". Misi kelima tersebut menjadi fokus perhatian di dalam kajian penelitian ini. erwujudnya peningkatan akhlak mulia, baik secara individual maupun sosial.

Dalam manajemen pemerintahan salah kegiatan yang strategis adalah evaluasi pengukuran kinerja sebagaimana Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang mengamanatkan adanya pengukuran kinerja. Hal ini dimaksudkan untuk memahami ketercapaian pelaksanaan program untuk dijadikan masukan dalam perencanaan program pembangunan berikutnya, sehingga akan menghasilkan peningkatan kualitas baik perencanaan maupun

pelaksanaan dari pembangunan, khususnya dalam kesalehan social.

## **KAJIAN PUSTAKA**

### **1. Evaluasi Pengukuran**

#### **Kinerja Sektor Publik**

Era sekarang berkembang tuntutan *Good Governance*, yakni tuntutan terhadap kinerja organisasi sektor publik, khususnya organisasi pemerintah pusat dan daerah dalam menyelenggarakan peran dan fungsinya dengan lebih efektif, efisien dan produktif. Kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang dicapai suatu organisasi, meliputi: (1) kemampuan kerja, (2) sesuatu yang dicapai, atau (3) prestasi yang diperlihatkan.

Pasalong (2010) mengartikan kinerja organisasi adalah totalitas hasil kerja yang ditunjukkan organisasi yang diusahakan melalui aktivitas (program/kegiatan) secara sistematis sambil meningkatkan kapasitas organisasi secara berkelanjutan. Prawirosentono (1999), kinerja merupakan hasil kerja (*job performance*) organisasi sesuai dengan wewenang dan tanggungjawab yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi, misi dan tujuan organisasi. Dan kinerja tidak terbatas pada kinerja individu saja, tetapi juga kinerja kelompok/tim dan kinerja organisasi. Yuwono (2002), kinerja organisasi berhubungan dengan berbagai aktivitas dalam mata rantai (*value chain*) yang ada pada organisasi. Berbagai faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi sesungguhnya memberikan informasi mengenai prestasi pelaksanaan dari unit-unit organisasi, dimana organisasi memerlukan penyesuaian-penyesuaian atas seluruh aktivitas sesuai dengan tujuan organisasi.

Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kinerja instansi pemerintah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Dari berbagai definisi kinerja organisasi di atas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja organisasi ialah keberhasilan yang ditunjukkan oleh sebuah organisasi atau tingkat pencapaian pelaksanaan tugas suatu organisasi dalam upaya mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi tersebut.

Keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dapat diketahui dengan menggunakan penilaian kegiatan organisasi tersebut berdasarkan peraturan, norma dan etika yang berlaku. Yuwono, et al (2002) pengukuran kinerja merupakan proses mencatat dan tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam pencapaian misi yang ditampilkan melalui hasil berupa [roduk, jasa atau proses dalam organisasi. Kinerja organisasi dapat dilihat dari visi dan misi yang ada, kinerja proses dapat dilihat dari prosedur standar operasi, dan kinerja pegawai dapat dilihat dari petunjuk kerja manual yang ada. Sehingga penggambaran visi dan misi dari suatu organisasi harus mampu menjelaskan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam suatu organisasi yang dirumuskan

dalam sebuah tugas pokok dan fungsi dan akan menjadi satuan kerja dalam menciptakan aktivitas atau kegiatan pekerja atau pegawai.

Pengukuran kinerja instansi pemerintah yang berlaku sekarang dikenal dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) yang pada pokoknya merupakan instrumen yang digunakan instansi pemerintah dalam memenuhi kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi, terdiri dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan, yaitu perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, dan pelaporan kinerja. Dan untuk mengukur kinerja organisasi public menggunakan indicator kinerja yang disusun oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN), ada 5 indikator yaitu: indikator masukan, indikator keluaran, indikator hasil, indikator manfaat dan indikator dampak.

Setelah pengukuran kinerja dilakukan maka langkah berikutnya adalah melakukan evaluasi kinerja. Dari beberapa pendapat pakar yaitu Wirawan (2012), Evert Vendung, Brinkerhoff, dkk (1983), bahwa evaluasi sifatnya luas, evaluasi dapat dilakukan meliputi dua aspek yaitu kuantitatif dan kualitatif. Dimana melaksanakan pengukuran terhadap suatu kinerja, dalam hal ini lebih bersifat mengukur kuantitas daripada kerja sedangkan penilaian menunjuk pada segi kualitas, jadi evaluasi berkaitan dengan keduanya yaitu pengukuran dan penilaian dimana pengukuran yang sifatnya kuantitatif dan penilaian bersifat kualitatif. Secara umum evaluasi diartikan sebagai suatu usaha untuk mengukur dan memberi nilai secara obyektif

atas pencapaian hasil-hasil pelaksanaan program/kebijakan) yang telah direncanakan sebelumnya dan dilakukan secara sistematis dan obyektif dengan menggunakan metode evaluasi yang relevan. (Bappenas, 2004). Secara teoritis evaluasi dilakukan dengan tujuan memberikan penilaian tentang kinerja ataupun kemanfaatan sesuatu kegiatan tertentu Sedangkan tujuan evaluasi yaitu : 1) Untuk memperoleh dasar bagi pertimbangan akhir suatu periode kerja, apa yang telah dicapai, apa yang belum dicapai, dan apa yang perlu mendapat perhatian khusus, 2) Untuk menjamin cara kerja yang efektif dan efisien dan ekonomis, 3) Untuk memperoleh fakta tentang kesulitan, hambatan, penyimpangan dilihat dari aspek-aspek tertentu.

## **2. Kesalehan Sosial**

Manusia merupakan makhluk social dimana untuk memenuhi kebutuhannya memerlukan organisasi, baik organisasi negara (public), swasta (privat) atau organisasi kemasyarakatan. Khususnya organisasi public (pemerintah), salah satu perannya adalah memenuhi (menunjang) kebutuhan masyarakat dalam mewujudkan kesalehan social. Diantara kebutuhan kesalehan social adalah masyarakat dengan mudah tanpa ancaman atau ketakutan menjalankan kewajiban agamanya, untuk ini pemerintah memfasilitasi agar kewajiban beragama (ibadah) dapat ditunaikan sebaik-baiknya. Disamping itu kebutuhan social seperti dalam hidup bermasyarakat berkembang harmonis, kerukunan, kegotongroyongan, kekeluargaan, sedikit atau tidak adanya konflik horisonal, kejahatan social (*pathologi*

*social*) rendah atau tidak ada. (Wahab ed, 2015).

Kata kesalehan social, terdiri kata “shaleh” (bhs Arab) yang banyak arti, yaitu : memperbaiki, membenarkan, mendamaikan, memperbaiki, patuh/taat, sesuai, pantas, berjiwa melakukan perbaikan. Dan dihubungkan dengan tindakan atau perilaku yang didorong nilai Tauhid (Ketuhanan) kepada masyarakat dan di lingkungannya, agar masyarakat dan lingkungannya berkembang nilai-nilai keserasian dan keharmonisan sebagai nilai universal kemanusiaan. Sedangkan social, berkaitannya dengan keberadaan aktivitas masyarakat, dimana dalam masyarakat berkembang nilai-nilai yang membentuk masyarakat yang sering disebut kearifan local atau modal social, seperti keterikatan dengan norma, adat isitiadat, kepercayaan (*trust*), jejaring, dan lembaga kemasyarakatan yang mengelola perkembangan masyarakat dari pengaruh yang dinamika masyarakat, baik local, nasional maupun global.

Kesalehan social (ibadah social) erat kaitannya dengan pemahaman masyarakat dengan nilai-nilai agama yang diyakininya untuk dipraktekkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, dimana pada ujungnya adalah kesalehan social dapat mendukung keberlangsungan dan keberlanjutan pembangunan nasional maupun daerah. Dalam Islam, sempurna agama seseorang apabila terintegrasi ketaatan kepada Allah SWT (*hablum minallah*) dan hubungan bermasyarakatnya (*hablum minannas*).

Penelitian ini tidak dimaksudkan meneliti kesalehan social perorangan warga masyarakat

sebab mengidentifikasi kasalehan social sebagai pengamalan keagamaan seseorang bersifat pribadi, kemudian dihasilkan angka Indeks Kesalehan Sosial Masyarakat Indoensia seperti yang dikeluarkan oleh Kemeterian Agama RI (Wahab ed, 2015). Tetapi lebih sesuai Pemda Kabupaten Bogor (RPJMD Kabupaten Bogor 2008-2013), Misi Kesatu: Meningkatkan Kesalehan Sosial Masyarakat dalam Kehidupan Kemasyarakatan, terdiri dari: a) Meningkatnya pelayanan dan kemudahan bagi umat beragama dalam melaksanakan ibadahnya; b) Meningkatnya kualitas SDM dan prasarana peribadatan serta lembaga pendidikan keagamaan; c) Meningkatnya harmonisasi hubungan antar dan intra umat beragama; d) Meningkatnya pemahaman dan kepatuhan masyarakat terhadap Perda dan peraturan perundang-undangan yang berlaku; e) Memajukan seni budaya dan lingkung seni serta memelihara dan melindungi situs maupun benda-benda kepurbakalaan; f) Meningkatnya partisipasi perempuan dalam pembangunan; g) Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari bentuk kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi dalam pembangunan; dan h) Meningkatnya kesejahteraan fakir miskin, penyandang cacat dan penyandang masalah sosial lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian analisis pengukuran kinerja kesalehan social ini mempergunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, dimana fokusnya adalah Kegiatan RKPD, Indikator Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Program Prioritas

RPJMD dan RKPD Jawa Timur Tahun 2015, meliputi : 1) Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan, 2) Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal, 3) Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama, 4) Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat, 5) Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan, 6) Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM, dan 7) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan.

Situs penelitian adalah : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur; BakesbangPol Provinsi Jawa Timur; Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur; dan Biro Administrasi Kemasyarakatan. Adapun sumber datanya adalah : observasi, wawancara dengan informan kunci, dan dokumen, serta dilakukan FGD. Kegiatan analisis data dilakukan terus menerus dari awal sampai akhir penelitian. (Moleong, 2002)

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Salah satu propinsi di Indonesia yang pondok pesantren hampir ada di seluruh daerahnya dan "Kota pahlawan" bagian dari sejarahnya adalah Jawa Timur, terletak pada 111,1'-114,4' Bujur Timur dan 7, 12'-8, 48' Lintang Selatan, berada di sebelah timur pulau Jawa, yang luas wilayahnya 46. 428, 57 km, terbagi menjadi 38 kabupaten/kota, dengan rincian 29 kabupaten dan 9 kota , ada 664 Kecamatan dan 8.501 Desa/Kelurahan. Penduduknya mencapai 37,47 juta jiwa pada tahun

2013, dan perkiraan BPS akan mencapai 39,89 juta jiwa pada tahun 2020. (BPS, 2017).

Dalam keadaan kesalehan social masyarakat Jawa Timur sebagaimana dikatakan oleh Ka Bakesbangpol bahwa:

"Pemahaman kami tentang kesalehan social adalah keadaan masyarakat yang tertib, tidak ada konflik social yang berkepanjangan, dan tidak ada kejahatan besar yang menjadikan masyarakat ketakutan . disamping itu, masyarakat dengan leluasa menjalankan ibadahnya. Alhamdulillah masyarakat Jawa Timur menikmati keadaan tersebut, berarti kondisi kesalehan social baik, terkendali. Dinamika masyarakat dengan segala kesibukannya tentu berpengaruh terhadap kesalehan sosialnya, tetapi yang mendasar adalah pemahaman beragama dan mengerti hak kewajiban sebagai warga masyarakat maka kesalehan social akan baik. Sedangkan pada lembaga atau badan kami, berusaha membuat program untuk terwujud kesalehan social. Meskipun demikian kami merasakan kurang luas jangkauan programnya dengan melihat luasnya wilayah dan jumlah penduduk yang besar. Disamping itu kami juga menyadari dengan keterbatasan anggaran dan pegawai kami yang ada perlu ditambah dan ditingkatkan kualitasnya. Lebih dari itu, ketauladan pimpinan daerah

yaitu pak gubernur, juga factor penting keadaan kesalehan social masyarakat, termasuk para pejabat di lingkungan pemerintahan. Yang juga sangat penting perannya adalah para ulama dan pesantren, sebab mayoritas penduduk Jawa Timur itu muslim dan pondok pesantren ada dimana-mana.” (Wawancara, 23 September 2015)

Pada Satpol PP memahami kesalehan social dan prakteknya dikatakan sebagai berikut:

“Kami paling sering berbenturan dengan masyarakat, sebab tugas kami adalah mengamankan pelaksanaan peraturan pemerintah. Bermacam-macam sikap masyarakat, apalagi jika berhubungan dengan penggusuran maka mungkin tidak lagi mengenal kesalehan social. Menurut kami kesalehan social itu orang/masyarakat yang agamanya baik kemudian dalam perbuatan sehari-harinya sesuai dengan tingkat agamanya tersebut. Tetapi yang sering kami hadapi, meraka sudah “haji” tetapi melanggar peraturan, misalnya berjualan ditempat terlarang, mendirikan bangunan ditempat sengketa. Oleh karena itu menurut kami, hendaknya praktek ibadahnya juga digunakan saat bermasyarakat. Sebagai orang awam, mestinya seimbang *hablum minallah* dengan *hablum minannas*. Maka jika yang dijalankan keadaan kesalehan social

bagus adanya.” (Wawancara, 17 September 2015)

Keberadaan pemerintah tidak langsung menjadikan masyarakat berkesalehan social sangat baik sebab itu memerlukan waktu panjang sebagai proses pendidikan di keluarga dan masyarakat, tetapi pemerintah menciptakan kondisi untuk berkembangnya kesalehan social melalui program pembangunan yang direncanakan, sebagaimana diungkapkan oleh Bappeda bahwa:

“Keberadaan kami adalah menterjemahkan dan menjalankan yang menjadi kebijakan pak gubernur, diantaranya adalah kebijakan pak gubernur tentang kesalehan social yang menjadi IKU pada Misi ke 5 di RPJMD. Kami mengkoordinasikan SKPD terkait untuk menunjang capai IKU misi ke 5 tersebut. Terusterang bukan hal tidak mudah memahami kesalehan social untuk diterjemahkan menjadi rencana kegiatan. Oleh karena itu aktivitas pertama kami adalah menyamakan persepsi tentang kesalehan social, kemudian diturunkan menjadi rencana kegiatan SKPD terkait. Memang kami akui, bahwa melakukan koordinasi bagi SKPD itu juga tidak mudah, sering benturan dengan perilaku birokrasi tentang eselon. Contoh FGD yang dilakukan untuk mendiskusikan temuan penelitian kesalehan social ini. Yang kami undang agar bisa memberikan koreksi atau masukan ternyata yang hadir

tidak demikian. Tapi yang pasti adalah pak gubernur sangat respon dengan kesalehan social ini, dan diberbagai pertemuan beliau menyampaikan pentingnya kesalehan social itu menjadi

IKU yang dijalankan.” (Wawancara, 24 September 2015)

Table berikut hasil rekapitulasi RKPD yang dilakukan oleh SKPD terkait dalam mewujudkan Misi 5 RPJMD Jawa Timur tahun 2014-2019.

**Tabel : Kegiatan RPKD, Indikator Kinerja dan Anggaran Berdasarkan Program Prioritas RPJMD dan RPKD Jawa Timur Tahun 2015**

NO	KEGIATAN RPKD TAHUN 2015	INDIKATOR KINERJA	ANGGARAN (IDR)
<b>A. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan (Rp. 1.198.100.000)</b>			
1.	Pengamanan, pengawalan pimpinan daerah serta orang-orang penting	Pengamanan dan pengawalan Pejabat dan Orang-orang Penting	200.250.000
2.	Pelatihan kesamaptaan anggota satpol PP se Jatim	Pelatihan kesamaptaan anggota satpol PP se Jawa Timur	173.550.000
3.	Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan , Demo-demo Massa ke Kantor Gubernur, Gedung Negara Grahadi dan Aset Milik Pemerintah Provinsi Jawa Timur	133.847.100
4.	Penanganan Pemilu Kepala Daerah	Terciptanya Kamtramtibmas dalam rangka Pemilu Kepala daerah Jawa Timur mulai tahap persiapan, pelaksanaan, pelantikan dan pasca.	87.389.100
5.	Peningkatan Hubungan Kerjasama dalam Rangka Penyelenggaraan Tibum dan Tramas	Terciptanya hubungan kerjasama tibumtranmas pada daerah rawan konflik dan daerah perbatasan	182.009.450
6.	Peningkatan Kemampuan Aparat Satpol PP	Pelatihan / Bimtek anggota Satpol PP	421.054.350
<b>B. Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal (Rp. 2.012.900.000)</b>			
1.	Operasional Patroli Wilayah Trantibum	Patroli wilayah dan koordinasi penyelenggaraan tramtibum di daerah	629.106.500
2.	Pengembangan SDM dan performance PPNS se Jatim	Pelatihan / Bimtek PPNS Satpol PP	213.003.100

3.	Penegakan Peraturan Daerah	Operasi penertiban masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan daerah	993.202.100
4.	Penyuluhan, Sosialisasi dan Advokasi Perda serta Keputusan Kepala Daerah	Diseminasi dan Fasilitas Penegakan Perda	177.588.300
<b>C. Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama (Rp. 600.000.000)</b>			
1.	Peningkatan Efektivitas Lembaga Forum Komunikasi Kerukunan antar Umat Beragama	Jumlah peserta Peningkatan Efektivitas Lembaga Forum Komunikasi Kerukunan antar Umat Beragama	600.000.000
2.	Peningkatan Potensi Kerukunan Hidup Umat Beragama	Jumlah peserta Peningkatan Potensi Kerukunan Hidup Umat Beragama	200.000.000
<b>D. Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Rp. 900.000.000)</b>			
1.	Peningkatan Koordinasi Pemantauan Orang Asing, NGO, dan Lembaga Asing Kab./Kota se-Jatim	Jumlah peserta Peningkatan Koordinasi Pemantauan Orang Asing, NGO, dan Lembaga Asing Kab./Kota se-Jatim	200.000.000
2.	Peningkatan Kapasitas Jaringan Informasi Konflik di Jawa Timur	Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Jaringan Informasi Konflik di Jawa Timur	200.000.000
3.	Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat	Jumlah peserta Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat	300.000.000
4.	Peningkatan Pemantauan Perkembangan Situasi dan Kondisi Kamtibmas di Jatim	Jumlah laporan hasil pemantauan perkembangan situasi dan kondisi Kamtibmas di Jatim	200.000.000
<b>E. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan (Rp. 2.000.000.000)</b>			
1.	Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat untuk Mewujudkan Jawa Timur yang Kondusif	Jumlah peserta kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat untuk Mewujudkan Jawa Timur yang Kondusif	2.000.000.000
<b>F. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM (Rp. 1.000.000.000)</b>			

1.	Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia	Jumlah peserta Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia	300.000.000
2.	Peningkatan Pelaksanaan RANHAM di Jawa Timur	Jumlah Peserta Peningkatan Pelaksanaan RANHAM di Jawa Timur	200.000.000
3.	Fasilitasi Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia	Jumlah laporan kelompok kerja / jumlah peserta	500.000.000
<b>G. Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan (Rp. 1.000.000.000)</b>			
1.	Pemantapan wawasan kebangsaan (wasbang) bagi masyarakat Jawa Timur	Jumlah peserta kegiatan Pemantapan wawasan kebangsaan (wasbang) bagi masyarakat Jawa Timur	500.000.000
2.	Penguatan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, Rasa Cinta Tanah Air Kesadaran Berbela Negara dan Berkonstitusi	Jumlah peserta kegiatan Penguatan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, Rasa Cinta Tanah Air Kesadaran Berbela Negara dan Berkonstitusi	200.000.000
3.	Pemantapan Pembauran Kebangsaan di Daerah	Jumlah peserta kegiatan Pemantapan Pembauran Kebangsaan di Daerah	200.000.000
4.	Peningkatan Efektifitas Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	Jumlah peserta kegiatan Peningkatan Efektifitas Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK)	100.000.000

Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dianggarkan Rp. 1.198.100.000,00 dengan 6 (enam) kegiatan, dijalankan oleh dua SKPD yaitu Bakesbangpol dan Satpol PP. Dari 6 (enam) kegiatan hanya 1 (satu) kegiatan yang mempunyai hubungan langsung dengan kesalehan social yaitu Peningkatan Hubungan Kerjasama dalam Rangka Penyelenggaraan Tibum dan Tramas dengan indicator terciptanya hubungan kerjasama tibumtranmas pada daerah rawan konflik dan daerah perbatasan. Sedangkan 5

(lima) kegiatan bersifat internal lembaga yang kurang berhubungan langsung dengan kesalehan social. Keamanan dan kenyamanan lingkungan merupakan kerja bersama antara aparatur pemerintah dengan masyarakat sehingga masyarakat perlu dilibatkan, misalnya dengan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan. Dengan pemberdayaan maka dimungkin adanya kemandirian masyarakat dalam menjaga keamanan dan kenyamanan lingkungannya. Model kolaborasi stakeholder dalam

meningkatkan keamanan dan kenyamanan lingkungan sebagai wujud kesalehan social perlu menjadi pertimbangan untuk dicanangkan pada rencana pembangunan berikutnya.

Program Pemeliharaan Kantribmas dan Pencegahan Tindak Kriminal menggunakan anggaran sebesar Rp. 2.012.900.000,00 dengan 4 (empat) kegiatan, dijalankan oleh Satpol PP, dan hanya 2 (dua) kegiatan yang bisa dikaitkan dengan peningkatan kesalehan social yaitu kegiatan 1) Penegakan Peraturan Daerah dengan indicator Operasi penertiban masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan daerah, dan Penyuluhan, Sosialisasi dan Advokasi Perda serta Keputusan Kepala Daerah, dengan indicator Diseminasi dan Fasilitas Penegakan Perda. Kegiatan ini bisa ddiategorikan menunjang kesalehan social sebab diharapkan berkembang ketaatan masyarakat terhadap hukum atau kebijakan (Perda). Salah karekteristik kesalehan sosial adalah masyarakat yang taat hukum sehingga ketertiban dan keteraturan bisa diharapkan. Keadaan itu ditunjang dengan kegiatan penegakan peraturan daerah dmelalui operasi penertiban. Program ini diharapkan ada sikap jera masyarakat pelanggar Perda sehingga pada akhirnya berkembang ketertiban dan keteraturan dimaksud. Namun, kepatuhan masyarakat yang diharapkan terhadap peraturan adalah secara berkesadaran, bukan atas ancaman atau tekanan. Oleh karena itu pada perencanaan pembangunan kedepan perlu dikembangkan program bersama masyarakat untuk meningkatkan kesadaran berketepatan terhadap peraturan, sehingga pada

akhirnya tindak criminal bisa menurun.

Program Peningkatan Kerukunan Umat Beragama menggunakan anggaran sebesar Rp. 600.000.000,00 yang dijalankan oleh Bakesbangpol dengan 2 kegiatan yang diharapkan mendukung berkembangnya kesalehan social, yaitu 1) Peningkatan Efektivitas Lembaga Forum Komunikasi Kerukunan antar Umat Beragama dengan indicator Jumlah peserta Peningkatan Efektivitas Lembaga Forum Komunikasi Kerukunan antar Umat Beragama, dan 2) Peningkatan Potensi Kerukunan Hidup Umat Beragama, dengan indicator Jumlah peserta Peningkatan Potensi Kerukunan Hidup Umat Beragama. Program ini sangat mendukung terciptanya kesalehan social, yakni toleransi masyarakat terhadap perbedaan sebagai kunci keharmonisan, hanya saja program peningkatan efektivitas diukur dengan jumlah peserta peningkatan efektivitas. Lebih tepat jika frekuensi penyelenggaraannya dengan materi yang diberikan, tetapi bila terukur dengan jumlah peserta maka yang sering terjadi hanya formalitas penyelenggaraan kegiatan, peserta tidak selektif dan terkesan sekedar administrative berupa pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan.

Program Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dilaksanakan oleh Bakesbangpol dengan anggaran Rp. 900.000.000,00, terdapat 4 program tetapi yang ada hubungan dengan kesalehan social ada 2, yaitu: 1) Peningkatan Kapasitas Jaringan Informasi Konflik di Jawa Timur, dengan indicator Jumlah peserta Peningkatan Kapasitas Jaringan Informasi Konflik di Jawa Timur,

dan 2) Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat, dengan indicator Jumlah peserta Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dini dan Cegah Dini terhadap Konflik di Masyarakat. Program ini bagus, dengan peningkatan kapasitas informasi konflik maka bisa preventif mencegahnya, tetapi dalam waktu bersamaan konflik agama “Syiah” Sampang tidak terantisipasi. Hal ini berhubungan dengan program kedua yaitu peningkatan dan pengembangan sistem deteksi dini dan cegah dini terhadap konflik di masyarakat. Fungsi intelegensi kurang berfungsi, atau koordinasi dengan TNI-Polri perlu diefektifkan. Program Pemberdayaan Masyarakat untuk Menjaga Ketertiban dan Keamanan dilaksanakan oleh Bakesbangpol yang menggunakan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,00 dengan hanya 1 program yang sesuai dengan kesalehan social yaitu Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat untuk Mewujudkan Jawa Timur yang Kondusif dengan indicator Jumlah peserta kegiatan Pendidikan Kemasyarakatan Produktif dalam Rangka Peningkatan Sumber Daya Manusia dan Partisipasi Masyarakat untuk Mewujudkan Jawa Timur yang Kondusif. Mengingat luas wilayah dan jumlah masyarakat Jawa Timur yang besar maka perlu difikirkan kolaborasi atau kemitraan dengan Bakesbangpol daerah maupun lembaga kemasyarakatan yang ada punya pengaruh kuat dan luas di masyarakat. Sehingga indicator berkembang menjadi jumlah pertemuan yang dilakukan bersama

dengan mitra kerja, yang secara akumulasi peserta akan lebih banyak. Program Peningkatan Kesadaran Hukum dan HAM dijalankan oleh Bakesbangpol dengan anggaran sebesar Rp. 1.000.000.000,00 yang menjabarkan dalam 3 program yaitu : 1) Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia, dengan indicator Jumlah peserta Pengkayaan metode pengembangan dan peningkatan kesadaran hukum dan hak asasi manusia; 2) Peningkatan Pelaksanaan RANHAM di Jawa Timur, dengan indicator Jumlah Peserta Peningkatan Pelaksanaan RANHAM di Jawa Timur; dan 3) Fasilitasi Penyusunan Indeks Demokrasi Indonesia, dengan indicator jumlah laporan kelompok kerja / jumlah peserta. Ketiga program dengan indicator yang disusun tidak secara langsung meningkatkan kesalehan social di masyarakat.

Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan yang dijalankan oleh Bakesbangpol dengan anggaran Rp. 1.000.000.000,00. Program ini diturunkan menjadi 4 kegiatan, yaitu : 1) Pemantapan wawasan kebangsaan (wasbang) bagi masyarakat Jawa Timur, dengan indicator Jumlah peserta kegiatan Pemantapan wawasan kebangsaan (wasbang) bagi masyarakat Jawa Timur; 2) Penguatan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, Rasa Cinta Tanah Air Kesadaran Berbela Negara dan Berkonstitusi, dengan indicator Jumlah peserta kegiatan Penguatan Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila, Rasa Cinta Tanah Air Kesadaran Berbela Negara dan Berkonstitusi; 3) Pemantapan Pembauran Kebangsaan di Daerah, dengan indikator Jumlah

peserta kegiatan Pemantapan Pembauran Kebangsaan di Daerah; dan 4) Peningkatan Efektifitas Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK), dengan indikator Jumlah peserta kegiatan Peningkatan Efektifitas Kelompok Kerja Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK). Program ini yang paling sesuai dengan kebutuhan peningkatan kesalehan social meskipun dengan anggaran yang hampir sama dengan program lainnya, dan indicator kuantitatif jumlah peserta.

Pemerintah Propinsi Jawa Timur tergolong responsive dengan dinamika global yang membawa nilai-nilai kontra nasionalisme berdasarkan Pancasila sehingga mencanangkan kesalehan social dalam meningkatkan keharmonisan bermasyarakat. Variable untuk meningkatkan kesalehan social sangat bervariasi dan kompleks, diantaranya adalah 7 program dengan indicator yang ditetapkan. Namun untuk mencermati dengan baik dari yang direncanakan sampai pelaksanaan program pembangunan maka perlu perubahan dalam menyusun rencana pembangunan (dari tujuan, sasaran dan indicator sasaran) agar mudah evaluasi pengukuran kinerjanya. Antara tujuan, sasaran dan indicator adalah diskripsi linier dimana Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Kriteria sasaran memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Dirumuskan untuk mencapai atau menjelaskan tujuan; 2) Untuk mencapai satu tujuan dapat dicapai melalui beberapa sasaran; 3)

Disusun dengan memperhatikan isu-isu strategis daerah; dan 4) Memenuhi kriteria SMART-C.

### **Diskusi Kelembagaan Untuk Peningkatan Kesalehan Sosial**

Dari dialog yang dilakukan saat wawancara dengan informan kunci maupun FGD dipahami bersama bahwa kesalehan social sangat berhubungan dengan pemahaman agama seseorang atau masyarakat. Sebab kata “saleh” diambil dari kata bahasa arab, oleh karena itu program yang disusun oleh SKPD terkait hendaknya ada berhimpitan dengan umat, khususnya berkaitan dengan kelembagaan agama, baik itu masjid, musholah, pondok pesantren, gereja, pure, vihara, dan kelembagaan keagamaan yang ada di masyarakat yang dimanfaatkan untuk meningkatkan pemahaman (pengajian, tahlilan, dan semacamnya).

Bagi masyarakat muslim, antara umat dan masjid itu ibarat dua sisi keping mata uang, dimana jika satu sisi keping mata uang rusak maka uang tersebut tidak bisa alat tukar (untuk membeli barang). Begitu pula antara masjid dan umat, jika umat rusak (hablum minallah dan atau hablum minannas) rusak maka masjid tidak berfungsi dengan baik, atau jika masjid tidak “makmur” maka keislaman ummat juga mengalami masalah. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberdayaan baik manusianya maupun masjidnya, dan yang lebih sederhana adalah dengan meningkatkan peran dan fungsi masjid dalam membangun umat (kesalehan sosialnya). Demikian juga dengan umat lainnya, tentu antara rumah ibadah dengan kualitas beragamanya (termasuk kesalehan social) saling berpengaruh dan melengkapi.

Jumlah rumah ibadah di Jawa Timur (Kanwil Kementerian, 2014) adalah : masjid 39.405 unit, mushola 106.290 unit, gereja Kristen 2.416, gereja katolik 517 unit, pura 391 unit, vihara 162 unit, klenteng 18 unit. Dan jumlah pondok pesantren 6.561 kompleks yang didalamnya ada santri, ustadz dan kyai. Sehingga program kesalehan social hendaknya ada yang berhimpitan dengan lembaga keagamaan tersebut. Untuk mengembalikan fungsi masjid dan rumah ibadah lainnya dengan baik dan proposional menjadi bagian penting untuk meningkatkan kesalehan masyarakat.

#### KESIMPULAN

Setiap pribadi maupun masyarakat berkeinginan kehidupannya dalam keharmonisan baik dalam *hablum minallah* maupun *hablum minnas* (kesalehan social), oleh karenanya semua pihak mempunyai peran untuk menjaga keadaan tersebut dengan seimbang dan proposional. Pemerintah dengan SKPD terkait hendaknya berusaha merencanakan program dengan sasaran dan indicator terukur dengan baik agar mudah dilakukan evaluasi pengukuran kinerjanya. Dengan jangkauan wilayah Jawa Timur yang luas (38 daerah) dan penduduk yang besar (hampir 40 juta) maka SKPD terkait misi 5 RJPMD Jawa Timur hendaknya ditingkatkan kapasitas aparatur nya dan ditambah anggarannya secara proposional.

#### DAFTAR PUSTAKA

Brinkerhoff, R.O., Brethower, D.M., Hluchyj, T., et al. 1983.

*Program Evaluation : A Practitioner's Guide for Trainers and Educators.* Kluwer Nijhoft Publishing. Boston

Mahmudi, 2010, *Manajemen Kinerja Sektor Publik*, Unit Penerbitan dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YPKN. Yogyakarta

Moleong, Lexy J. 2006. *Metodologi Penelitian Kuantitatif* Moleong. Remaja Rosdakarya. Bandung

Pasolong, Harbani. 2010. *Teori Administrasi Publik*, Alfabeta, Bandung.

Prawirosentoso, S, 1999, *Kebijakan Kinerja Karyawan*, BPF, Yogyakarta

Sofyani, Hafiez dkk. 2012. *Islamic Social Reporting Index Sebagai Model Pengukuran Kinerja Sosial Perbankan Syariah (Studi Komparasi Indonesia Dan Malaysia)*, Jurnal Dinamika Akuntansi Vol. 4, No. 1, Maret 2012, pp. 36-46

Wahab, Abdul Jamil ed, 2015. *Indeks Kesalehan Sosial Masyarakat Indonesia*, Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, Jakarta.

Yuwono, Teguh (ed.). 2001. *Manajemen Otonomi Daerah: Membangun Daerah Berdasar Paradigma Baru.:* CLOGAPPS Diponegoro University, Semarang.

**UPAYA PROGRAM SOLO WASIS  
DALAM MEWUJUDKAN SOLO KOTA LAYAK ANAK  
DI KELURAHAN JEBRES SURAKARTA**

Alma Azqiyah

Program Studi PPKn Universitas Sebelas Maret Surakarta

Email: [almaazqiyah@student.uns.ac.id](mailto:almaazqiyah@student.uns.ac.id)

**ABSTRAK**

Anak sebagai aset bangsa harus dijaga dan dilindungi hak-haknya. Sebagai individu, anak memiliki hak untuk mendapatkan kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui proses keberlangsungan program Solo Wasis, sebagai salah satu program yang ditawarkan dalam penyelenggaraan Solo Kota Layak Anak bidang pendidikan yang dilaksanakan di Kelurahan Jebres Surakarta. Jenis penelitian ini merupakan deskriptif kualitatif dengan menggunakan *purposive sampling*. Penelitian ini bertempat di RW 12 Kelurahan Jebres Surakarta. Hasil dari penelitian ini adalah: (1) Predikat Solo Kota Layak ini sudah diperoleh sejak tahun 2017 lalu oleh Presiden Joko Widodo dan saat ini sudah ditetapkan melalui Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksana Pengembangan Kelurahan Layak Anak Kota Surakarta, (2) Pelaksanaan program Solo Wasis (*Wancine Siswa Sinau*) di RW 12 ini sudah berjalan cukup baik untuk mewujudkan Solo Kota Layak Anak melalui pemberlakuan GWJB (Gerakan Wajib Jam Belajar).

**Kata Kunci:** Hak Anak, Kota Layak Anak, Surakarta

**PENDAHULUAN**

Hak-hak anak Indonesia dijamin konstitusi dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Hal ini selaras dengan prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-hak Anak (KHA) yang meliputi, asas non diskriminasi, asas kepentingan yang terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, dan asas penghargaan terhadap pendapat anak. Perlindungan anak yang dimaksud dalam UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Perlindungan

Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Anak sebagai tunas, potensi, dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan bangsa memiliki peran strategis, ciri, dan sifat khusus sehingga wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Sesuai dengan yang dikatakan oleh Subiyakto (2012) yang mengatakan bahwa anak merupakan generasi penerus bangsa sekaligus modal pembangunan yang diyakini mampu

membuat perubahan seara lebih kreatif. Kelangsungan hidup anak adalah hak asasi yang harus dipenuhi, karena keterbatasan kemampuan anak, maka anak butuh perawatan, pengasuhan dan pendidikan (Sari dan Maghfiroh, 2015).

Sayangnya di beberapa negara berkembang seperti Indonesia, perlindungan dan pemenuhan hak anak masih menjadi tugas rumah yang belum terselesaikan sepenuhnya. Hal ini dibuktikan dengan laporan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) yang menerima sekitar 1.900 laporan kekerasan anak (per Maret 2018). Hasil pengawasan kasus pelanggaran anak di bidang Pendidikan yang dilakukan oleh KPAI sejak Januari hingga April 2019 bahwa dari 37 kasus yang dilaporkan menunjukkan masih tingginya angka kekerasan pada anak yang didominasi kasus perundungan. Masih kurangnya pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam dunia pendidikan ini patut disayangkan, mengingat pendidikan memegang peranan yang penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Selain masih tingginya angka kekerasan pada anak di dunia pendidikan masih banyak permasalahan lainnya yaitu: rendahnya kualitas sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, rendahnya prestasi siswa, rendahnya relevansi pendidikan dengan kebutuhan, rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan dan masih mahal biaya pendidikan (Putri, 2018. CNN Indonesia Edukasi). Pada tahun 2018 lalu, Indeks Pembangunan Manusia atau *Human Development Index*

mencapai 71,39 dimana anak-anak yang berusia 7 tahun memiliki harapan untuk dapat menikmati pendidikan selama 12,91 tahun ([www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)).

Penyelenggaraan pendidikan di Indonesia menjadi urusan pemerintah daerah hal ini sesuai dengan pelaksanaan sistem Otonomi Daerah yang dianut Indonesia. Pasal 12 ayat 1 UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan pemerintahan wajib terkait dengan pelayanan dasar yakni pelayanan publik untuk memenuhi kebutuhan dasar warga negara. Oleh karena itu, diperlukan sebuah konsep agar permasalahan pemenuhan hak anak dapat terpenuhi dengan mudah. Inovasi pelayanan publik dalam bidang pendidikan pada pemerintahan daerah sangat diperlukan untuk memenuhi hak-hak anak khususnya dalam bidang pendidikan. Program Kota Layak Anak hadir sebagai usaha dan solusi untuk mewujudkan peningkatan pelayanan publik pendidikan, mengingat bahwa bidang pendidikan merupakan urusan yang menjadi urusan pemerintahan daerah. Melalui Peraturan Menteri Negara PPPA Nomor 13 Tahun 2011, diperkenalkan lah program KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) yakni suatu kabupaten/kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak. Hal ini dilatarbelakangi oleh seringnya arah

pembangunan daerah yang terpusat pada bidang ekonomi, politik dan infrastruktur tanpa mempertimbangkan unsur kepentingan terbaik anak dalam pengambilan keputusan. Penyelenggaraan Kota Layak Anak Surakarta sendiri diatur dalam Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kota Layak Anak. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui proses keberlangsungan program Solo Wasis, sebagai salah satu program yang ditawarkan dalam penyelenggaraan Solo Kota Layak Anak bidang pendidikan yang dilaksanakan di Kelurahan Jebres Surakarta.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian deksriptif kualitatif untuk menggambarkan sejauh mana program Solo Wasis dalam mendukung keberjalanan Solo Kota Layak Anak. Tempat penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah RW 12 Kelurahan Jebres, Surakarta. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah observasi lapangan, wawancara dan studi literatur. Sampel yang digunakan

adalah *purposive sampling* karena pihak-pihak yang dilibatkan adalah informan yang memiliki peran secara langsung yakni Ketua RW 12 dan masyarakat RW 12 khususnya para pelajar yang secara langsung dilibatkan dalam program Solo Wasis. Teknik analisis data yang digunakan adalah model Miles and Huberman (Sugiyono, 2018) dengan tahapan sebagai berikut: reduksi data, penyajian data dan verifikasi.

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **Solo Kota Layak Anak**

Berdasarkan data dari Ombusman pada tahun 2017, Instansi Pemerintahan Daerah menempati urutan pertama sebagai instansi yang mendapatkan laporan paling banyak, yaitu sejumlah 3.445 laporan, disusul pada urutan kedua yakni Instansi Kepolisian yang mendapat 1.042 laporan. Pada urutan ketiga adalah Instansi Pemerintahan/Kementerian yang mendapat 787 laporan, urutan keempat adalah Instansi Badan Pertahanan Nasional yang mendapat 560 laporan dan posisi lima terakhir adalah Instansi BUMN/BUMD yang mendapat 544 laporan.

Tabel 1. Laporan Masyarakat berdasarkan Instansi Terlapor

No	Nama Instansi	Jumlah	Persentase
1	Pemerintahan Daerah	3.445	41,69%
2	Kepolisian	1.042	12.61%
3	Instansi Pemerintahan/Kementerian	787	9.52%
4	Badan Pertahanan Nasional	560	6.78%
5	BUMN/BUMD	544	6.58%

Sumber: Laporan Tahunan Ombusman 2017

Hal ini menunjukkan masih adanya ketidakmampuan pelaksanaan pemerintahan daerah dalam memenuhi pelayanan publik

masyarakat. Oleh karena itu, inovasi Program KLA (Kabupaten/Kota Layak Anak) ini dapat mempermudah dan menjamin hak-

hak anak di Indonesia. Substansi dalam pelayanan publik yang masih menjadi masalah adalah di bidang Pertanahan dengan besaran presentase 13,43%, pelayanan publik bidang Pendidikan menempati urutan kedua dengan 13,07%, pelayanan

publik bidang Kepolisian menempati urutan ketiga dengan 12,22%, urutan keempat adalah pelayanan publik bidang Kepegawaian dengan 11,51% dan urutan kelima adalah pelayanan publik bidang Administrasi Kependudukan.

Tabel 2. Substansi Laporan Masyarakat terkait Pelayanan Publik

No	Substansi Laporan	Presentase
1	Pertanahan	13,43%
2	Pendidikan	13,07%
3	Kepolisian	12,22%
4	Kepegawaian	11,51%
5	Administrasi Kependudukan	5,36%

Sumber: Laporan Tahunan Ombusman 2017

Pemenuhan Hak Asasi Manusia merupakan tugas yang seharusnya dilakukan oleh Pemerintah. Hal ini dikarenakan Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat sejak lahir pada diri seseorang yang tidak bisa dicabut atau dihilangkan karena merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Kemerdekaan yang direbut dari penjajahan oleh Bangsa Indonesia dimaksudkan untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan bangsa (AS, 2017). Keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan yang dimaksud disini ditunjukkan untuk seluruh bangsa Indonesia, tak terkecuali untuk anak. Kesejahteraan anak dapat diartikan sebagai suatu tata kehidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial (Sudrajat, 2011).

Pada tahun 2017, Kota Surakarta mendapat penghargaan dari Presiden Joko Widodo sebagai Kota Layak Anak Kategori Utama. Hal ini menunjukkan komitmen yang dibangun oleh Pemerintah Kota dalam menjamin hak-hak anak di Surakarta. Dalam Peraturan Walikota

Surakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kota Layak Anak Pasal 13 mengatur tentang komponen pemenuhan hak anak sebagai indikator KLA, diantaranya: (1) hak sipil dan kebebasan, (2) lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, (3) kesehatan dasar dan kesejahteraan, (4) pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan seni budaya, (5) perlindungan khusus.

Menurut Sari (2017), pada dasarnya ada dua faktor utama dalam menjadikan Solo Kota Layak Anak, yakni kelembagaan dan partisipasi. Kelembagaan ini tercermin dalam adanya peraturan, sumber daya manusia yang memadai dan struktur birokrasi yang baik. Beberapa aturan formal yang dibuat untuk menjamin terlaksananya program Solo Kota Layak Anak, beberapa diantaranya adalah Peraturan Daerah No.10 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendaftaran dan Akta Catatan Sipil Kota Surakarta, Peraturan Daerah No.4 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Kota Surakarta, Peraturan Walikota No.6 Tahun 2008 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Pengelolaan Taman Cerdas Kota Surakarta, Peraturan Walikota No.13 Tahun 2010 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan Kawasan Terbatas Merokok Kota Surakarta, Surat Keputusan Walikota Surakarta No.130.05/68F/1/2011 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan KLA dan Surat Edaran Sekretaris Daerah Kota Surakarta No.440/4.416 tentang Pelaksanaan Rencana Aksi Kota Layak Anak dan Puskesmas Ramah Anak.

Jika dilihat dari tingkat partisipasinya, dalam mewujudkan Solo Kota Layak Anak semua dilibatkan tidak hanya dari OPD (Organisasi Perangkat Daerah) saja tetapi juga dari Akademisi, DPRD, LSM dan Dunia Usaha. Keterlibatan semua pihak disesuaikan dengan tupoksi masing-masing. Bentuk keterlibatan OPD dalam KLA terutama pelayanan dasar anak berupa program-program pro anak.

#### **Pelaksanaan program Solo Wasis**

Melalui Visi Walikota Surakarta yakni Solo Berseri Tanpa Korupsi untuk Mewujudkan Masyarakat 3 WMP (Waras, Wasis, Wareg, Mapan, Papan), Pemerintah Kota Surakarta membuat program Solo Wasis (*Wancine Siswa Sinau*), yakni suatu gerakan jam wajib belajar yang menghimbau anak-anak untuk belajar dari pukul 18.30 WIB-20.30 WIB. Untuk mewujudkan keberhasilan pelaksanaan GWJB (Gerakan Wajib Jam Belajar), dibentuklah Satgas GWJB tingkat RW dengan diberi tanda Sirene sebagai peringatan belajar pada jam belajar. Wasis yang dimaksudkan disini adalah untuk mewujudkan masyarakat yang cerdas, terampil, berbudi pekerti luhur, berkarakter

dan berkontribusi kemajuan daya saing kota. Program Solo Wasis ini merupakan upaya yang dilakukan pemerintah terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak yang diantaranya meliputi: pembuatan program, pembuatan aturan hukum yang melindungi hak anak dan adanya sanksi yang tegas terhadap proses pelanggaran hak anak (Fitri, Riana, Fedryansyah, 2015).

Program Solo Wasis (*Waine Siswa Sinau*) yang di implementasikan melalui pemberlakuan GWJB (Gerakan Wajib Jam Belajar) sudah diterapkan di beberapa satuan kelurahan di Surakarta. Salah satu kelurahan yang melaksanakan program ini adalah Kelurahan Jebres. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diperoleh informasi bahwa pelaksanaan Solo Wasis atau GWJB (Gerakan Wajib Jam Belajar) di RW 12 sudah dimulai sejak akhir tahun 2018 lalu. Gerakan Wajib Jam Belajar yang saat ini sedang diberlakukan di RW 12 ini merupakan wilayah percontohan di Kelurahan Jebres karena merupakan pioner dari (Wulansari: 2011). Meskipun sebenarnya, GWJB ini sebelumnya pernah diterapkan sekitar 10 tahun yang lalu, tetapi kemudian tidak berjalan dengan baik sehingga pada tahun ini kembali diterapkan.

*“Di Kelurahan Jebres ini baru ada satu di RW 12. Dulu sebenarnya pernah dilaksanakan program yang wajib belajar tapi itu sepuluh tahun yang lalu pakainya sirine bukan yang kaya sekarang ini ... Kalo pake sirine yang biasa kan bosan Mba, jadi dipasangin pake musik jawa namanya apa ya itu.. gendhing jawa biar ngga bosan yang denger. Iya, gendhing nya nanti otomatis bunyi*

*pas jam setengah tujuh sama setengah sembilan, kalo besoknya minggu ya otomatis mati sendiri gitu ngga mati jadi saya atau siapa gitu ngga usah nyalain sendiri”*

Pelaksanaan GWJB yang diberlakukan di RW 12 ini merupakan wujud dari dukungan Pemerintah Kota Surakarta terhadap pemenuhan hak-hak anak di bidang pendidikan. Program ini dilaksanakan pada pukul 18.30 WIB sampai dengan 20.30 WIB. Sebagai salah satu pihak yang terlibat dalam mewujudkan Solo Kota Layak Anak, Kelurahan Jebres memiliki peranan yang penting dalam mensosialisasikan dan memfasilitasi pelaksanaan program ini. Sebagai Kelurahan Layak Anak, harus mampu menjamin hak setiap anak sebagai warga masyarakat. Salah satu dukungan yang diberikan berupa pemberian sirine Gerakan Jam Wajib Belajar yang diberika kepada lima perwakilan RW dari lima Kelurahan yang ada di Surakarta. Gendhing Jawa yang dibunyikan berisi himbauan untuk memulai belajar dan mengakhiri jam belajar siswa sekolah.

Peran Pemerintah Surakarta ditunjukkan melalui diterbitkannya aturan-aturan yang menjamin pelaksanaan KLA. Hal ini sesuai dengan faktor yang mempengaruhi pembentukan suatu daerah menjadi KLA (Roza dan Arliman, 2018), 1) Peraturan perundangan dan kebijakan pemenuhan akan hak anak; 2) Anggaran untuk adanya pemenuhan hak anak; 3) Jumlah peraturan perundang-undangan, kebijakan, program dan kegiatan yang mendapatkan masukan dari forum anak dan kelompok anak lainnya; 4) Tersedia sumber daya manusia terlatih KHA dan mampu

menerapkan hak anak ke dalam kebijakan, program dan kegiatan; 5) Tersedia data anak terpilah menurut jenis kelamin, umur, dan kecamatan; 6) Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak; dan 7) Keterlibatan dari dunia usaha dalam pemenuhan hak anak.

### **Sasaran program**

*“Kalo ditanya tujuannya buat siapa ya buat semua siswa SD sampe SMA. Tapi lebih khusus buat yang masih SD, yang masih kecil. Kalo udah gede ya harusnya udah bisa belajar sendiri lah lebih dari jam setengah sembilan itu”*

Sasaran dari diberlakukannya GWJB ini adalah pelajar yang berada dibangku SD, SMP dan SMA. GWJB ini diharapkan mampu menjadi motivasi siswa untuk belajar lebih giat lagi. Seperti yang diketahui bahwa, motivasi belajar seseorang dipengaruhi oleh berbagai faktor diantaranya faktor internal dan faktor eksternal (Uno, 2009). Salah satu faktor eksternal yang dimaksudkan disini adalah adanya program GWJB, dimana program ini menganjurkan siswa sekolah untuk belajar pada jam-jam tertentu. Pembiasaan ini diharapkan mampu membantu siswa dalam mengatur waktu belajar nya agar lebih efektif dan efisien.

Dalam penelitian yang dilakukan Ukpong (2013) menunjukkan bahwa ada hubungan antara perbedaan lamanya perilaku belajar terhadap prestasi akademik. Rekomendasi yang ditawarkan penulis pada penelitian ini adalah bahwa siswa harus menetapkan tabel waktu belajar yang cukup lama untuk latihan akademik yang efektif untuk studi pribadi mereka dan berpegang teguh pada itu. Dari hasil penelitian ini dapat kita simpulkan bersama

bahwa lamanya waktu belajar secara mandiri dan terintegrasi mampu meningkatkan hasil prestasi peserta didik. Sebagai program yang mewajibkan waktu belajar diluar pendidikan formal dalam kelas, program Solo Wasis melalui GWJB juga diharapkan mampu membantu peningkatan hasil belajar siswa. Pelaksanaan jam wajib belajar apabila dilakukan dengan efektif, efisien dan terencana tentunya dapat meningkatkan hasil belajar siswa. Orang tua juga mampu melakukan pengawasan dan bimbingan secara khusus selama proses pembelajaran. Hal ini juga diharapkan agar orang tua mampu mengetahui perkembangan anaknya.

Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sucipto, dkk (2017) tentang dampak penggunaan sistem manajemen pembelajaran untuk kinerja siswa dengan judul *The Influence of Learning Management Technology to Student's Learning Outcome* menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja siswa dengan menggunakan model kelas terbalik maksudnya membalikkan waktu siswa untuk belajar di kelas dan waktu yang dihabiskan untuk pekerjaan rumah. Hal ini menunjukkan bahwa proses belajar mandiri yang dilakukan dirumah apabila dilakukan secara efektif dan efisien dapat membantu siswa dalam peningkatan hasil belajar.

Beberapa catatan penting dalam pelaksanaan GWJB ini, diantaranya adalah: anjuran untuk tidak menyalakan TV, anjuran untuk tidak menyuruh anak (pelajar) keluar rumah, serta anjuran agar orang tua mampu mengawasi dan ikut mendampingi belajar. Peran orang tua dalam melakukan pendampingan proses belajar merupakan suatu

tindakan sosial. Tindakan sosial ini berupa pemberian motivasi belajar pada anak dan dalam tindakannya ini orang tua memiliki tujuan tertentu yang ingin dicapai. Hal ini sesuai dengan pengetahuan tindakan sosial menurut Talcott Parsons (Johnson, 1986) yaitu: (1) Tindakan itu memiliki tujuan, (2) tindakan terjadi dalam suatu situasi, dimana elemennya sudah pasti, sedangkan elemen-elemen lainnya digunakan oleh yang bertindak sebagai alat menuju tujuan itu, (3) secara normatif tindakan itu diatur sehubungan dengan penemuan alat-alat dan tujuan.

### **Hambatan pelaksanaan program**

Terdapat 3 RT (Rukun Tetangga) dalam RW 12 ini yang saling berkoordinasi dalam melaksanakan GWJB. Pengawasan juga dilakukan melalui pembentukan SATGAS agar para siswa benar-benar melakukan pembelajaran di rumah.

*"Totalnya ada tiga RT, RT 1, RT 2 sama RT 3. Bareng-bareng sama Ketua RT nya biar program ini berjalan. Kalau pengawasan sebenarnya udah ada Mba, kaya satgas gitu tapi belum maksimal lah kerjanya. Saya sih sekarang punya ide, kalo nanti alarm nya wajib belajar keliling pakai sepeda kaya yang jualan roti itu. Ini musiknya lagi dibuat sama orang yang pinter bahasa, tinggal nyiapin sepeda nya mudah-mudahan bisa jalan. Pengek juga sama pak RT yang lain buat kayak belajar pake wa gitu kalo ada anak-anak yang punya PR, nanti relawan nya bisa dari mahasiswa yang kost daerah sini yang ambil pendidikan kalo engga ya guru-gruru yang ada di daerah sini aja"*

Kedepannya, akan ada inovasi seperti sirine tanda belajar

yang akan keliling menggunakan sepeda, serta dibuka nya program tutor privat online untuk memfasilitasi proses belajar di rumah. Beberapa kendala juga ditemukan, diantaranya seperti: kurangnya kesadaran orangtua terhadap program ini dan fungsi SATGAS yang belum maksimal dalam mengawasi keberlangsungan program GWJB tersebut.

*“Ya kadang masih ada beberapa orangtua yang belum paham buat nemenin anaknya untuk belajar. Kadang juga masih suka nyetel tv pas anaknya belajar dan dibiarkan. Jadi sementara kadang saya sama pak RT nya masih suka turun sendiri untuk menghimbau dan mengajak orang-orang supaya mengikuti jam nya. Kelihatan kan tapi sekarang kalo malem ngga ada lagi anak kecil yang keluar main-main gitu.”*

Meski keberadaan Satgas untuk mengawasi GWJB ini masih belum maksimal tetapi kesadaran masyarakat sudah mulai ditumbuhkan melalui pembiasaan ini. Hal ini dikarenakan adanya manfaat yang besar dari program ini. Beberapa manfaat yang diperoleh yakni: meningkatkan kedisiplinan dalam belajar, meningkatkan prestasi di sekolah, menumbuhkan kesadaran untuk belajar secara mandiri, meningkatkan suasana yang kondusif untuk belajar, serta mewujudkan budaya belajar dalam rangka memenuhi hak-hak anak dalam bidang pendidikan.

### **KESIMPULAN**

Program Solo Wasis (*Wacine Siswa Sinau*) merupakan program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Solo dalam rangka mewujudkan Solo Kota Layak Anak. Program Solo Wasis ini diimplementasikan melalui

GWJB (Gerakan Wajib Jam Belajar) dimana pelaksanaannya berupa penambahan jam wajib belajar yang dilakukan di rumah dengan bimbingan orang tua. Sasaran dari program ini adalah para pelajar yang berada di SD, SMP dan SMA atau sederajat. Pemberlakuan GWJB ini dilaksanakan di beberapa wilayah Kelurahan di Surakarta. Di Kelurahan Jebres sendiri, sudah mulai diberlakukan di RW 12 pada akhir tahun 2018 lalu. Pelaksanaan GWJB ini dimulai pada pukul 18.30 WIB sampai pukul 20.30 WIB. Beberapa hal yang menjadi anjuran selama diberlakukannya program ini adalah: tidak menyalakan tv saat GWJB berlangsung, adanya bimbingan dan pengawasan yang dilakukan oleh orangtua dan tidak bermain di dalam maupun di luar rumah saat GWJB berlangsung.

Solo Kota Layak Anak ini diatur dalam Peraturan Walikota Nomor Surakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kota Layak Anak dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksana Pengembangan Kelurahan Layak Anak Kota Surakarta. Sebagai salah satu upaya untuk memenuhi hak-hak anak terutama dalam bidang pendidikan, Pemerintah Kota Surakarta memberikan fasilitasi melalui program Solo Wasis yang memberikan banyak manfaat diantaranya adalah untuk menciptakan budaya belajar dan usaha untuk menciptakan kondisi yang kondusif untuk mendukung siswa dalam proses belajar agar memperoleh hasil belajar yang maksimal.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- AS, Yenny. 2017. Upaya Mewujudkan Pemenuhan Hak Atas Identitas Anak. *Jurnal Hukum Media Bhakti*
- Fitri, Annisa N, Agus W Riana dan M. Fedryansyah. 2015. Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Upaya Peningkatan Kesejahteraan Anak. *Prosiding KS Riset & PKM Vol. 2 No.1*  
<https://www.bps.go.id> diakses pada 19 Mei 2019
- Johnson, Doyle Paul. 1986. *Teori Sosiologi Klasik dan Modern* (Penerjemah: Robert M.Z. Lawang). Jakarta: Gramedia
- Laporan Tahunan 2017 Ombusman Republik Indonesia diakses dari [www.ombusman.go.id](http://www.ombusman.go.id) pada 1 Mei 2019
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak
- Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17 tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengembangan Kelurahan Layak Anak Kota Surakarta
- Peraturan Walikota Surakarta Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengembangan Kota Layak Anak
- Putri, Tesih. <https://student.cnnindonesia.com/edukasi/20180103112420-445-266335/ada-apa-dengan-pendidikan-di-indonesia> diakses pada 19 Mei 2019
- Roza, Darmini & Laurensius Arliman S. 2018. Peran Pemerintah Daerah untuk Mewujudkan Kota Layak Anak di Indonesia. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum Faculty of Law Volume 25 Issue 1*.  
doi: 10.20885/iustum.vol25.iss1.art10
- Sari, Kanthi Pamungkas dan Maghfiroh. 2015. Perlindungan Hak Anak dalam Perspektif Pendidikan Islam Ibn Khaldun. *CAKRAWALA Vol. , No.2*
- Sari, Yunita Ratna. 2017. Kepemimpinan FX. Hadi Rudyatmo dalam Mewujudkan Solo Kota Layak Anak. *Jurnal POLITIKA Vol.8 No.1*
- Subiyakto. 2012. Membangun Kota Layak Anak: Studi Kebijakan Publik di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Sosio Religia,10*
- Sudrajat, Tedy. 2011. Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak Sebagai Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Sistem Hukum Keluarga di Indonesia. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum No. 54, Th. XIII*
- Suipto, Adi ddk. 2017. The Influence of Learning Management Technology to Student's Learning Outome. *International Journal of Pedagogy and Teacher Education (IJPTE)*
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan*

- R&D. Bandung:  
Alfabeta
- Undang-Undang Dasar Negara  
Republik Indonesia tahun  
1945
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun  
2014 tentang Perubahan  
Atas Undang-Undang  
Nomor 2 Tahun 2002  
tentang Perlindungan Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun  
2014 tentang Pemerintahan  
Daerah
- Uno, B. Hamzah. 2009. *Teori  
Motivasi dan  
Pengukurannya*. Jakarta:  
PT. Bumi Aksara
- Wulansari, Badriyah Dwi. 2011.  
*Peran Orangtua dalam  
Memberikan Motivasi  
Belajar Anak pada  
Pelaksanaan Gerakan  
Wajib Jam Belajar (Studi  
Kasus pada Gerakan Wajib  
Jam Belajar di  
Kelurahan Jebres,  
Surakarta)*. Solo: Skripsi  
FKIP UNS

**STRATEGI PENDIDIKAN KARAKTER DALAM RANGKA  
MEWUJUDKAN SMART AND GOOD CITIZEN  
(Studi pada Rumah Dongeng Kinciria)**

Arin Wahyuni, Triyanto & Widya Noventari  
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Sebelas Maret  
Email: [arin25@student.uns.ac.id](mailto:arin25@student.uns.ac.id)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan strategi pendidikan karakter yang dilakukan oleh Rumah Dongeng Kinciria. Penelitian menggunakan metode kualitatif. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Informan terdiri dari 3 orang yaitu founder komunitas, divisi kurikulum dan divisi hubungan masyarakat. Pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa strategi pendidikan karakter yang dilakukan oleh Rumah Dongeng Kinciria dilaksanakan melalui kegiatan mendongeng dan pendampingan anak-anak di daerah tertentu.

**Kata Kunci** : Pendidikan Karakter, Mendongeng, Pendampingan Anak

**ABSTRACT**

*This study aims to describe the character education strategy carried out by the Rumah Dongeng Kinciria. Research uses qualitative methods. Data collection using interviews and documentation. Informants consisted of 3 people, namely community founder, curriculum division and public relations division. Testing the data validity using source triangulation and technique triangulation. Data analysis uses the Miles and Huberman model which consists of data reduction, data presentation, and conclusions. The results showed that the character education strategy carried out by the Rumah Dongeng Kinciria was carried out through storytelling and mentoring activities in certain areas.*

**Keywords** : Character Education, Storytelling, Child Mentoring

**PENDAHULUAN**

Pendidikan karakter adalah usaha sadar dan terencana guna mewujudkan suasana dan proses pemberdayaan potensi peserta didik sesuai dengan kaidah dan nilai pembudayaan masyarakat setempat dan nasionalisme guna membangun karakter pribadi dan atau kelompok sebagai warga negara yang baik (Lickona, 2013). Pendidikan karakter memberikan nilai bahwa karakter diperlukan untuk membangun kehidupan yang bermakna serta masyarakat yang baik. Hal tersebut

selaras dengan tujuan penguatan pendidikan karakter bagian dari Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia pada tahun 2017.

Tujuan penguatan pendidikan karakter yaitu membangun peserta didik dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik untuk menghadapi masa depan, mengembangkan platform pendidikan nasional yang meletakkan pendidikan karakter sebagai roh utama dalam penyelenggaraan

pendidikan, dan merevitalisasi potensi seluruh elemen pendidikan dalam mengimplementasikan PPK (Perpres Nomor 87 tahun 2017). Secara umum pendidikan karakter dapat dilaksanakan secara formal, nonformal, maupun informal. Dengan demikian maka penyelenggaraan pendidikan karakter sangat luwes.

Namun, pelaksanaan pendidikan karakter saat ini belum optimal. Hal tersebut didukung oleh fenomena masih banyaknya kasus kerusakan moral. Salah satu faktor penyebab kerusakan moral adalah kemajuan teknologi dan globalisasi. Secara umum kemajuan teknologi dan globalisasi tersebut memberikan 2 dampak yaitu dampak positif dan dampak negatif (Ngafifi, 2014). Dampak positif berupa kemudahan interaksi hal dalam segala sendi kehidupan (Setiawan, 2018). Sedangkan dampak negatif yaitu adanya infiltrasi budaya dan nilai-nilai asing yang seringkali tidak sesuai dengan norma. Budaya dan nilai-nilai asing yang masuk antara lain gaya hidup kebarat-baratan, hedonisme, konsumtif, pergaulan bebas, narkoba, tindakan kekerasan, minum minuman keras dll (Nurhaidah, 2015).

Budaya dan nilai-nilai asing tersebut diadopsi oleh masyarakat tak terkecuali anak. Mereka bangga bahwa sesuatu yang berasal dari luar negeri lebih baik daripada yang berasal dari Indonesia (Agustin, 2011). Dampaknya adalah anak meniru budaya dan nilai-nilai asing tersebut. Tak jarang keikutseraan mengikuti trend budaya asing justru menimbulkan masalah hukum. Data KPAI tahun 2017 terdapat anak berhadapan hukum mencapai angka 9.266 kasus. Sedangkan pada semester 1 tahun 2018 terdapat 1.885

kasus anak berhadapan hukum seperti menjadi pelaku narkoba, pencurian dan tindakan asusila. Fenomena tersebut tidak mencerminkan karakter warga negara yang baik.

Berdasarkan fenomena tersebut maka diperlukan pendidikan karakter untuk menyelamatkan anak-anak dari infiltrasi budaya dan nilai-nilai asing yang tidak mencerminkan karakter warga negara yang baik. Pendidikan karakter memiliki peran penting dalam pembentukan karakter warga negara (Sujana, 2014). Pendidikan karakter yang efektif akan menciptakan anak dengan kepribadian yang baik (Bahri, 2015). Anak dengan kepribadian yang baik pasti akan menjadi warga negara yang baik karena paham akan hak dan kewajibannya. Namun jika pendidikan karakter diabaikan maka akan terjadi perilaku amoral pada anak (Lickona, 2013). Dampaknya adalah terjadi penurunan kualitas karakter yang berpengaruh terhadap kualitas sumber daya manusia misalnya kurangnya integritas, tidak bertanggung jawab, apatis dll.

Selama ini pendidikan karakter mayoritas terpaku pada mata pelajaran pendidikan agama dan pendidikan kewarganegaraan di sekolah (Harsono et al., 2017). Pendidikan karakter di keluarga dan masyarakat kurang dioptimalkan sehingga keberadaan pendidikan karakter saat ini belum memberikan hasil yang menggembirakan. Oleh karena itu diperlukan sinergi antar jalur pendidikan agar pendidikan karakter dapat memberikan kontribusi optimal sehingga kualitas karakter warga negara akan baik dan mendukung perbaikan kualitas sumber daya manusia.

Pendidikan karakter menjadi tanggung jawab semua pihak baik itu

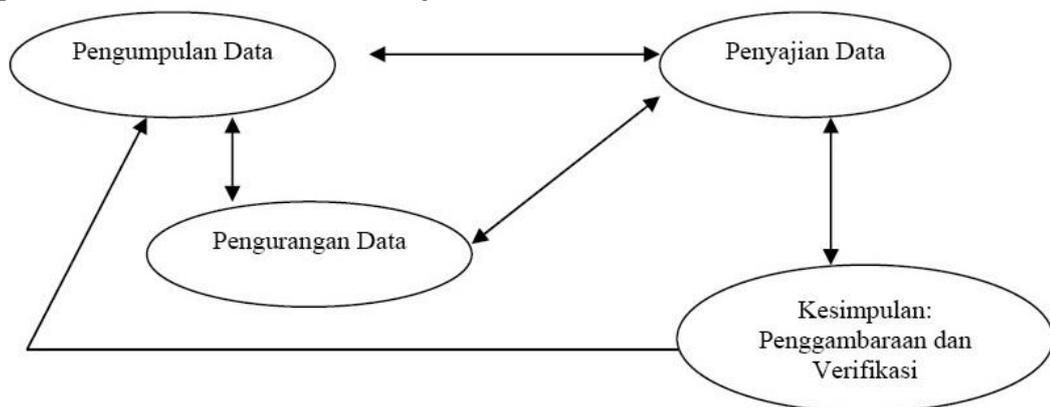
keluarga, negara, maupun masyarakat (Lickona, 2016). Pendidikan karakter yang diselenggarakan oleh keluarga dilakukan melalui pembinaan tentang kasih. Keluarga meletakkan landasan moral atas dibangunnya institusi lainnya (Lickona, 2016). Pendidikan karakter yang diselenggarakan oleh negara dilakukan melalui jalur pendidikan formal seperti sekolah. Sedangkan pendidikan karakter yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat dilakukan melalui komunitas masyarakat atau penyelenggaraan program masyarakat yang relevan.

Salah satu bentuk tanggung jawab terhadap pendidikan karakter yang dilakukan oleh masyarakat tercermin oleh kegiatan yang dilakukan oleh Rumah Dongeng Kinciria. Rumah Dongeng Kinciria merupakan komunitas yang komitmen bergerak dalam bidang pendidikan melalui jalur informal. Visi utamanya adalah berfokus pada pendidikan akhlak dan karakter anak. Rumah Dongeng Kinciria memiliki cara unik dalam pelaksanaan pendidikan karakter melalui jalur

informal. Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti tertarik meneliti tentang strategi pendidikan karakter yang dilakukan oleh Rumah Dongeng Kinciria melalui jalur pendidikan informal. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan strategi pendidikan karakter melalui jalur pendidikan informal yang dilakukan Rumah Dongeng Kinciria.

### METODE PENELITIAN

Tempat penelitian ini di Surakarta, Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik purposive sampling. Informan terdiri dari 3 orang yaitu founder komunitas (DW), divisi kurikulum (TR) dan divisi hubungan masyarakat (RA). Pengumpulan data menggunakan wawancara dan dokumentasi. Pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.



Gambar 1. Bagan Analisis data Miles and Huberman

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pendidikan karekter adalah elemen penting dalam membentuk warga negara yang baik dan cerdas. Pendidikan karakter memiliki

hubungan dengan pendidikan kewarganegaraan (Branson, dalam Winarno, 2014). Dimensi Pendidikan Kewarganegaraan yang erat dengan pendidikan karakter yaitu sikap kewarganegaraan (*civic*

*disposition*) yang merujuk pada karakter publik dan karakter privat (Winarno, 2014). Pelaksanaan pendidikan karakter melibatkan keluarga, sekolah, pemerintah dan masyarakat dengan penggunaan strategi yang berbeda-beda (Lickona, 2016). Pendidikan karakter melalui jalur formal dapat diintegrasikan dengan pendidikan kewarganegaraan.

Selain sekolah, masyarakat yang termasuk dalam jalur pendidikan informal turut terlibat dalam pelaksanaan pendidikan karakter. Hal ini selaras dengan instruksi Perpres No 87 tahun 2017 bahwa pendidikan karakter jalur informal dilakukan dengan penguatan nilai karakter di keluarga dan lingkungan dalam bentuk kegiatan belajar secara mandiri. Rumah Dongeng Kinciria merupakan masyarakat yang terlibat dalam pemberian pembelajaran khususnya penanaman nilai-nilai karakter bagi anak-anak secara sukarela di lingkungan tempat dimana anak-anak bermain.

Rumah Dongeng Kinciria merupakan komunitas sosial yang dipelopori oleh pemuda yang bertujuan merotasi kebaikan dengan fokus pada penanaman nilai karakter kepada anak-anak. "Jadi pertama kita ingin menebarkan kebaikan. Kita buat Rumah Dongeng Kinciria itu ada analoginya ya mbak. Rumah Dongeng Kinciria kita kasih analogi kinciria dia selalu ceria dia merotasi kebaikan". (DW, founder Rumah Dongeng Kinciria).

Rumah Dongeng Kinciria memiliki tim untuk mengkoordinasikan strategi pendidikan karakter yang akan dilaksanakan. Tim yang dibentuk yaitu kapten pasukan (ketua komunitas), perencana tak tik

(kurikulum), skuadron (human resource development), narainfo (humas), dan media. Kapten pasukan memiliki tugas untuk mengkoordinasikan seluruh rangkaian kegiatan. Perencana tak tik memiliki tugas merancang kegiatan. Skuadron memiliki tugas dalam memberikan penguatan dalam tim. Narainfo bertugas memperluas jejaring dengan pihak ketiga untuk memperluas cakupan kegiatan. "Kemarin banyak bekerja sama dengan pihak lain seperti Semarak Inspirasi, Lazis UNS, terus BNK Sukoharjo, BEM UNS, Hima Psikologi, banyak sih mbk..." (RA, humas Rumah Dongeng Kinciria). Sedangkan media memiliki tugas untuk mempublikasikan setiap kegiatan yang telah dilakukan oleh Rumah Dongeng Kinciria.

Rumah Dongeng Kinciria sebagai komunitas sosial yang melaksanakan pendidikan karakter di jalur pendidikan informal memiliki 2 fungsi pokok yaitu melakukan kegiatan mendongeng dan pendampingan anak di daerah tertentu. 2 fungsi pokok tersebut berkaitan erat dengan strategi pendidikan karakter yang digunakan. "...kita rumah dongeng jadi kita kerucutkan tupoksi utama kita ada 2 yaitu pertama fungsi berdongeng, memberikan edukasi kepada anak melalui dongeng. Fungsi kedua memberikan pendampingan berkala ke adek adek di suatu daerah". (DW, founder Rumah Dongeng Kinciria)

Dua fungsi utama tersebut mencerminkan strategi pendidikan karakter yang dilakukan Rumah Dongeng Kinciria melalui kegiatan mendongeng dan pendampingan anak. Strategi merupakan prosedur yang digunakan guru dalam proses pembelajaran sebagai sarana untuk

mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan (Winarno, 2014). Strategi pendidikan karakter tertuang dalam 4 model yaitu model otonomi, integrasi, suplemen dan kolaborasi (Muchtaron, 2017). Model otonomi menjadikan pendidikan karakter sebagai mata pelajaran tersendiri. Model integrasi menjadikan pendidikan karakter terpadu dengan mata pelajaran yang lain. Model suplemen yaitu pendidikan karakter melalui kegiatan tambahan yang bersifat ekstrakurikuler. Model kolaborasi yaitu gabungan model otonomi, integrasi dan suplemen ke dalam seluruh kegiatan sekolah.

Strategi pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh Rumah Dongeng Kinciria berbeda jika dibandingkan dengan model pembelajaran yang digunakan pada jalur pendidikan formal seperti di sekolah yang merujuk pada model pendidikan nilai seperti model konsiderasi, model pembentukan rasional, klarifikasi nilai, pengembangan moral kognitif, dan model nondirektif (Nana Sukmadinata dalam (Winarno, 2014). Strategi pendidikan karakter yang dilakukan oleh Rumah Dongeng Kinciria hampir sama dengan salah satu strategi pendidikan karakter di Turki. Penelitian yang dilakukan Fethi Turan dan Ilkay Ulutas di Turki pada tahun 2016 menyatakan bahwa strategi pendidikan karakter dilakukan menggunakan buku cerita (Turan, et al., 2016). Hal ini hampir sama dengan mendongeng, perbedaannya terletak pada penggunaan buku cerita, pada penelitian di Turki tersebut buku cerita dibaca secara mandiri oleh anak sedangkan pada Rumah Dongeng Kinciria buku cerita menjadi bahan narasi yang disampaikan melalui

media yang berbeda seperti boneka dan gitar.

Mendongeng dipilih karena merupakan salah satu bentuk metode katarsis yang cocok untuk anak-anak. Katarsis adalah cara pelepasan emosi dengan cara yang relatif aman melalui penampilan perilaku agresi, mengamati perilaku agresi atau berfantasi mengenai agresi (Istiningtyas et al., 2014). Mendongeng merupakan salah satu katarsis dengan cara berfantasi mengenai agresi. Mendongeng merupakan pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa dalam hal ini adalah anak-anak (Stanley et al., 2015). Anak-anak tidak dapat menolak dongeng karena secara psikologis anak-anak berada pada masa bermain dimana dongeng membawa ketertarikan tersendiri dengan adanya media-media atraktif seperti boneka dan gitar yang dipetik. Mendongeng merupakan seni interaktif yang menggunakan kata-kata dan aksi untuk mengungkapkan elemen dan gambaran dari sebuah cerita dan mendorong anak-anak untuk berimajinasi (Stanley et al., 2015).

Kegiatan mendongeng ini dilaksanakan dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan yang bermuatan karakter dengan mengambil sasaran anak-anak Indonesia secara umum, khususnya Solo Raya. Namun tidak menutup kemungkinan juga komunitas ini mendongeng pada wilayah lain se-Indonesia. “..... berdongeng di seluruh Indonesia pun nggak masalah pun kemarin saya di Malaysia juga mencoba berdongeng anak-anak Malaysia”. (DW, founder Rumah Dongeng Kinciria). Pemilihan metode mendongeng untuk menanamkan nilai-nilai karakter ini tepat selaras dengan pernyataan

Koreen Geres bahwa mendongeng berkontribusi terhadap kesejahteraan emosional anak karena setiap narasi yang baik memiliki nilai karakter (Geres, 2016).

Kegiatan mendongeng ini tidak hanya diinisiasi oleh komunitas tetapi juga sudah sampai pada tahap ada pihak ketiga yang meminta kepada komunitas untuk memberikan dongeng kepada keluarga pihak ketiga sehingga nilai-nilai karakter yang ingin ditanamkan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, kegiatan kedua dalam menanamkan nilai-nilai kebaikan yang bermuatan karakter dilakukan dengan pendampingan kepada anak-anak di Pucangsawit, Jebres, Surakarta. Pendampingan anak-anak di

Pucangsawit ini dilakukan atas dasar keprihatinan dengan fenomena degradasi moral yang terjadi di sekitar Surakarta dimana wilayah ini dekat dengan wahana pendidikan tinggi namun anak-anaknya belum mempunyai lingkungan bermain yang baik.

Pelaksanaan peran sebagai agen pendidikan karakter, Rumah Dongeng Kinciria memiliki seperangkat strategi untuk mengimplementasikan pendidikan karakter. Strategi pendidikan karakter yang digunakan oleh Rumah Dongeng Kinciria tersusun ke dalam 2 tugas utama yang tersebar kedalam perencanaan, pelaksanaan serta evaluasi ditunjukkan kedalam tabel berikut.

Tabel 1. Perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan

	Perencanaan	Pelaksanaan	Evaluasi
Mendongeng	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menentukan sasaran dari kegiatan mendongeng</li> <li>- Menentukan tema dongeng</li> <li>- Menentukan nilai-nilai karakter yang akan ditanamkan</li> <li>- Latihan mendongeng</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Eksekusi mendongeng</li> <li>- Mendongeng hanya beberapa menit kemudian diselingi dengan permainan-permainan</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menanyakan kembali ke adik-adik sasaran apakah nilai yang ingin ditanamkan sudah tersampaikan apa belum</li> </ul>
Pendampingan anak-anak di Pucang Sawit	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menentukan kegiatan apa yang akan dilakukan</li> <li>- Menentukan tema kegiatan</li> <li>- Menentukan media apa yang akan digunakan</li> <li>- Menentukan nilai-nilai karakter apa yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Pelaksanaan di Pucang Sawit</li> <li>- Pelaksanaan dengan dongeng dipadu dengan metode katarsis kreatif lainnya</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menanyakan kembali nilai karakter yang disampaikan untuk mengetahui apakah sudah tersampaikan dengan baik atau belum</li> <li>- Melakukan observasi selama keberlangsungan program yang</li> </ul>

	hendak ditanamkan - Menentukan indikator keberhasilan dari program		kemudian hasilnya didiskusikan untuk menentukan hasil evaluasi yang komperhensif.
--	---	--	---

Kegiatan mendongeng dan pendampingan anak di Pucangsawit dilakukan dengan tahapan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. Perencanaan merupakan aplikasi dari pemikiran yang tersusun untuk mencapai keinginan bersama (Sahnan, 2017). Tahap perencanaan mendongeng dilakukan dengan merancang kurikulum sederhana yang berisikan kegiatan, tema, dan nilai-nilai karakter yang hendak diberikan. “ Kalau kurikulumnya sederhana aja sih mbk. Bikin kurikulum nilai gitu, aduh itu bagian kurikulum jadi saya nggak terlalu rigid. Tapi memang kita membuat kurikulum untuk adik adik. Kita ikut kurikulum tk sih paud.....”. (DW, founder Rumah Dongeng Kinciria).

Tahap perencanaan pendampingan anak di Pucangsawit dilakukan dengan membuat kurikulum sederhana yang memuat tema, kegiatan, nilai-nilai karakter yang akan ditanamkan serta indikator keberhasilan dari kegiatan yang dilaksanakan. “Trus nanti isinya kurikulum yang itu apa aja ya kegiatannya kita mau apa, media nya kita mau apa, nilai yang dikembangkan apa, terus indikator keberhasilannya apa. Masih kayak gitu sih, jadi masih simple banget karena kan kita random ya anak-anaknya.....”. (TR, divisi kurikulum). Dengan demikian maka pola perencanaan yang dilaksanakan oleh Rumah Dongeng Kinciria masih sangat sederhana.

Pelaksanaan kegiatan dongeng mengacu pada perencanaan yang di buat oleh perencana tak tik dalam bentuk kurikulum sederhana. Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan dongeng dilakukan atas inisiatif dan ide murni dari Rumah Dongeng Kinciria. Namun terdapat juga permintaan dari pihak ketiga untuk melakukan kegiatan dongeng sesuai dengan apa yang mereka inginkan dari segi tema maupun nilai-nilai karakter. “Dan kadang kalau misal kita berdongeng di daerah-daerah kita mungkin nggak survei ya kadang kita dimintai tolong dari beberapa daerah, aku butuh adek aku.....”. (DW, founder Rumah Dongeng Kinciria). Beberapa kali tim Rumah Dongeng Kinciria mendongeng atas permintaan di pantai asuhan, bimbingan belajar sampai pada mendongeng di salah satu rumah sakit di Surakarta. Ini menunjukkan bahwa sasaran dari Rumah Dongeng Kinciria memang tak terbatas pada wilayah tertentu saja. Pelaksanaan kegiatan mendongeng yang dilakukan oleh Rumah Dongeng Kinciria ini sederhana dengan berbagai properti khas dongeng seperti gitar dan boneka. Beberapa negara seperti Kroatia (Preradovic et al., 2016) dan Turki (Karakoyun, 2016) telah mengimplementasikan kegiatan dongeng berbasis digital.

Nilai-nilai karakter yang ditanamkan pada kegiatan mendongeng tidak ada terget khusus akan tetapi disesuaikan dengan

keadaan yang paling darurat di suatu daerah yang menjadi sasaran kegiatan dongeng. Kebanyakan nilai-nilai karakter yang ditanamkan adalah karakter privat. Karakter privat merupakan karakter yang berhubungan dengan keadaan internal seseorang seperti tanggung jawab, disiplin diri, penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia (Winarno, 2014). Karakter privat yang diajarkan misalnya etika tentang “maaf tolong terima kasih” dimana saat ini tidak semua orang memahami konsep nilai-nilai tersebut. Oleh karena itu nilai karakter ini penting untuk ditanamkan karena jika tidak ditanamkan sejak kecil maka anak akan merasa asing sehingga karakter anak cenderung kurang sopan. Nilai-nilai karakter yang ditanamkan juga berorientasi dalam membentuk warga negara yang baik dan cerdas. Warga negara yang baik memiliki konsep karakter yang baik yang dikategorikan sebagai kebajikan diri sendiri (*self-oriented virtuous*) dan kebajikan terhadap orang lain (*other-oriented virtuous*) (Lickona, 2003). Kebajikan utama yang perlu dalam pendidikan karakter antara lain *wisdom, justice, fortitude, self control, love, integrity, hardwork, gratitude, humility, dan positive attitude* (Lickona, 2003). Sedangkan karakter cerdas merupakan karakter pikiran yang memiliki kemampuan dalam menalar, merencanakan, memecahkan masalah, berpikir abstrak, memahami gagasan, menggunakan bahasa dan belajar (Winarno, 2012).

Pelaksanaan program pendampingan anak di Pucangsawit dibantu dengan adanya relawan yang berjumlah 5 orang. Pelaksanaan program dilakukan satu minggu sekali dengan tema yang berbeda.

Skema implementasi dari kurikulum misalnya terlihat pada salah satu tema maaf tolong dan terima kasih dengan kegiatan yang berbeda-beda pada setiap minggu seperti mendongeng, membuat karya seni, serta menonton film. Kegiatan pada program pendampingan menggunakan metode katarsis. Katarsis dapat dilakukan dengan beberapa teknik yaitu perilaku agresi, agresi verbal, agresi fantasi dan mengamati perilaku orang lain (Istiningtyas et al., 2014). Katarsis yang digunakan dalam program pendampingan anak di Pucangsawit menggunakan teknik agresi verbal dan fantasi yang diimplementasikan melalui permainan-permainan kreatif dan mendongeng. Indikator keberhasilannya ditentukan dengan melihat seberapa sering anak-anak mengucapkan kata-kata yang berhubungan dengan tema, kesesuaian kata-kata yang diucapkan dengan keadaan pada waktu itu, serta kemampuan mengungkapkan kembali nilai moral yang disampaikan. Pelaksanaan kegiatan ini menggunakan reward bintang yang ditempelkan nama mereka untuk lebih menarik perhatian anak-anak.

Evaluasi merupakan suatu usaha mengambil keputusan berdasarkan hasil pengukuran dan penilaian yang telah dilakukan (Wijianto, 2018). Evaluasi dari kegiatan mendongeng ini masih sebatas evaluasi yang sederhana mengingat memang sasaran dari kegiatan dongeng ini selalu berubah-ubah. Dengan demikian maka evaluasi dari kegiatan mendongeng ini dilakukan sampai pada taraf menanyakan kembali pesan apa yang sudah disampaikan oleh Rumah Dongeng Kinciria untuk mengetahui apakah nilai-nilai karakter yang disampaikan sudah dipahami oleh

sasaran dongeng atau belum. Hal ini selaras dengan salah satu tahap pendidikan karakter yang dikemukakan oleh Thomas Lickona yaitu tahap pengetahuan moral (*moral knowing*). Menurut Lickona tahap-tahap dalam melaksanakan pendidikan karakter terdiri dari pengetahuan moral, perasaan moral dan tindakan moral (Lickona, 2014).

Sementara itu, tahap evaluasi pada program pendampingan anak di Pucangsawit tidak rigid seperti pada pendidikan formal karena memang anak-anak yang didampingi setiap minggunya tidak memiliki komposisi yang sama. Pada pendidikan di jalur formal evaluasi pendidikan karakter termasuk dalam evaluasi aspek afektif atau sikap. Evaluasi aspek afektif pada pendidika formal menggunakan observasi, penilaian diri dan penilaian antar teman (Wijianto et al., 2018). Evaluasi program pendampingan dilakukan dengan observasi pada saat keberlangsungan program misalnya pada saat penutupan acara dilakukan review atau menanyakan kembali materi ke anak-anak untuk memastikan apakah pesan yang dibawa sampai atau belum. Selain itu evaluasi juga berasal dari hasil pengamatan yang kemudian didiskusikan bersama-sama untuk menemukan generalisasi dari hasil evaluasi. “.....Cuma di penutupan kita *recalling* materinya lagi, nanya ke anak-anak, sampe nggak sih pesan kita hari itu, haislnya dari pengamatan yang kita diskusikan bareng-bareng, jadi bukan kaya daftar centang per nama gitu”. (TR, divisi kurikulum).

Dari hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim Rumah Dongeng Kinciria, anak-anak yang berusia lebih tua mampu menjelaskan kembali nilai-nilai moral apa yang didapatkan serta memberikan

pengertian kepada anak-anak yang berumur lebih muda dari mereka sehingga upaya pemberian pengetahuan moral kepada anak lebih optimal. Dengan demikian maka pendidikan karakter yang dilakukan oleh Rumah Dongeng Kinciria masih berada dalam tahap pemberian pengetahuan moral akan tetapi langkah tersebut sudah sesuai dalam upaya membentuk warga negara yang baik dan cerdas.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa strategi pendidikan karakter yang digunakan Rumah Dongeng Kinciria dalam membentuk warga negara yang baik dilaksanakan dengan mendongeng dan pendampingan anak di Pucangsawit, Surakarta. Mendongeng dipilih karena cocok dengan tahap perkembangan anak yang berada dalam usia bermain. Sedangkan pendampingan anak di Pucangsawit dilakukan karena wilayah dinilai rentan memberikan dampak yang kurang baik terhadap perkembangan anak. Pendidikan karakter yang dilaksanakan dengan mendongeng dan pendampingan anak di Pucangsawit ini masih berada pada tahap pemberian pengetahuan moral. Dengan demikian maka perlu penguatan strategi agar pendidikan karakter yang dilaksanakan oleh Rumah Dongeng Kinciria mencapai tahap perasaan moral dan tindakan moral. Tulisan ini diharapkan berkontribusi dalam mendorong pengembangan pendidikan karakter yang lebih luas dan komprehensif sehingga anak-anak mendapatkan pendidikan secara layak dan tujuan membentuk warga negara yang baik dapat tercapai.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustin, D. S. Y. 2011. Penurunan rasa cinta budaya dan nasionalisme generasi muda akibat globalisasi. *Jurnal Sosial Humaniora*, Vol. 4 No. 2, November.
- Bahri, Saiful. 2015. Implementasi Pendidikan Karakter dalam Mengatasi Krisis Moral di Sekolah. *Ta'allum*, Vol. 03 No 01 Juni 2015.
- Geres, Koreen. 2016. Resilience Through Storytelling in the EAL Classroom. *Tesl Canada Journal/Revue Tesl Du Canada* Volume 33, Special Issue 10, 2016 pp. 62–85 <http://dx.doi.org/1018806/tesl.v33i0.1245>
- Harsono, Hastuti, S. 2017. Bagaimana Pendidikan Karakter Diselenggarakan di Sekolah. *Jurnal Pendidikan dan Ilmu Sosial* Vol. 27 No 1 Juni 2017.
- Ikhsanudin, Arif. Ada 504 Kasus Anak Jadi Pelaku Pidana, KPAI Soroti Pengawasan Orang Tua, *Detik News*, diakses dari <https://news.detik.com/berita/4128703/ada-504-kasus-anak-jadi-pelaku-pidana-kpai--pengawasan-ortusoroti>, pada 03 Maret 2019 pukul 17.00.
- Istiningtyas, W., et al. 2014. Pengaruh Teknik Katarsis Terhadap Penurunan Intensitas Perilaku Agresi Siswa Kelas IX di SMP Negeri 15 Bogor. *Jurnal Bimbingan Konseling* Vol 3 No 1.
- Karakoyun, F., Yapici, I. U. 2016. Use of Digital Storytelling in Biology Teaching. *Universal Journal of Education Research* 4(4): 895-903, 2016. DOI: 10.13189/ujer.2016.040427
- KPAI, KPAI: Enam Tahun Terakhir Anak Berhadapan Hukum Mencapai Angka 9266 kasus, KPAI, diakses dari <http://www.kpai.go.id/berita/kpai-enam-tahun-terakhir-anak-berhadapan-hukum-mencapai-angka-9-266-kasus>, pada 03 Maret 2019 pukul 16.56.
- Lickona, Thomas. 2014. Pendidikan Karakter: Panduan Lengkap Mendidik Siswa Menjadi Pintar dan Baik. Bandung Nusa Indah.
- Lickona, Thomas. 2016. Character Matters: How to Help Our Children Develop Good Judgement, Integrity, and Other Essential Virtues. Jakarta: Bumi Aksara.
- Muchtarom, M. 2017. Pendidikan Karakter Bagi Warga Negara Sebagai Upaya Mengembangkan Good Citizen. *PKn Progresif*, Vol. 12 No. 1 Juni 2017.
- Ngafifi, Muhammad. (2014). Kemajuan teknologi dan pola hidup manusia dalam perspektif sosial budaya. *Jurnal Pembangunan Pendidikan: Fondasi dan Aplikasi*, Vol. 2 No. 1.
- Nurhaidah, Musa, M. I. 2015. Dampak Pengaruh Globalisasi Bagi Kehidupan Bangsa Indonesia. *Jurnal Pesona Dasar*, Vol 3 No. 3 April 2015.
- Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017
- Preradovic, N. M., et al. 2016. Introduction of Digital Storytelling in Preschool Education: a Case Study from Croatia. *Digital Education Review-Number 30*, December 2016-<http://greav.ub.edu/der/>

- Sahnan, M. 2017. Urgensi Perencanaan Pendidikan di Sekolah Dasar. *Jurnal PPKn dan Hukum* Vol. 12 No. 2 Oktober 2017.
- Setiawan, Daryanto. (2018). Dampak perkembangan teknologi informasi dan komunikasi terhadap budaya. *SIMBOLIKA*, Vol. 4 No. 1, April.
- Sujana, I. G. 2014. Peranan Pendidikan Karakter dalam Membangun Perilaku Pembelajaran. *Jurnal Widya Acharya FKIP Universitas Dwijendra* ISSN No. 2085-0018 Oktober 2014.
- Stanley, Nile et al. 2015. Storytelling, Values and Perceived Resilience among Chinese, Vietnamese, American, and German Prospective Teachers. *Universal Journal of Educational Research* 3(8): 520-529, 2015. DOI: 10.13189/ujer.2015.030807
- Turan, F., Ulutas, I. 2016. Using Storybook as a Character Education Tools. *Journal of Education and Practice* Vol.7, No. 15, 2016.
- Winarno. 2012. Karakter Warga Negara Yang Baik dan Cerdas. *PKn Progresif*, Vol. 7 No. 1 Juni 2012.
- Winarno. 2014. Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan Isi, Strategi, dan Penilaian. Jakarta: Bumi Aksara.
- Wijianto, Winarno, Wulandari, E. 2018. Penilaian Autentik Mata Pelajaran PPKn Strategi Guru Dalam Penilaian Sikap. Surakarta: Laboratorium PPKn FKIP UNS.

**PENGARUH POSKO ADVOKASI BEM UNS  
DALAM MENINGKATKAN PARTISIPASI POLITIK  
MAHASISWA RANTAU PADA PEMILIHAN UMUM SERENTAK 2019**

Nafita Rizqiyatul Azkiya  
Program Studi PPKn Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Email: [Nafitaazkiya@gmail.com](mailto:Nafitaazkiya@gmail.com)

**ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh posko advokasi pemilih BEM UNS dalam meningkatkan partisipasi politik mahasiswa rantau pada pemilihan serentak 2019. Metode penelitian yang digunakan ialah kualitatif, teknik yang digunakan ialah wawancara. Informan terdiri dari 3 mahasiswa UNS salah satunya ialah presiden BEM UNS, wawancara di lakukan disekitar kampus kentingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program posko advokasi mahasiswa dapat meningkatkan partisipasi mahasiswa UNS pada pemilu 2019. Posko advokasi mahasiswa sebagai wadah yang disediakan BEM UNS untuk membantu mahasiswa rantau dalam menggunakan hak pilihnya di pemilu 2019, termasuk pengurusan formulir A5 bagi mahasiswa rantau yang tidak dapat memilih di daerah asal. Posko advokasi pemilih dapat mempermudah mahasiswa untuk menggunakan hak pilihnya.

**Kata kunci** : partisipasi politik, pemilihan umum, posko advokasi, mahasiswa

**ABSTRACT**

*This study aims to determine the influence of the BEM UNS voter advocacy post in increasing the political participation of overseas students in 2019 simultaneous elections. The research method used is qualitative, the technique used is interview. The informants consisted of 3 UNS students, one of whom was the president of the BEM UNS, interviews were conducted around campus interest. The results showed that the student advocacy post program could increase the participation of UNS students in the 2019 election. The student advocacy post was a forum provided by BEM UNS to help overseas students use their voting rights in the 2019 election, including the A5 form arrangement for overseas students who could not vote place of Origin. voter advocacy posts can make it easier for students to exercise their voting rights.*

**Keywords:** *political participation, general elections, advocacy post, students*

**LATAR BELAKANG**

Partisipasi politik merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi, Sekaligus merupakan ciri khas adanya modernisasi politik (Subekti, 2014). Secara umum dalam masyarakat tradisional yang sifat kepemimpinan politiknya lebih ditentukan oleh segolongan elit penguasa, keterlibatan warga negara dalam ikut

serta memengaruhi pengambilan keputusan, dan memengaruhi kehidupan bangsa relatif sangat kecil. Warga negara yang hanya terdiri dari masyarakat sederhana cenderung kurang diperhitungkan dalam proses-proses politik. Menurut Joseph A. Schemer dalam Tahir (2011). Demokrasi sebagai suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan politik dimana

individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan kompetitif atas suara rakyat.

Dalam Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum bahwa Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemilihan umum ini hal yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pemilu telah dianggap menjadi ukuran demokrasi, karena rakyat ikut berpartisipasi menentukan pilihan terhadap wakil rakyat untuk duduk di parlemen dan dalam struktur pemerintahan. Umumnya yang berperan dalam pemilu dan menjadi peserta pemilu ialah partai politik, namun rakyat juga ikut andil dalam pemilu.

Huntington dan Nelson (1994) menjelaskan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan warga negara yang bertindak sebagai pribadi, yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan berkelanjutan atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif (Arif, 2011).

Berbagai kegiatan yang termasuk dalam partisipasi politik menurut Miriam Budiardjo sebagai berikut: 1) ikut memilih wakil rakyat melalui pemilihan umum, seperti: a) mengajukan beberapa alternatif calon pemimpin; b) mendukung atau menentang calon pemimpin tertentu; c) mengajukan kritik dan koreksi atas pelaksanaan kebijakan umum; d) mengajukan tuntutan-tuntutan kepada penguasa pusat maupun daerah; e) melaksanakan keputusan-keputusan pemerintah yang telah ditetapkan; dan f) membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Selanjutnya yang ke-2) menjadi anggota aktif partai politik, kelompok penekan (*pressure group*), maupun kelompok kepentingan tertentu (Budiardjo, 2008).

Pemilihan umum yang diselenggarakan secara periodik lima tahunan menjadi perhatian akademisi berkaitan dengan fenomena yang tidak bisa diselesaikan mengenai rendahnya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum. Pelaksanaan pemilu yang diselenggarakan pada tahun 2014 lalu ternyata menyisakan satu pertanyaan besar para akademisi karena tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum presiden hanya sekitar 74% (KPU RI, 2015).

Partisipasi politik di dalam negara sebagai impementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan warga negara dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan.

Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Sehingga perlunya partisipasi dalam kehidupan kenegaraan sebagai bentuk syarat menjadi warga negara yang baik.

Partisipasi politik dalam pemilihan umum ini berkaitan erat dengan pemenuhan hak-hak politik warga negara, pemenuhan hak politik tersebut dengan adanya kebebasan bagi setiap warga negara untuk menyatakan pendapat (Susilo dan Sa'bani, 2018). Mahasiswa salah satu bagian dari warga negara yang memiliki hak untuk memilih wakil rakyat untuk duduk di parlemen maupun kepala pemerintahan, namun terkadang mahasiswa tidak menggunakan hak suara tersebut. Mahasiswa sebagai kelompok masyarakat terdidik harus memiliki pemikiran dan persepsi politik yang tinggi sehingga partisipasinya dalam politik menjadi penting untuk membangun kualitas demokrasi.

Partisipasi politik sebagai aktivitas warga negara yang bertujuan untuk mempengaruhi kebijakan politik. Penelitian oleh Martin (2012) terhadap generasi muda di Australia menemukan bahwa kelompok muda di negara itu cenderung memandang partisipasi elektoral sebagai sesuatu yang tidak terlalu penting. Hal ini menjadi dasar mengapa kelompok muda di negara itu, dan juga di banyak negara lainnya, cenderung enggan untuk mendaftarkan diri sebagai pemilih, alih-alih datang ke tempat pemungutan suara (TPS) untuk memberikan suara (Morissan, 2016).

Kesulitan untuk menggunakan hak suara pada

kalangan mahasiswa rantau sebagian besar karena jarak, banyak mahasiswa rantau yang dalam artian berasal dari luar daerah pemilihan sehingga jika ingin menggunakan hak suaranya maka harus pulang ke daerah asalnya. Hal inilah yang menjadi masalah dalam partisipasi politik mahasiswa, karena keterbatasan waktu dan sebagainya maka para mahasiswa rantau tidak menggunakan hak suaranya. Namun pada pemilihan umum serentak yang dilaksanakan pada 17 April 2019 dan dalam upaya meningkatkan partisipasi politik mahasiswa rantau BEM UNS mengadakan Posko Advokasi Pemilih untuk mahasiswa rantau agar dapat berpartisipasi dan menggunakan hak suaranya tanpa perlu pulang ke daerah asalnya. Inilah alasan yang melatarbelakangi peneliti mengambil judul Pengaruh Posko Advokasi BEM UNS dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Mahasiswa Rantau Pada Pemilihan Umum Serentak 2019.

Tujuan dari artikel ilmiah ini ialah mengetahui tentang partisipasi politik, fungsi partisipasi politik, bentuk-bentuk partisipasi politik dan faktor apa saja yang mempengaruhi timbulnya partisipasi politik pada mahasiswa dalam pemilihan serentak 2019 serta bagaimana upaya meningkatkan partisipasi politik mahasiswa rantau UNS dalam pemilihan umum serentak 2019.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana bentuk-bentuk partisipasi politik dan faktor apa saja yang mempengaruhi timbulnya partisipasi politik pada mahasiswa dalam pemilihan umum serentak 2019 dan Bagaimana upaya meningkatkan partisipasi politik

mahasiswa rantau UNS dalam pemilihan umum serentak 2019?

### **METODE PENELITIAN**

Pendekatan penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Teknik yang digunakan ialah wawancara. Informan terdiri dari 3 mahasiswa UNS salah satunya ialah presiden BEM UNS, wawancara dilakukan disekitar kampus kentingan. Dengan hasil sementara bahwa posko advokasi pemilih ini meningkatkan partisipasi mahasiswa rantau UNS.

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Dalam meraih demokrasi, partisipasi politik merupakan unsur penting yang harus ada dalam setiap pemilihan suatu calon ketua atau kepala. Kebebasan dalam mengeluarkan pendapat dan memilih suatu calon mutlak harus ada didalam suatu Negara yang bercirikan demokrasi didalamnya, tak terkecuali di Indonesia. Adanya kebebasan rakyat dalam menjalankan partisipasi politik menjadi tolak ukur untuk melihat eksistensi demokrasi dalam suatu Negara (Damita, dkk, 2013).

Menurut Hans Kelsen dalam Sulisworo, dkk (2012) Demokrasi adalah pemerintahan oleh rakyat dan untuk rakyat. Pihak yang melaksanakan kekuasaan Negara ialah wakil-wakil rakyat yang terpilih. Dimana rakyat telah yakin, bahwa segala kehendak dan kepentingannya akan diperhatikan di dalam melaksanakan kekuasaan Negara.

Partisipasi politik adalah kegiatan sukarela dari warga masyarakat melalui mana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan penguasa, dan secara

langsung atau tidak langsung, dalam proses menentukan kebijakan umum.

Salah satu bentuk partisipasi politik menurut Huntington dan Nelson (1984) yaitu kegiatan pemilihan, mencakup memberikan suara, sumbangan-sumbangan untuk kampanye, bekerja dalam suatu pemilihan, mencari dukungan bagi seorang calon, atau setiap tindakan yang bertujuan mempengaruhi hasil proses pemilihan.

Keith Faulks dalam Subekti (2014) partisipasi politik adalah keterlibatan aktif individu maupun kelompok dalam proses pemerintahan yang berdampak pada kehidupan mereka. Hal ini meliputi keterlibatan dalam pembuatan keputusan maupun aksi oposisi, yang penting partisipasi merupakan proses aktif.

Posko advokasi pemilih merupakan salah satu bentuk dari budaya partisipasi politik karena posko ini membantu para pemilih untuk menyalurkan hak pilihnya melalui pengurusan formulir A5 yang notabene sebagai syarat pemilih untuk memberikan hak suaranya pada pemilihan umum 2019 ini.

Budaya Politik Menurut G.A. Almond dan S. Verba (1991), budaya politik adalah sikap orientasi warga negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, dan sikap terhadap peranan warga negara di dalam sistem itu. Menurut Marbun (2005), budaya politik adalah pandangan politik yang mempengaruhi sikap, orientasi, dan pilihan politik seseorang. Budaya politik lebih mengutamakan dimensi psikologis dari suatu sistem politik, yaitu sikap, sistem kepercayaan, simbol yang dimiliki individu dan yang dilaksanakan dalam masyarakat.

Penelitian yang dilakukan EACEA (2013) terhadap generasi muda di tujuh negara Eropa menghasilkan kesimpulan bahwa *“young people articulate preferences and interests, and some of them are even more active than a majority of adults. Moreover, a clear majority of young people ask for more – not less – opportunity to have a say in the way their political systems are governed”*. Kesimpulan penelitian ini menunjukkan bahwa generasi muda mampu mengemukakan preferensi dan minat mereka terhadap politik. Sebagian dari mereka bahkan lebih aktif dari kebanyakan generasi yang lebih tua. Mereka juga menginginkan agar pandangan mereka lebih bisa didengar (Morrison, 2016).

Berdasarkan hasil penelitian wawancara BEM UNS melalui salah satu program kerjanya yaitu posko advokasi pemilih, beberapa kali mengadakan kegiatan diskusi bersama dan nonton bareng debat pilpres. Hal ini merupakan bentuk partisipasi politik di lingkup organisasi pendidikan lokal kampus, melalui diskusi dan nonton bareng debat pilpres juga dapat mempengaruhi sikap dan orientasi pilihan politik mahasiswa maka dari itu posko advokasi pemilih ini sedikit membantu meningkatkan partisipasi politik mahasiswa UNS khususnya untuk dapat memberikan hak suaranya pada pemilihan umum serentak 2019 tanpa harus pulang ke daerah asalnya.

Posko Advokasi Pemilih adalah wadah yang disediakan BEM UNS untuk membantu mahasiswa rantau dalam menggunakan hak pilihnya di Pemilihan Umum Serentak 2019, termasuk pengurusan formulir A5 bagi mahasiswa rantau

yang tidak dapat memilih di daerah asal.

Posko advokasi pemilih BEM UNS yaitu sarana untuk melakukan pelayanan bagi teman-teman mahasiswa rantau untuk mengurus proses pemindahan tempat pemilihan dari daerah asal pindah ke Surakarta jika pada hari pemilihan umum serentak berhalangan untuk pulang ke daerah asal.

*“Yang mendasari adanya posko advokasi pemilih ini ialah literasi terkait pengurusan formulir A5 yang tidak masif, setiap mahasiswa tidak mendapat atau tidak memiliki formulir A5 sebagai syarat pemilihan pindah tempat. Kurangnya literasi tentang formulir A5 ini sehingga membuat teman-teman mahasiswa rantau bingung dan akan lebih memilih golput atau tidak menggunakan hak pilihnya sebagai warga negara yang baik”* (Presiden BEM UNS 2019). Hal lain yang mendasari adanya posko ini ialah mempermudah mahasiswa rantau untuk mengurus pindah tempat pemilihan, yang seharusnya mengurus sendiri di KPU. Posko advokasi ini mewadahi untuk mengurus dan mengolektif pindah pilih mahasiswa rantau. Pada pasal 36 Ayat 2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 37 Tahun 2018 bahwa DPTb (Daftar Pemilih Tambahan) atas data Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS yang karena keadaan tertentu atau kondisi tertentu pemilih tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain. Keadaan tersebut salah satunya ialah tugas belajar/ menempuh pendidikan menengah atau tinggi, disini yang dimaksud ialah mahasiswa rantau.

Dimana mereka sedang dalam masa belajar di perguruan tinggi dan tidak dapat kembali ke daerah asal sehingga menggunakan hak suaranya di tempat lain. Disini fungsi dari posko advokasi pemilih di laksanakan, bahwa fungsi posko advokasi pemilih ini ialah memberikan wadah bagi mahasiswa rantau yang ingin mengurus formulir pindah pilih, BEM UNS yang bekerja sama dengan KPU untuk mengurus formulir A5 mahasiswa rantau agar dapat memilih di Surakarta.

Syarat untuk mengurus formulir A5 ini yang utama ialah mahasiswa tersebut terdaftar di DPT, lalu syarat berkasnya sama seperti syarat yang diberlakukan KPU yaitu Fotocopy E-KTP dan KK namun ada tambahan berkas dari BEM yaitu Formulir Advokasi Pemilih dan KTM (Kartu Tanda Mahasiswa) dimana semua berkas di rangkap menjadi 2. Adapun prosedurnya ialah yang pertama, download formulir advokasi pemilih yang sudah di sediakan oleh BEM. Kedua, mengumpulkan berkas ke sekretariat BEM UNS dan yang ketiga menunggu informasi untuk penyaluran formulir A5. Waktu pengumpulan berkas Tanggal 8 Februari-17 Februari 2019.

*“Saya mengurus A5 di posko advokasi BEM karena tidak mau ribet mengurus sendiri di KPU, jadi saya sangat terbantu adanya posko advokasi pemilih” (Mahasiswa UNS angkatan 2016).* Ada sekitar kurang lebih 500 Mahasiswa rantau yang ikut mengurus formulir A5 di posko advokasi ini dengan alasan yang hampir sama yaitu tidak bisa pulang ke daerah asal pada saat hari pemilu sehingga mereka percaya bahwa posko ini dapat membantu mereka

untuk menyalurkan hak pilihnya dengan mengurus formulir A5 di BEM UNS tanpa ribet harus mengurus sendiri ke KPU Surakarta, sehingga mereka hanya mengumpulkan berkas yang di minta lalu menunggu dan selesai, mereka dapat menggunakan hak pilihnya.

*“Surakarta menyiapkan 2000 formulir pindah pilih, namun tidak dapat di satu TPS namun disebar ke seluruh TPS di Surakarta, namun dari mahasiswa UNS yang sudah mengurus pindah pilih kurang lebih 500 Mahasiswa. Dari BEM UNS sudah mengupayakan agar ada TPS di kampus namun tidak bisa dikarenakan KPU Surakarta sudah menata semua TPS dan kampus UNS tidak termasuk didalamnya, di kampus lain seperti IPB dan ITB ada TPS khusus mahasiswa namun itu harus di urus jauh-jauh hari” (Presiden BEM UNS 2019).* Adanya posko advokasi pemilih ini bisa mempermudah mahasiswa untuk menggunakan hak pilihnya serta sedikit meningkatkan partisipasi politik mahasiswa dikarenakan jika mahasiswa rantau tidak mengurus formulir pindah tempat pemilih otomatis mereka golput atau tidak memilih sehingga dengan adanya posko ini dapat sedikit meningkatkan partisipasi mahasiswa rantau dalam pemilihan umum serentak 2019.

BEM UNS ini melakukan peningkatan literasi terkait pilihan politik, setiap ada debat pilpres bem ini mengadakan nonton debat bersama mahasiswa dan merilis kajian sesuai dengan tema debat pilpres, sehingga mendorong mahasiswa untuk ikut serta berpartisipasi dalam pemilihan serentak ini.

Menurut Ramlan Surbakti partisipasi politik terbagi menjadi

dua yaitu partisipasi aktif dan pasrtisipasi pasif. Partisipasi aktif adalah mengajukan usul mengenai suatu kebijakan umum, mengajukan alternatif kebijakan umum yang berlainan dengan kebijakan yang dibuat pemerintah, mengajukan kritik dan perbaikan untuk meluruskan kebijakan, membayar pajak dan memilih pemimpin pemerintah (Mas'udi, dkk, 2018). Salah satu bentuk partisipasi aktif mahasiswa UNS ialah memilih presiden dan wakil presiden serta calon anggota legislatif dengan menggunakan hak suaranya, dimana posko advokasi pemilih ini sebagai sarana untuk mempermudah mereka dalam menyalurkan hak pilihnya. Sebaliknya, kegiatan yang termasuk dalam kategori partisipasi pasif berupa kegiatan-kegiatan yang menaati pemerintah, menerima, dan melaksanakan saja setiap keputusan pemerintah. Sebagai warga negara yang baik mahasiswa juga dapat melaksanakan aturan-aturan yang di buat oleh pemerintah.

Sementara itu, Milbart dan Goel dalam Purbalaksono (2019) membedakan partisipasi menjadi beberapa kategori. Pertama, apatis. Artinya, orang yang tidak berpartisipasi dan menarik diri dari proses politik. Kedua, spectator. Artinya, orang yang setidak-tidaknya pernah ikut memilih dalam pemilihan umum. Ketiga, gladiator. Artinya mereka yang secara aktif terlibat dalam proses politik, yakni komunikator, spesialis mengadakan kontak tatap muka, aktivis partai dan pekerja kampanye, dan aktivis masyarakat. Dari beberapa mahasiswa yang saya temui bahwa mereka juga ada yang apatis terhadap politik, dia merasa politik tidak penting sehingga dia tidak mau

memberikan hak suaranya pada saat pemilu. Mahasiswa yang ikut dalam program posko advokasi ini secara tidak langsung masuk pada kategori spectator karena ia mengurus formulis A5 di posko advokasi pemilih untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan presiden dan wakil presiden 2019. Serta gladiator ialah BEM UNS sebagai organisasi kampus yang mengadakan program kerja posko advokasi mahasiswa sebagai komunikator serta mediator mahasiswa rantau yang kesulitan untuk memberikan hak suaranya, sehingga posko ini membantu para mahasiswa agar mempermudah mengurus A5 para mahasiswa rantau UNS.

*“Saya tidak memberikan hak suara saya pada pemilu 2019 kemarin, karena saya tidak terlalu peduli dan tidak terlalu mengikuti proses politik. Dan alasan saya tidak memillih karena saya tidak bisa pulang kerumah serta tidak mengurus formulir A5 pindah pilih menjadi di solo walaupun saya tau ada program posko advokasi dan saya tidak ikut itu” (AA Mahasiswa 2016).* Arbi Sanit mengatakan bahwa golput adalah gerakan protes politik yang didasarkan pada segenap problem kebangsaan, sasaran protes dari dari gerakan golput adalah penyelenggaraan pemilu (Arianto, 2011). Golput adalah mereka yang dengan sengaja dan dengan suatu maksud dan tujuan yang jelas menolak memberikan suara dalam pemilu. Dengan demikian, orang-orang yang berhalangan hadir di Tempat Pemilihan Suara (TPS) hanya karena alasan teknis. Berdasarakan hasil wawancara diatas maka tindakan golput mahasiswa karena faktor teknis yaitu jauhnya daerah tempat tinggal dan sengaja

tidak mengurus formulir pindah pilih suara.

Konsekuensi sementara dari tingkat yang ada ketidakpercayaan bagi individu telah dikembangkan secara luas (Sennett 1999 , Luhmann 2009 ), Implikasi dari pemasangan ketidakpercayaan bagi masyarakat dan lembaga-lembaga politik yang kontroversial karena mereka telah secara teoritis dikonseptualisasikan (Ullmann-Margalit, 2004 ). Beberapa sarjana telah menempatkan sikap hati-hati dan waspada tidak mempercayai mereka yang berkuasa di pusat dari setiap institusi demokrasi dan sebagai prinsip demokrasi yang mendasar (Barber, 1983 ) (Butzlaff dan Zimmer, 2019).

Rendahnya partisipasi politik mahasiswa dikarenakan sikap apatis mahasiswa yang tidak peduli akan politik, mereka hanya mementingkan kepentingan pribadinya masing-masing tanpa memikirkan kebijakan publik yang menentukan bagaimana kehidupan publik pada umumnya. Sikap apatis inilah yang sekarang dipegang mahasiswa dan sikap kritis kepada pemerintah yang semakin luntur. Mahasiswa tidak lagi mempercayai pemerintah pusat dalam memegang kekuasaan tertinggi negara karena tidak terealisasinya janji-janji pemerintah yang seharusnya sudah dilakukan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi politik yang pertama yaitu tingkat pengetahuan, tingkat pengetahuan dan adanya pendidikan politik indonesia menjadi faktor timbulnya partisipasi mahasiswa dalam pemilihan umum serentak 2019. Kedua, tingkat pendidikan, sebagai mahasiswa yang menjadi tingkat pendidikan tertinggi menjadi salah satu faktor mempengaruhi partisipasi

politik mahasiswa, misalnya partisipasi mahasiswa seperti mengikuti kegiatan organisasi di kampus serta memberikan suara pada saat pemilihan umum serentak 2019. Melalui posko advokasi pemilih menjadi salah satu faktor partisipasi politik mahasiswa UNS dalam pemilu yang bekerja sama dengan KPU Surakarta.

Salah satu upaya meningkatkan partisipasi politik mahasiswa rantau UNS dalam pemilihan umum 2019 ialah adanya posko advokasi mahasiswa serta diskusi dan nonton bareng debat pemilihan presiden. Adanya posko advokasi pemilih ini bisa mempermudah mahasiswa untuk menggunakan hak pilihnya serta sedikit meningkatkan partisipasi politik mahasiswa dikarenakan jika mahasiswa rantau tidak mengurus formulir pindah tempat pemilih otomatis mereka golput atau tidak memilih sehingga dengan adanya posko ini dapat sedikit meningkatkan partisipasi mahasiswa rantau dalam pemilihan umum serentak 2019.

## **KESIMPULAN**

Hasil penelitian yang dilakukan dapat ditarik kesimpulan bahwa sebagai mahasiswa yang menjadi tingkat pendidikan tertinggi menjadi salah satu faktor mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa, misalnya partisipasi mahasiswa seperti mengikuti kegiatan organisasi di kampus serta memberikan suara pada saat pemilihan umum serentak 2019. Melalui posko advokasi pemilih menjadi salah satu faktor partisipasi politik mahasiswa UNS dalam pemilu yang bekerja sama dengan KPU Surakarta.

Posko advokasi pemilih mahasiswa berpengaruh terhadap partisipasi politik mahasiswa dengan bukti ada kurang lebih 500 mahasiswa rantau UNS yang mengikuti posko advokasi pemilih dari BEM UNS yang juga dapat mengurus formulir A5 sebagai bukti pindah pilih, sehingga mahasiswa rantau UNS tidak harus pulang ke daerah asal untuk memilih presiden dan wakil presiden.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arianto, Bismar. Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam pemilu. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, Vol.1, No.1, 2011
- Arif, Saiful. 2011. *Sistem Politik dan Pemerintahan*. Malang: Averroes Press.
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Sulisworo, dkk. 2012. *Bahan Ajar Demokrasi (Hibah Materi Pembelajaran Non Konvensional 2012)*.
- Butzlaff & Zimmer. 2019. *Undermining or defending democracy? The consequences of distrust for democratic attitudes and participation*. ISSN: 1946-0171 (Print) 1946-018X (Online)
- Morissan. *Tingkat Partisipasi Politik dan Sosial Generasi Muda Pengguna Media Sosial*. *Jurnal Visi Komunikasi*/Volume 15, No.01, Mei 2016
- Damita, dkk. *Tingkat Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2013 Di Kabupaten Lumajang*. 2013
- Mas'udi, dkk. *Perilaku Partisipasi Pemilih pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2018*. *JSW: Jurnal Sosiologi Walisongo* – Vol 2, No 2 (2018)
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018. *Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum*
- Purbalaksono, alfianto. *Partisipasi Politik dan Kritik terhadap Agenda Golput pada Pemilu 2019*. *Update Indonesia* — Volume XIII, No. 2 – Februari 2019
- Tahir, Masnun. *Demagogi dan Kekerasan Agama Dalam Sistem Demokrasi Di Indonesia*. *Analisis*, Volume XI, Nomor 1, Juni 2011
- Subekti, Tia. *Partisipasi Politik Masyarakat Dalam Pemilihan Umum (Studi Turn of Voter dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013)*. 2014
- Susilo dan Sa'bani. *Mahar Politik Sebagai Bagian dari Unsur Tindak Pidana*. *Seminar Nasional Hukum Universitas Negeri Semarang* Volume 4 Nomor 2 Tahun 2018
- Undang-Undang No.7 Tahun 2017 *Tentang Pemilihan Umum (Pemilu)*

**PARTISIPASI POLITIK MAHASISWA PPKn  
DALAM PEMILIHAN UMUM PRESIDEN BEM FKIP UNS TAHUN 2018  
SEBAGAI BENTUK CIVIC PARTICIPATION  
(Studi pada Mahasiswa PPKn Angkatan 2015-2018 FKIP UNS)**

Nurul Hiendayati Mursito  
Program Studi PPKn Universitas Sebelas Maret Surakarta  
Email: [nurulhiendayati11@student.uns.ac.id](mailto:nurulhiendayati11@student.uns.ac.id)

**ABSTRAK**

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui partisipasi politik mahasiswa Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam pemilihan umum yang diadakan di fakultas keguruan dan Ilmu Pendidikan pada tahun 2018 dan membahas faktor penghambat dan pendorong dalam partisipasi politik mahasiswa PPKn, metode yang digunakan pada penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif. Sumber data diperoleh dari Informan, pengamatan pada saat observasi dan data. Teknik mengumpulkan data dengan mewawancarai, mengamati, dan menganalisis dokumen. Analisis data menggunakan model analisis deskriptif yang dikumpulkan mengumpulkan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Hasil yang diperoleh setelah mengamati partisipasi politik siswa pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan dalam pemilihan umum belum semuanya dapat membuktikan dan dari hasil penelitian yang dilakukan 30,05% atau kontribusi 82 siswa dari 268 siswa yang tidak menggunakan hak mereka, faktor pendorong mahasiswa dalam berpartisipasi politik adalah adanya antusiasme, kesadaran untuk ikut berpolitik, dan peranan media massa baik online maupun konvensional, dan faktor penghambat partisipasi politik siswa dalam Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan adalah pemilihan waktu pemilihan umum yang kurang efektif dan adanya kendala teknis

**Kata Kunci** : Partisipasi politik, Mahasiswa, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

**PENDAHULUAN**

Partisipasi politik merupakan kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara dan secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan pemerintah (public policy) kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, mengadakan hubungan (contacting) atau menjalin lobbying dengan pejabat pemerintah atau anggota parlemen, menjadi anggota partai atau salah satu gerakan sosial ( Budiharjo,

2009 ). Berdasarkan Konsep tersebut Partisipasi Politik dapat dikategorikan menjadi 4 tipe partisipasi yakni partisipasi politik aktif, partisipasi pasif tertekan, partisipasi politik militan, dan partisipasi politik pasif (Rahman, 2007) Partisipasi politik memberikan nilai bahwa partisipasi dalam berpolitik masyarakat diperlukan untuk ikut andil dalam mempengaruhi kebijakan masyarakat serta untuk mencerminkan karakter bangsa Indonesia yang merupakan negara demokrasi yang selaras dengan Undang-Undang Dasar pasal 1 ayat (2) yang memiliki artian bahwa

Kedaulatan Indonesia berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang, tiada demokrasi tanpa adanya partisipasi politik sebab partisipasi politik merupakan esensi dari demokrasi.

Salah satu wujud dari partisipasi politik dapat melalui Pemilihan Umum karena pemilihan umum merupakan cara yang paling kuat bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam demokrasi modern. Sedangkan untuk bentuk dari partisipasi politik memiliki beberapa bentuk, Salah satunya adalah kegiatan pemilihan yang dapat diartikan sebagai suatu kegiatan untuk ikut memilih dalam suatu kegiatan politik (Huntington, 2003), tujuan dari Partisipasi Politik yaitu sebagai kegiatan yang memberikan kesempatan kepada setiap warganegara untuk mempengaruhi proses dalam merumuskan setiap kebijakan, serta sebagai alat untuk memilih pemimpin dan mengeksposisikan eksistensi individu atau grup untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan dengan jalan terlibat dalam politik, namun tujuan dari partisipasi politik yang mana untuk mengekspresikan eksistensi individu atau kelompok untuk mempengaruhi jalannya pemerintahan belum tercapai karena masih adanya kendala berupa golput atau golongan putih yang diartikan sebagai individu atau kelompok yang dengan sengaja enggan menggunakan hak pilihnya, adanya golput dilatarbelakangi oleh beberapa faktor yakni faktor psikologis, Faktor sistem Politik, faktor kepercayaan politik dan faktor sosial ekonomi (Efriza, 2012).

Salah satu wujud nyata dari adanya partisipasi politik pada lingkungan kampus adalah melalui

Pemilihan Umum Presiden BEM tingkat Fakultas, dimana kegiatan ini merupakan acara tahunan yang diselenggarakan untuk meregenerasi pemimpin Badan Eksekutif Mahasiswa atau BEM, pemilu tingkat fakultas ini merupakan kegiatan yang ditujukan untuk memilih Presiden BEM untuk menjabat dan menjalankan kepemimpinan selama satu tahun kedepan terhitung sejak terpilihnya Presiden BEM tersebut. Pada pemilihan umum ini tentulah seluruh mahasiswa FKIP memiliki hak suara yang sama serta dapat menggunakan hak untuk menyuarakan hak nya tersebut tanpa ada belenggu dari pihak manapun, pemilihan Umum Tingkat Fakultas ini merupakan amanat dari Undang-Undang KBM FKIP UNS Tentang Pemilihan Umum 2018 dimana KPU FKIP UNS lah yang memiliki tanggung jawab untuk menyelenggaraan Pemilu dimana yang telah tercantum dalam regulasi yang mengatur, dalam hal ini Mahasiswa terutama Mahasiswa PPKn diharapkan dapat berpartisipasi dalam menyuarakan hak yg dimilikinya untuk memilih dalam pemilu karena berpartisipasi dalam pemilu juga merupakan salah satu bentuk Civic Participation atau Keterlibatan warganegara dalam berperan aktif pada kegiatan partisipasi politik (Winarno, 2013) yang menjadi salah satu kajian Mahasiswa PPKn.

Namun, Berpartisipasi politik dengan cara menyuarakan hak pilih pada mahasiswa PPKn dalam kegiatan Pemilu Presiden BEM FKIP belum sepenuhnya dilakukan oleh mahasiswa PPKn angkatan 2015-2018 yang merupakan mahasiswa aktif dan memiliki hak untuk menyuarakan hak pilihnya,

berdasarkan Hasil wawancara serta analisis data diperoleh fakta bahwa masih cukup banyak mahasiswa yang Golput yakni ada 30.05% atau 82 mahasiswa dari 268 jumlah keseluruhan mahasiswa PPKn angkatan 2015-2018 yang tidak menggunakan hak pilihnya. Padahal Persyaratan untuk menjadi pemilih aktif dalam pemilu ini terbilang mudah yakni hanya menunjukkan Karmas (Kartu Mahasiswa) pada Panitia Penyelenggara Pemilihan Umum. Berdasarkan fenomena tersebut penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan terkait bagaimanakah partisipasi politik mahasiswa PPKn FKIP UNS dalam menyuarkan hak nya dalam pelaksanaan pemilu tingkat fakultas serta mengetahui apasajakah yang yanmg menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat yang melatarbelakangi partisipasi politik mahasiswa PPKn FKIP UNS pada pemilu Presiden BEM tingkat fakultas pada tahun 2018.

#### **METODE PENELITIAN**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah model kualitatif dengan pendekatan deskriptif, teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah Studi kajian pustaka, wawancara dan analisis data, Penentuan Lokasi adalah di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret, subjek Penelitian dalam Penelitian ini adalah Mahasiswa PPKn UNS angkatan 2015 – 2018 sejumlah 31 Mahasiswa. Penelitian ini menggunakan Purposive Sampling sebagai key informan adalah Mahasiswa PPKn Angkatan 2015-2018, analisis data menggunakan tiga alur kegiatan yaitu reduksi data, penyajian dan pengambilan keputusan/ verifikasi

data, Pengujian validitas data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Partisipasi politik masyarakat dapat dilihat dari dua sisi, pertama masyarakat melakukan pencoblosan atau menyalurkan hak pilihnya pada saat pemilihan umum berlangsung, kedua masyarakat terlibat dalam pemilihan berupa pengawasan dan pengawalan (Rasaili Wilda, 2016), Partisipasi politik juga dapat diukur dengan kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat untuk mempengaruhi tindakan dan keputusan pemerintah (Zamhasari, 2017). Partisipasi politik dapat diukur dengan adanya kegiatan memberikan suara atau Votting dalam pemilihan umum yang merupakan tanggung jawab yang perlu dilakukan oleh masyarakat, kecenderungan warga untuk turut serta dalam pemilihan umum merupakan suatu bentuk dari kesadaran politik dalam masyarakat tersebut (Verba, Nie & Kim, 1978). Votting dalam kategorisasi tindakan politik merupakan salah satu bentuk tindakan yang masih bersifat konvensional dengan jalan memberikan suara (Budiardjo, 2009). Partisipasi politik masyarakat dalam bentuk voting ini nampak jelas terlihat apabila suatu Negara mengadakan pemilihan umum, baik secara sukarela maupun akibat adanya mobilisasi dari penguasa. Dalam pemilihan umum, individu memberikan suaranya untuk memilih orang-orang untuk menduduki jabatan politik dandari pejabat politik tersebut diharapkan lahirnya kebijakan-kebijakan politik sesuai dengan kehendak masyarakat

tersebut (Lery, 2016) Pada pemilihan umum Presiden BEM tingkat fakultas di Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan UNS presentase mahasiswa yang golput mencapai

angka 30.05% dari jumlah keseluruhan mahasiswa aktif PPKn angkatan 2015 hingga angkatan 2018 yang berjumlah 268 mahasiswa.

Tabel 1. Tingkat Presentase Partisipasi Politik Mahasiswa PPKn Angkatan 2015-2018

Angkatan	Jumlah Mahasiswa		Jumlah Mahasiswa Keseluruhan	Presentase
	Menggunakan Hak Pilih	Tidak Menggunakan hak Pilih		
2015	6	54	60	10%
2016	44	16	60	73%
2017	69	5	74	93%
2018	67	7	74	90%

Sumber : Hasil olah data partisipasi pemilih pada pemilu tingkat fakultas tahun 2018

Mahasiswa PPKn angkatan 2015 menyebutkan “Partisipasi politik berupa memberikan votting dalam pemilihan umum Presiden BEM tahun ini tidak dapat ia lakukan dan memilih untuk golput karena pada saat pemilihan umum berlangsung bertepatan dengan adanya kegiatan magang kependidikan 3 atau biasa disebut dengan PPL yang dilaksanakan di sekolah-sekolah yang ada di solo raya, sehingga menyebabkan saya tidak berada di kampus dan tidak dapat memberikan votting atau menyuatkan hak pilih saya”. (NT, Mahasiswa PPKn angkatan 2015), tindakan masyarakat untuk tidak menggunakan hak pilihnya ini juga merupakan salah satu bentuk partisipasi politik yang didefinisikan oleh Ramlan Surbakti sebagai suatu aktivitas masyarakat dalam memberikan suatu keputusan untuk memilih atau tidak memilih dalam pemilihan umum (Budiardjo, 2008) menurut hasil wawancara diatas

bahwa informan berpartisipasi politik dengan tidak memilih dalam pemilihan umum atau disebut dengan Golput. Golput ialah sekelompok orang yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam suatu pemilihan umum (Pahmi Sy, 2010).

Kendala akses untuk menyuatkan hak pilihnya pada pemilihan umum juga dituturkan salah satu mahasiswa PPKn angkatan 2015 yang menyebutkan bahwa “Pada saat FKIP ada pemilihan umum untuk memilih Presiden BEM yang baru saya tidak ikut memilih, karena saya berada jauh dari lokasi pemilihan umum yang dilaksanakan di kampus kentingan dan pada saat itu saya berada di daerah kartasura karena masih dalam kegiatan magang kependidikan 3 di salah satu SMA di kartosuro sehingga terhalang jarak yang cukup jauh yang menyebabkan saya tidak memungkinkan untuk ke kampus hanya untuk ikut berpartisipasi politik berupa *votting* pada saat pemilihan umum

diselenggarakan, dan menurut saya penyelenggaraan pemilihan umum Presiden BEM juga dilaksanakan di waktu yang kurang tepat dan kurang efektif karena kami angkatan 2015 sedang magang di daerah diluar kampus”. (RW, Mahasiswa PPKn angkatan 2015).

Fatah H (2007) mengklasifikasikan golput atas empat golongan. Pertama, golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, ketiduran, berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah. Kedua, golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). Ketiga, golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. Keempat, golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.

Adanya kendala akses yang dialami oleh beberapa mahasiswa angkatan 2015 sesuai dengan salah satu klasifikasi golput yang disampaikan Fatah (Fattah, 2007) yang menyebutkan salah satu klasifikasi golput yakni golput teknis dimana adanya suatu kendala-kendala teknis yang menyebabkan beberapa mahasiswa tersebut tidak dapat berpartisipasi politik berupa memberikan *voting* atau menyuarakan hak pilihnya dalam pemilihan umum karena sedang

melaksanakan kegiatan magang kependidikan 3 yang berada diluar kampus kentingan sehingga menyebabkan mereka terhalang oleh akses yang berdampak pada tidak digunakannya hak pilih yang mereka miliki sebagai mahasiswa untuk turut andil dalam pemilihan umum.

Herlyne (2013) Pada penelitiannya yang berjudul “Partisipasi Politik Mahasiswa dalam pemilihan umum Raya Jurusan Tahun 2013 sebagai upaya pembentukan kehidupan demokratis di Lingkungan PMPKN FIS UNESA” Menemukan beberapa hasil yang sama terhadap penelitian yg dilakukan peneliti yakni adanya beberapa hal yang berpengaruh pada keikutsertaan mahasiswa pada pemilu yakni adanya faktor waktu penyelenggaraan pemilu dimana pemilu diselenggarakan di masa kuliah yang kurang efektif sehingga belum semua mahasiswa dapat ikut berpartisipasi, Hal ini juga selaras dengan hasil yang peneliti temukan di lapangan dimana adanya pengaruh motivasi serta waktu penyelenggaraan yang bukan jam efektif untuk mahasiswa angkatan 2015 karena pada waktu tersebut angkatan 2015 menjalani magang.

Mahasiswa PPKn angkatan 2016 mengungkapkan bahwa partisipasinya pada pemilihan umum Presiden BEM tingkat fakultas pada tahun 2018 dipengaruhi oleh adanya faktor hubungan sosial dan kekerabatan dimana salah satu calon presiden BEM merupakan teman seangkatan, dalam wawancara yang dilakukan oleh peneliti mahasiswa tersebut mengungkapkan bahwa :“Saya mengikuti pemilihan umum tingkat fakultas yang diselenggarakan kemarin itu, saya menggunakan hak pilih saya karena karena waktu itu saya sedang ada

kuliah jadi saya sempatkan untuk ikut mencoblos di TPS, juga karena salah satu calon dalam pemilihan umumnya teman seangkatan saya sendiri jadi membuat saya semangat dalam menyuarakan hak pilih saya karena untuk membantu teman sendiri juga”. (KM, Mahasiswa PPKn angkatan 2016), hal serupa juga diungkapkan informan lain yang menyebutkan bahwa : “Saya menggunakan hak suara saya pada pemilihan umum kemaren itu karena calon nya adalah teman saya sekelas, jadi saya ada keinginan untuk ikut berpartisipasi dalam hal memberikan *votting* atau memberikan hak suara saya dalam pemiliha umum”. ( TL, Mahasiswa PPKn angkatan 2016).

Emil Durkheim pada teori solidaritas dalam (Ritzer, 2012) menyebutkan bahwa Soliditas menunjukkan pada suatu keadaan hubungan antara individu dan/atau kelompok yang didasarkan pada persaan moral dan kepercayaan yang dianut bersama yang diperkuat oleh pengalaman emosional bersama, hal tersebut sejalan dengana danya fenomena yang melatarbelakangi mahasiswa PPKn angkatan 2016 dalam menyuarakan hak pilihnya pada saat pemilihan umum karena adanya solidaritas berupa adanya hubungan kekerabatan serta adanya pendekatan sosiologis. Kelompok kekerabatan merupakan suatu kelompok yang anggota-anggotanya memiliki hubungan darah atau persaudaraan. Kelompok sosial inilah yang mula-mula muncul sebagai unit pergaulan hidup bagi manusia. Bahkan di Indonesia diantara berbagai suku yang ada, kelompok kekerabatan masih berfungsi secara kuat terhadap kepribadian manusia (Soekanto, 2009)

Pendekatan Sosiologis atau disebut juga mazhab columbia menyatakan bahwa latar belakang pilihan atas partai, calon dan isu ditentukan oleh karakteristik sosial pemilih. Misalnya agama, etnik atau kedaerahan, dimana seseorang akan memilih partai atau tokoh tertentu karena ada kesamaan karakteristik sosial antara pemilih dan karakteristik sosial tokoh atau partai yang dipilih. Kemudian dapat disimpulkan bahwa model sosiologis mengasumsikan bahwa perilaku pemilih ditentukan oleh karakteristik sosial dan pengelompokan sosial pemilih dan karakteristik sosial tokoh atau partai yang dipilih ataudengan kata lain, pemilih memiliki orientasi tertentu terkait karakteristik dan pengelompokan sosialnya dengan pilihan atas partai atau calon tertentu. Kemudian Pengelompokan sosial dilihat dari pola hubungan sosial seperti hubungan pertemanan, kekeluargaan dan kekerabatan serta kelompok sosial lainnya seperti profesi dan organisasi yang diikuti (Kadir, 2017) , Hal tersebut juga sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Fitriyah (Fitriyah, 2013) pada penelitiannya yang berjudul “Perilaku Pemilih Dalam Pilkada Kabupaten Kudus tahun 2013” yang mendapatkan hasil yakni kecenderungan atau pilihan seseorang terhadap partai/ kandidat tertentu bukan hanya karena partai/ kandidat mempunyai kesamaan latar belakang/ karakteristik sosiologis dengan pemilih, tetapi juga secara sosiologis psikologis (socio-psikologis) dekat dengan pemilih. Hal tersebut tentu sejalan dengan temuan yang didapat di lapangan bahwa beberapa mahasiswa PPKn angkatan 2016 yang ikut menyuarakan hak pilihnya pada saat pemilihan Presiden BEM Karena

adanya ikatan pertemanan dengan salah satu paslon nya karena merupakan teman seangkatan.

Affan Ghaffar menyebutkan Partisipasi masyarakat biasanya juga bersumber dari basis-basis sosial politik tertentu. Basis yang sama akan mendorong orang untuk berpartisipasi oleh karena itu bisa dikelompokkan atas, Pertama, kelas, yaitu individu-individu yang terlibat dalam partisipasi politik karena memiliki status sosial, income, kegiatan dan lapangan pekerjaan yang sama, Kedua, communal group, yaitu individu yang terlibat karena memiliki suku, agama, ras dan bahasa yang sama. Ketiga, neighborhood yaitu individu –individu yang terlibat karena memiliki tempat tinggal yang berdekatan satu sama lain, Keempat, faction, yaitu individu – individu yang terlibat dalam partisipasi karena mereka disatukan oleh interaksi pribadi yang sangat tinggi satu sama lain yang ditopang pola hubungan yang bersifat clientilistic. (Sahdan dan Habboddin, 2009), sejalan dengan temuan affan ghaffar bahwa partisipasi politik mahasiswa pada angkatan 2016 pada pemilihan umum Presiden BEM tahun 2018 dipengaruhi oleh basis sosial politik yakni mengacu pada basis ke empat yakni faction karena dipersatukan interaksi pribadi yang sangat tinggi karena adanya hubungan solidaritas dan kekerabatan.

Partisipasi Politik yang ditunjukkan dengan tingginya angka *votting* pada mahasiswa PPKn yang memiliki presentase paling tinggi depegang oleh angkatan 2017 dengan presentase partisipan mencapai 93% dan tertinggi diantara angkatan-angkatan lain, menurut hasil wawancara yang dilakukan dengan beberapa mahasiswa PPKn angkatan

2017 hal tersebut dilatarbelakangi karena adanya sikap melek politik yang tinggi serta adanya kesadaran bahwa mereka harus menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum, berikut adalah hasil wawancara dengan mahasiswa angkatan 2017. “Saya ikut dalam berpartisipasi politik dengan cara ikut mencoblos atau memberikan hak suara saya, hal ini saya lakukan sebagai bentuk kesadaran saya sebagai mahasiswa khususnya mahasiswa PPKn dimana saya memiliki hak untuk menyuarakan suara saya, serta saya juga juga memiliki pengetahuan dalam hal pemilihan politik yang diselenggarakan berbagai platform media massa seperti whatsapp dan instagram dan saya juga membacabaca terkait visi misi serta program kerja dari para calon presiden jadi saya dapat menyuarakan hak saya dengan bekal pengetahuan yang saya miliki”. (DAK, Mahasiswa PPKn angkatan 2017)

Adanya kesadaran hak yang tercermin pada wawancara diatas merupakan salah satu bentuk melek politik. Melek politik adalah sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan yang ditujukan untuk mengatur penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara, kekuasaan adalah suatu alat yang diperlukan untuk meraih hak dalam penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara (Rahmad F, 2009) Di beberapa artikel dan buku, istilah melek politik sering disamakan dengan istilah literasi politik (political literacy). Menurut pendapat Benard Crick (Bernard C, 2001) dalam tulisannya *Essays on Citizenship* definisi dasar tentang Literasi Politik adalah, pemahaman praktis tentang konsep-konsep yang diambil dari kehidupan sehari-hari dan

bahasa. Merupakan upaya memahami seputar isu utama politik, apa keyakinan utama para konsestan, bagaimana kecenderungan mereka mempengaruhi diri. Singkatnya, literasi politik merupakan senyawa dari pengetahuan, ketrampilan dan sikap. Crick menegaskan literasi politik lebih luas melainkan cara “membuat diri menjadi efektif dalam kehidupan publik” dan mendorong menjadi lebih aktif, partisipatif, dalam melaksanakan hak dan kewajiban baik dalam melaksanakan hak dan kewajiban baik dalam keadaan resmi maupun di arena publik yang sifatnya suka rela.

Melek politik menurut Jenni S Bev dalam (Rosalia W, 2016) literasi politik mengacu kepada seperangkat ketrampilan yang diperlukan bagi warga untuk berpartisipasi dalam pemerintahan masyarakat. Berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan umum, melek politik dapat dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu melek prosedural dan melek substansial. Melek prosedural antara lain memahami regulasi kepemiluan, memahami proses penyelenggaraan pemilu, dan memahami komponen yang terlibat dalam penyelenggaraan pemilu. Melek substansial antara lain memahami esensi pemilu dalam demokrasi, memahami urgensi partisipasi politik, memahami penyakit politik yang harus dihindari, memahami substansi isi kampanye politik, serta memilih dan memilah dalam pemberian suara. Dimana berdasarkan wawancara yang dilakukan dengan narasumber mahasiswa angkatan 2017 sudah mencakup kedua melek politik yang disebutkan oleh Jenni S Bev karena informan dari angkatan 2017 tersebut sudah paham regulasi pemilu serta memahami urgensi partisipasi politik.

Adanya media massa juga memegang peranan dalam mempengaruhi partisipasi politik mahasiswa angkatan 2017, hal ini disampaikan pada hasil wawancara yang menyebutkan bahwa : “Saya turut berpartisipasi politik dengan cara menyuarakan hak saya, karena saya juga sering melihat berbagai pesan broadcast terkait penyelenggaraan pemilu serta sering melihat kampanye online yang juga lewat berbagai media seperti whatsapp hal ini menjadi salah satu faktor pendorong saya dalam menyuarakan hak saya”. (PJ, Mahasiswa PPKn angkatan 2017).

Peranan media massa berkenaan dengan penerimaan penerimaan perangsang politik dimana Peranan Media Massa yang memiliki pengaruh yang signifikan terhadap partisipasi politik mahasiswa, Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti, Seluruh narasumber dalam wawancara menyebutkan bahwa media massa sangat mempengaruhi mereka dalam berpartisipasi politik, Peran media massa ini meliputi adanya kampanye online melalui beberapa media sosial seperti whatsapp dan Instagram yang mempengaruhi mahasiswa dalam berpartisipasi politik, Peran media massa dalam mendorong adanya partisipasi politik, Dimana pada penelitian yang dilakukan oleh Laonia Lololo ( 2018 ) Dengan Judul “Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam bingkai jejaring sosial di media sosial” Juga memperoleh hasil yang sama dengan hasil yang ditemukan peneliti bahwa media massa terutama media online menjadi salah satu faktor pendorong dalam masyarakat untuk berpartisipasi politik, media massa berfungsi sebagai alat kontrol

sosial politik yang dapat memberikan berbagai informasi mengenai penyimpangan sosial itu sendiri, yang dilakukan baik oleh pihak pemerintah, swasta, maupun oleh pihak yang ada di dalam lingkup masyarakat. Hal serupa juga sejalan dengan penelitian dari Morissan dengan judul “Tingkat Partisipasi politik dan Sosial Generasi Muda Pengguna Media Sosial” yang menyebutkan bahwa media sosial merupakan media yang efektif untuk menggalakkan partisipasi politik masyarakat. Ada beberapa pendekatan yang dapat dilakukan untuk melihat perilaku pemilih, salah satunya yakni pendekatan domain Kognitif, Yang merupakan pendekatan yang berasal dari berbagai sumber seperti pemilih, Komunikasi mulut kemulut serta adanya media masa (Nursal, 2004).

Tingkat partisipasi yang tak kalah tinggi juga ditunjukkan oleh mahasiswa PPKn angkatan 2018 yangmana ditunjukkan dengan adanya presentase votting sebesar 90%, tingginya angka partisipasi politik tersebut menurut wawancara dikarenakan ini merupakan pemilihan umum tingkat fakultas pertama mereka sebagai mahasiswa yang membuat mereka merasa sangat antusias dalam mengikuti pemilihan umum, Berikut merupakan hasil wawancara dengan mahasiswa angkatan 2018, “Saya ikut pemilu karena merasa bahwa mahasiswa PPKn harus ikut aktif dalam pemilu, Serta kan ini pemilu pertama saya di kampus” ( N, Mahasiswa PPKn 2018 )“ Saya ikut pemilu karena ini pertama kalinya dan juga saya merasa bahwa mahasiswa PPKn harus ikut berpartisipasi dalam pemilihan umum kampus karena memiliki hak suara” ( FN, Mahasiswa PPKn 2018)

Menurut pendapat Benard Crick (Bernard C, 2001) dalam tulisannya *Essays on Citizenship* definisi dasar tentang Literasi Politik adalah, pemahaman praktis tentang konsep-konsep yang diambil dari kehidupan sehari - hari dan bahasa. Merupakan upaya memahami seputar isu utama politik, apa keyakinan utama para konsestan, bagaimana kecenderungan mereka mempengaruhi diri. Singkatnya, literasi politik merupakan senyawa dari pengetahuan, ketrampilan dan sikap

Antusiasme pada pemilih pertama juga sejalan dengan penelitian publikasi oleh media berita Voa Indonesia yang mendapatkan hasil bahwa faktor utama yang melatarbelakangi pemilih pertama untuk berpartisipasi politik yakni adalah rasa antusiasme yang tinggi untuk ikut dalam pemilu (<https://www.voaindonesia.com/a/antusiasme-pemilih-pertama-pada-pemilu-2019/4881323.html>)

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan dari penelitian ini maka dapat ditarik kesimpulan bahwa mahasiswa PPKn FKIP UNS seluruhnya masih belum menggunakan hak yang dimilikinya untuk turut berpartisipasi politik dalam menyuarakan hak pilihnya, Untuk partisipasi politik yang terendah ditunjukkan dengan partisipasi politik yang hanya sebesar 10% oleh mahasiswa PPKn angkatan 2015 sedangkan untuk partisipasi politik dengan presentasi paling tinggi yakni dipegang oleh angkatan 2017 sebesar 93% tingkat partisipasi. Dalam berpartisipasi politik mahasiswa PPKn dipengaruhi oleh beberapa faktor yang terdiri dari faktor pendorong dan juga faktor

penghambat, dimana faktor pendorong ini meliputi Motivasi, Melek politik, Peranan media massa serta adanya kesadaran politik. Dan untuk faktor penghambat meliputi penyelenggaraan pemilihan umum yang diselenggarakan dalam waktu tidak tepat untuk salah satu angkatan, Adanya kendala teknis serta adanya sikap apatisme yang masih ditunjukkan oleh beberapa mahasiswa.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Adman Nursal, 2004, *Political Marketing*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama
- Affan gaffar, 2006, *Politik Indoneisia : Transisi menuju Demokrasi*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Benard Crick, 2000, *Citizenship : The Political and The Democratic* , London : The Birckberg Collage
- Budiardjo Miriam, 2008 *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Efriza, 2012, *Political Exsplore : Sebuah kajian ilmu politik*, Bandung : Alfabeta
- Fatturahman, Deden dan Sobari, 2004, *Pengantar Ilmu Politik*, PT Universitas Muhammadiyah Malang
- Fitriyah, 2013, *Perilaku Pemilih dalam Pilkada Kabupaten Kudus Tahun 2013*, Jurnal Politika Volume 4 Nomor 1 Tahunm 2013
- Habbodin, Sahdan, 2009, *Evaluasi kritis Penyelenggaraan Pilkada di Indonesia*, Jogjakarta : IPD
- Herlyne Ayu Dyah dan Agus Satmoko Aji, 2013, *Partisipasi Politik Mahasiswa dalam pemilihan umum raya jurusan tahun 2013 sebagai upaya pembentukan kehidupan demokratis Dilingkungan PMPKN FIS UNESA*, Jurnal kajian Moral dan Kewarganegaraan No 1 Volume 3 Tahun 2013
- Huntington, Samuel P, dan Nelson, Joan.1994, *Partisipasi politik di Negara Berkembang*, Jakarta: Rineka Cipta
- Kadir, Abdul, 2013, *Peranan Partai Politik dalam Menanggulangi Golongan Putih ( Golput ) Pada Pemilihan Legislatif* , Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Sosial Politik UMA Volume 1 tahun 2013
- Laonia Lololo, 2018 , *Partisipasi Politik Pemilih Pemula dalam bingkai jejaring sosial di media sosial*, Jurnal ASPIKOM Volume 3 nomor 4 Januari 20018
- Larry Diamond, 2008, *Democratic Development and Economi, Development Linkages and policy Imperatives*”, yang disampaikan pada International IDEA Democracy round table in partnership with CSDS, New Delhi 17-18 juni 2008
- Morissan, 2016, *Tingkat Partisipasi politik dan Sosial Generasi Muda Pengguna Media Sosial*, Jurnal Visi Komunikasi Volume 15 No 1 2016
- Nursal, Adman, 2004, *Political Marketing, Strategi memenangkan pemilu, Sebuah pendekatan baru kampanye Pemilihan DPR, DPD dan Presiden*, Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama
- Pahmi Sy, 2010, *Politik Pencitraan*, Jakarta : Gaung Persada Press

- Rahmad, Fatah Abd, 2009, *Melek Politik, Nohsaketa*
- Rahman A 2007, *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta : Graha ilmu
- Rasalli Wilda, 2018, *Budaya Politik dan Kualitas Demokrasi dalam pilkada 2015-2020 ( Studi pada pemilihan kepala daerah serentak pertama di Indonesia*, Jurnal politik Universitas Wirajaya Sumenep
- Ritzer, George, 2012, *Teori Sosiologi Dari Sosiologi Klasik sampai Perkembangan Terakhir Post Modern*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar
- Rosalia W, 2015, *Analisa Melek Politik Warga Pada Pemilu Legislatif Tahun 2014 Studi Kasus desa JerukWudel Dan Desa Karangawen Kecamatan Girisobo Kabupaten Gunungkidul DIY*, Jurnal Politik
- Soekanto, Soerjono, 2009, *Sosiologi keluarga tentang Ikhwal Keluarga, Remaja dan Anak-Anak*, Bandung : Alfabeta
- Verba, Nie & Kim J-O, 1978, *Participation and Political Equality*, Canadian Journal of Political Science, Vol 13(1)
- Winarno, 2013, *Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan : Isi, Strategi dan Penilaian*, Jakarta : Bumi Aksara
- Zamharsari, 2017, *Building Beginer Voter's Interest in Political Participation in Indonesia election*, International Conference of Democracy Accountability and Governance ( ICODAG ) Vol 163.

**STRATEGI GURU DALAM MENINGKATKAN KEMAMPUAN  
BERPIKIR TINGKAT TINGGI ATAU *HIGHER ORDER THINKING  
SKILLS (HOTS)* PESERTA DIDIK MATA PELAJARAN PPKn  
(Studi Kasus di SMK Negeri 1 Karanganyar)**

Ratih Nur Indah Sari  
Progam Studi PPKn Universitas Sebelas Maret, Surakarta  
Email: [ratihnur98@student.uns.ac.id](mailto:ratihnur98@student.uns.ac.id)

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi guru dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau *Higher Order Thinking Skills (HOTS)* peserta didik mata pelajaran PPKn di SMK Negeri 1 Karanganyar. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi pustaka. Adapun informan dalam penelitian ini adalah satu orang guru PPKn yang sudah menerapkan pembelajaran HOTS di SMK N 1 Karanganyar. Keabsahan data diuji dengan triangulasi data, kemudian data yang diperoleh dianalisis dengan model analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menyebutkan strategi guru PPKn dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) dibagi menjadi tiga yaitu perencanaan, pelaksanaan dan penilaian/evaluasi.

**Kata Kunci** : Strategi Guru, PPKn, HOTS

**ABSTRACT**

*The purpose of this study was to find out the teacher's strategies in improving high-level thinking skills or Higher Order Thinking Skills (HOTS) of PPKn subjects in SMK 1 Karanganyar. This research method uses a qualitative approach with descriptive analysis with data collection techniques in the form of interviews and literature. The informants in this study were one PPKn teacher who had applied HOTS learning at Karanganyar N 1 Vocational School. The validity of the data was tested by triangual data, then the data obtained were analyzed by interactive analysis models developed by Miles and Huberman through data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study mention the PPKn teacher strategies in improving high-level thinking skills (HOTS) are divided into three, namely planning, implementation and evaluation.*

**Keywords:** *Teacher Strategy, PPKn, HOTS*

**PENDAHULUAN**

Dunia saat ini sedang menghadapi perubahan industri ke-4 atau yang dikenal dengan industri 4.0. Pada revolusi industri ini terjadi lompatan besar dalam sektor industri dimana teknologi informasi dan komunikasi serta digitalisasi

dimanfaatkan sepenuhnya. Perubahan tersebut juga terjadi dibidang pendidikan yaitu standar dalam kinerja pendidikan terjadi seiring dengan perkembangan Teknologi, Informasi Komunikasi (TIK) serta pertumbuhan ekonomi global (Kang, Kim & You, 2012).

Dalam menghadapi hal tersebut diperlukanlah upaya dan strategi untuk menghadapi industri 4.0, tidak terkecuali dalam bidang Pendidikan. Pemerintah sendiri memiliki strategi dengan menginisiasi perwujudan pembelajaran abad ke 21 dengan implementasi *Higher Order Thinking Skills* (HOTS). HOTS diharapkan dapat menjawab permasalahan pendidikan saat ini dan mengarah pada perbaikan sistem pendidikan demi menciptakan generasi yang berkarakter, mampu memahami jati diri bangsanya serta memiliki kemampuan dan pengetahuan yang unggul sehingga dapat bersaing di dunia internasional (Sofyan Ali, Fuaddilah, 2019)

Salah satu cara untuk mengembangkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang dikenal dengan *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) adalah melalui strategi guru dalam mengelola pembelajaran di kelas. Hal ini dikarenakan proses pembelajaran di kelas merupakan proses yang di dalamnya terdapat kegiatan interaksi antara guru dan peserta didik serta terdapat komunikasi timbal balik dengan situasi yang edukatif sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai (Rustaman, 2001).

Kompetensi seorang guru sangat berpengaruh serta berperan penting dalam meningkatkan mutu pendidikan terutama di era global saat ini. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa : “Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang

diperoleh melalui pendidikan profesi.”

Kompetensi guru khususnya untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) dalam hal ini adalah kompetensi pedagogik. Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen dijelaskan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan seorang guru dalam mengelola proses pembelajaran yang berhubungan dengan peserta didik, meliputi pemahaman wawasan atau landasan kependidikan, pemahaman terhadap peserta didik, pengembangan kurikulum dan silabus, perancangan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran yang mendidik dan dialogis, pemanfaatan teknologi pembelajaran, evaluasi hasil belajar, dan pengembangan peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimilikinya.

Akan tetapi kompetensi guru yang seharusnya dimiliki oleh guru patut dipertanyakan ketika dihadapkan dengan realita terkait data Uji Kompetensi Guru (UKG) di Indonesia yang masih jauh untuk menghadapi abad ke 21 tersebut. Menurut data Uji Kompetensi Guru (UKG) tahun 2015, rata-rata nilai UKG nasional adalah 53,02, sedangkan pemerintah menargetkan rata-rata nilai di angka 55. Selain itu rerata nilai profesional 54,77, sedangkan nilai rata-rata kompetensi pedagogik 48,94. (Wurinanda, 2015)

Ditambah lagi menurut Balitbang, Depdiknas (2018), guru-guru yang layak mengajar untuk tingkat TK sebesar 60,61%; SLB 88, 67%; SD 85,99%; SMP 93, 16%; SMA 97,39%; dan SMK 94, 55 %. Kenyataan empiris yang dapat kita lihat di era global ini ternyata

Indonesia masih banyak guru yang belum berpendidikan S1, berarti mereka belum mampu memenuhi ketentuan Pasal 46 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen yang menyebutkan bahwa seorang guru harus memiliki kualifikasi akademik minimum S-1 atau D-4.

Kemampuan berpikir tingkat tinggi atau *Higher Order Thinking Skills (HOTS)* dapat dibentuk dalam pengintegrasian dalam proses pembelajaran. Salah satunya yaitu dalam mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). PPKn menduduki peran penting dalam dunia pendidikan karena menjadi dasar pemahaman peserta didik terkait negara dan warga negaranya. Mata Pelajaran PPKn merupakan mata pelajaran yang berhubungan dengan fenomena dalam persamaan kedudukan warga negara tanpa membedakan ras, agama, gender, golongan, budaya, dan suku oleh karena itu siswa diharapkan melakukan pembelajaran yang kontekstual, melihat dari fenomena-fenomena yang dilakukan oleh masyarakat kemudian peserta didik diajak untuk melakukan atau membuat suatu pemecahan masalah yang terjadi di dalam masyarakat sekitar. (Elok Kristina & Oksiana, 2015)

Di era global ini pentinglah peserta didik untuk memiliki kemampuan berpikir tingkat tinggi atau *Higher Order Thinking Skills (HOTS)*. Pentingnya penguasaan keterampilan berpikir tingkat tinggi terdapat dalam beberapa poin Standar Kompetensi Lulusan Sekolah Menengah. Poin yang diharapkan yaitu siswa dapat membangun dan menerapkan informasi atau pengetahuan secara

logis, kritis, dan inovatif; menunjukkan kemampuan berpikir logis, kritis, kreatif, dan inovatif dalam pengambilan keputusan; serta menunjukkan kemampuan menganalisis dan memecahkan masalah kompleks (Permendiknas No. 23 Tahun 2006)

Dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau *Higher Order Thinking Skills (HOTS)* tersebut diharapkan peserta didik nantinya memiliki skill yang baik sehingga dapat bersaing dan siap menghadapi revolusi industri 4.0. Maka dari itu peran dan strategi guru menjadi sangat penting dalam menciptakan atau bahkan meningkatkan kemampuan peserta didik khususnya dalam berpikir tingkat tinggi atau HOTS. Guru harus memiliki pengetahuan dan keahlian untuk menunjang pekerjaannya, sehingga dapat mengembangkan keterampilan berpikir tingkat tinggi peserta didik. (Aydin & Yilmaz, 2010).

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan di atas, maka penelitian ini ingin mengkaji terkait strategi guru dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS peserta didik mata pelajaran PPKn di SMK Negeri 1 Karanganyar.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa wawancara dan studi pustaka. Adapun informan dalam penelitian ini adalah satu orang guru PPKn yang sudah menerapkan pembelajaran HOTS di SMK N 1 Karanganyar. Keabsahan data diuji dengan triangulasi data, kemudian data yang diperoleh dianalisis

melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Artikel ini ditunjang dengan berbagai literatur yang bersumber dari jurnal penelitian, buku referensi, modul, internet, dan sumber lainnya yang relevan dengan topik tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kemampuan berpikir tingkat tinggi atau *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) sangat penting dimiliki oleh peserta didik, karena dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) ini diharapkan peserta didik dapat menentukan serta menyeleksi berbagai macam informasi dari berbagai informasi yang didapat, untuk merespons informasi tersebut dalam perilaku kreatif dan logis, menolaknya, menganalisis serta yang terakhir adalah menarik kesimpulan serta dapat melakukan pemeliharaan informasi. Seorang peserta didik sendiri dikatakan telah memiliki keterampilan berpikir tingkat tinggi (HOTS) ketika dia tahu bagaimana menggunakan keterampilan berpikir kritis serta kreatif (Heong et al., 2011)

HOTS sebaiknya diterapkan pada semua mata pelajaran, jadi tidak hanya diterapkan pada mata pelajaran tertentu seperti yang banyak perhitungan seperti matematika atau fisika saja. Hal ini agar peserta didik mampu membiasakan diri serta dapat menerapkan berpikir tingkat tinggi dalam kehidupan sehari-hari, tidak terkecuali dengan mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn). Penerapan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) pada mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) memang

tidak kalah penting. Hal ini seperti yang diutarakan oleh guru PPKn SMK N 1 Karanganyar yaitu SK “Dengan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) tersebut peserta didik tidak hanya terfokus pada hafalan saja akan tetapi peserta didik dapat belajar untuk memahami mata pelajaran PPKn secara menyeluruh baik dari materi, studi kasus serta dapat memberikan solusi terkait permasalahan atau kasus yang ditemui.” Dengan berpikir tingkat tinggi (HOTS) ini peserta didik pun dapat memahami secara mendalam materi yang didapatkan serta dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

HOTS adalah kegiatan yang melibatkan tingkat kognitif hirarki tinggi pada berpikir taksonomi yang diusulkan oleh Bloom yang meliputi keterampilan menganalisis, mengevaluasi, dan menciptakan (Anderson & Krathwohl, 2015; Shukla & Dungsungnoen, 2016). Dalam taksonomi bloom sendiri terdapat 6 kemampuan yaitu mengingat, memahami, menerapkan, menganalisis, mengevaluasi dan menerapkan. Mengingat, memahami, menerapkan merupakan termasuk kemampuan berpikir tingkat rendah sedangkan menganalisis, mengevaluasi dan menciptakan merupakan kemampuan berpikir tingkat tinggi atau HOTS. (Moore & Stanley, 2010).

Tujuan utama dari *Higher Order Thinking Skills* (HOTS) adalah meningkatkan kemampuan berpikir peserta didik pada level yang lebih tinggi, terutama yang berkaitan dengan kemampuan untuk berpikir secara kritis dalam menerima berbagai jenis informasi, berpikir kreatif dalam memecahkan masalah menggunakan pengetahuan yang

yang dimiliki serta membuat keputusan dalam situasi-situasi yang kompleks (Saputra, 2016). Selain itu kemampuan berpikir kritis sangat bermanfaat bagi peserta didik antara lain : (1) membantu memperoleh pengetahuan, memperbaiki teori, memperkuat argumen; (2) mengemukakan dan merumuskan tujuan dengan jelas; (3) mengumpulkan, menilai, dan menafsirkan informasi dengan efektif; (4) membuat kesimpulan dan menemukan solusi masalah berdasarkan alasan yang kuat; (5) membiasakan berpikiran terbuka; dan (6) mengkomunikasikan gagasan, pendapat, dan solusi dengan jelas kepada orang lain (Bhisma Murti, 2011).

Maka dengan hal tersebut, HOTS perlu dikembangkan kepada peserta didik. Menurut Edward de Bono (dalam Moore & Stanley, 2010) menyatakan bahwa kecerdasan adalah bersifat bawaan sedangkan berpikir adalah suatu yang dapat dipelajari dengan strategi tertentu. Strategi seorang guru menjadi sangat penting dalam peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Strategi pembelajaran adalah cara-cara yang akan dipilih dan digunakan oleh guru untuk menyampaikan materi pembelajaran sehingga akan memudahkan peserta didik menerima dan memahami materi pelajaran, yang akhirnya tujuan pembelajaran dapat tercapai. (Uno, 2014). Sedangkan upaya untuk meningkatkan berpikir tingkat tinggi peserta didik tidak hanya berpusat pada peserta didik akan tetapi juga berpusat pada guru (Zerihun et al, 2012;. Noor, 2009; Sunal & Haas, 2005; Zohar, 2004) dalam (Harry Yusmanto, et al., 2017). Maka dari itu peran guru menjadi sangat

penting dalam membantu meningkatkan berpikir tingkat tinggi di kelas.

Di Indonesia, proses pembelajaran mengacu pada standar proses yang terdiri dari perencanaan, pelaksanaan, hasil evaluasi, dan belajar proses pemantauan (Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016). Hal tersebut sesuai dengan peran seorang guru dalam mengembangkan HOTS bagi peserta didik adalah dalam perencanaan, pelaksanaan serta penilaian yang serius dan konsisten dilakukan. (Adnan, Abdullah, Ahmad, Nawi, & Ismail, 2017; Afandi, Sajidan, Akhyar, & Suryani, 2018; Le 2013; Shukla & Dungsungnoen 2016; Yeung, 2015) dalam (Siti Ramdiah, et al., 2019).

#### *Perencanaan Pembelajaran*

Narasumber mengakui bahwa ia telah menyusun RPP untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS). Hal tersebut sesuai pengakuannya dalam wawancara tanggal 15 April 2019 “Dalam tahap perencanaan saya sudah menerapkan HOTS yaitu dalam tujuan serta penilaian soal sudah ada pada tahap HOTS yaitu tingkatan C4 keatas”. Menurut Susilo dalam Komara (2018) menyebutkan bahwa kemampuan untuk menyusun RPP tersebut seorang guru harus mampu mengkombinasikan antara target yang diminta dengan kurikulum nasional dan dalam hal ini adalah seorang guru harus dapat menyusun RPP untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS).

Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran atau biasa disebut RPP merupakan rencana yang

menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai suatu tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran yang baik untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi sendiri yaitu harus disusun bagaimana rencana dan pelaksanaan pembelajaran yang dapat menghasilkan level belajar yang tinggi bagi setiap siswa dan apa yang perlu dipelajari peserta didik di sekolah dalam waktu terbatas (Anderson dan Karthwohl, 2015)

Untuk perumusan RPP ini yang mengarah pada peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik adalah dapat dilihat dari tujuan pembelajaran yang dibuat. Dalam taksonomi bloom, sebagaimana yang menjadi indikator kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) adalah pada tingkatan C4 keatas atau dalam tahapan kemampuan menganalisis, mengevaluasi, dan mencipta (Anderson dan Karthwohl, 2015)

#### *Pelaksanaan Pembelajaran*

Dalam pelaksanaan pembelajaran, narasumber juga sudah menerapkan HOTS, SK mengatakan bahwa “Saya tidak melulu menggunakan metode ceramah saja yang mengakibatkan peserta didik menjadi pasif. Akan tetapi saya juga menggunakan metode pembelajaran yang dapat meningkatkan tingkat berpikir tingkat tinggi (HOTS). Salah satu metode yang saya gunakan adalah metode pembelajaran *talking stick*, ini merupakan salah satu strategi saya untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik”. Kemudian narasumber menambahkan bahwa

“biasanya sesekali peserta didik saya ajak ke Taman Pancasila yang lokasinya tidak berjauhan dengan lokasi sekolah. Disana peserta didik saya ajak untuk bermain dan belajar yang salah satunya yaitu menggunakan *talking stick* tersebut. Untuk penerapan metode pembelajaran *talking stick* ini adalah *Pertama* adalah menyiapkan *stick* yang di dalamnya sudah ada soal tentang materi PPKn yang harus dijawab oleh peserta didik, kemudian *stick* diputar atau disalurkan kepada peserta didik secara bergantian sambil bernyanyi lagu kebangsaan, setelah lagu berhenti maka peserta didik yang memegang atau mendapatkan *stick* harus menjawab pertanyaan di dalamnya.”

Dalam proses belajar mengajar narasumber juga sering mengadakan *pretest* untuk mengetahui pengetahuan awal peserta didik atau juga dapat untuk mereview materi sebelumnya. Sehingga guru dapat mengukur bahwa penyampaian materi yang dilakukan dapat berhasil diserap dan diterima baik oleh peserta didik atau tidak. Selain itu di tengah proses pembelajaran juga guru tidak jarang memberikan pertanyaan-pertanyaan secara lisan kepada peserta didik sehingga hal tersebut dapat melatih kemampuan menyampaikan pendapat dengan baik serta menimbulkan sikap percaya diri. Narasumber juga sering memotivasi peserta didik untuk aktif di kelas dengan mendapat tambahan nilai atau bahkan guru juga memberikan sejumlah uang untuk merangsang keaktifan peserta didik.

Pengertian dari pelaksanaan pembelajaran menurut Arifin (2010) adalah pelaksanaan dari strategi-strategi yang telah dirancang untuk

mencapai tujuan pembelajaran, dan dalam hal ini adalah salah satunya untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) peserta didik. Salah satu unsur yang tidak kalah penting dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) adalah penggunaan metode pembelajaran, karena kemampuan berpikir tingkat tinggi tidak sekedar menghafal saja akan tetapi juga kemampuan untuk menyampaikan kembali informasi yang diketahui.

Narasumber mengakui bahwa peserta didik sangat senang dengan metode pembelajaran tersebut. Selain proses pembelajaran menjadi menyenangkan peserta didik juga dapat memahami materi dengan mudah serta dapat meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) peserta didik. Hal tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang menyebutkan bahwa dalam meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) dalam hal ini memerlukan upaya terkait perubahan dalam organisasi kelas, penggunaan metode mengajar, strategi belajar mengajar serta sikap guru dan karakteristik dalam mengelola proses pembelajaran (Siti Ramdiah, dkk., 2019)

#### *Evaluasi/Penilaian Pembelajaran*

Dalam tahap penilaian/evaluasi narasumber sudah menerapkan penilaian HOTS yaitu salah satunya dokumen yang diberikan oleh narasumber adalah pada waktu Ulangan Harian Terpadu (UHT) 1, dimana soal yang diberikan sudah pada tahap HOTS yang tidak terpaku pada teori saja dan memerlukan penalaran atau dapat dikatakan sudah dalam tahap menganalisis, mengevaluasi dan

mencipta. Contoh soal HOTS pada UHT 1 mata pelajaran PPKn semester genap tahun pelajaran 2018/2019 yang sudah pada tahap HOTS antara lain : (1) Sebagai warganegara yang baik sudah sepantasnya bila kita turut serta dalam bela negara, dengan mewaspadaikan dan mengatasi berbagai macam ancaman, tantangan, hambatan, gangguan terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bagaimana kalian sebagai pelajar berpartisipasi dalam bela negara! (2) Dalam merajut kebersamaan dalam kebhinnekaan kalian semakin paham bahwa kebersamaan dalam perbedaan merupakan komitmen yang harus tetap dijaga dan dipelihara seluruh rakyat Indonesia. Coba kalian identifikasi perilaku masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian dalam mendukung kebersamaan kebhinnekaan!.

Contoh soal tersebut dapat dilihat bahwa sudah berbasis HOTS, soal tidak lagi hanya pada batas tingkatan C1 ataupun C2 yang hanya terbatas pada mengecek hafalan peserta didik. Akan tetapi sudah pada tahap menganalisis, sehingga peserta didik akan lebih kritis dan dapat meningkatkan daya berpikir tingkat tinggi peserta didik tersebut. Penilaian pembelajaran merupakan kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan (Masidjo, 1995). Selain itu dalam pengujian HOTS format item dapat berupa (1) seleksi, termasuk pilihan ganda, mencocokkan, dan pemeringkatan; (2) umum, termasuk

esai, jawaban singkat, dan tugas-tugas; (3) penjelasan, yang menuliskan alasan mengapa jawaban itu dipilih (Widihastuti, 2015)

Dalam peningkatan kemampuan berpikir tingkat tinggi, maka instrument soal yang dibuat harus sungguh-sungguh mencerminkan kemampuan berpikir tingkat tinggi yang memuat pertanyaan-pertanyaan sesuai dengan proses kognitif kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik. Selain itu, untuk mencapai tujuan meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik, maka format penilaian yang dilakukan harus sesuai dengan proses kognitif kemampuan berpikir tingkat tinggi itu sendiri yaitu kemampuan menganalisis, mengevaluasi dan mencipta. (Schraw, G., & Robinson, D. H., 2011).

Selain itu, walaupun mata pelajaran PPKn tidak termasuk dalam mata pelajaran Ujian Nasional (UN), akan tetapi PPKn termasuk dalam mata pelajaran yang masuk ke dalam Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) yang tidak mustahil ada bentuk soal HOTS. Soal USBN sendiri untuk SMK diluweskan yaitu dari Pusat menyerahkan kembali kepada guru. Pihak pemerintah pusat hanya membuat soal sebanyak 8-10 soal untuk soal pilihan ganda serta 1 soal essay, sisanya semua diserahkan kepada guru masing-masing. Sehingga soal dapat berbeda untuk tiap-tiap SMK. Hal ini berbeda dengan SMA, soal disamakan disemua SMA. Maka dari itu seorang guru PPKn pun juga harus memiliki kemampuan untuk membuat soal HOTS dan mengajarkan agar peserta didik mampu untuk berpikir tingkat tinggi (HOTS).

## **KESIMPULAN**

Strategi guru untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) peserta didik dibagi menjadi 3 yaitu pada tahap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi atau penilaian. *Tahap perencanaan*, seorang guru harus dapat memiliki kemampuan untuk membuat Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), komponen dalam RPP tersebut harus sudah termuat rencana-rencana untuk meningkatkan kemampuan peserta didik. Komponen tersebut antara tujuan pembelajaran, rencana kegiatan pembelajaran serta soal yang dibuat untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi peserta didik (HOTS). *Tahap pelaksanaan*, yaitu eksekusi atau implementasi dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yaitu seorang guru harus memiliki kreativitas untuk menggunakan metode, media bahkan pendekatan dalam Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) untuk meningkatkan kemampuan berpikir tingkat tinggi (HOTS) peserta didik. Contohnya adalah yang dilakukan oleh guru PPKn SMK Negeri 1 Karanganyar salah satunya adalah dengan menggunakan metode pembelajaran *talking stick*. *Tahap evaluasi/penilaian* yaitu seorang guru harus memiliki kemampuan untuk menyusun soal yang harus sudah pada tingkat C4 keatas yaitu menganalisis, mengevaluasi dan mencipta.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Anderson, L.W. dan Karthwohl, D.R. 2015. *Kerangka Pembelajaran, Pengajaran*

- dan Assesmen. Yogyakarta : Pustaka Belajar
- Arifin. 2010. *Evaluasi Pembelajaran*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya
- Aydin N., Ylmaz, A. 2010. The effect of constructivist approach in chemistry education on students' higher order cognitive skills. *Journal education* (39), 58
- Bhisma Murti. 2011. *Berpikir Kritis (critical thinking)* versi elektronik Power Point. Universitas Sebelas Maret.
- Depdiknas 2018
- Elok Kristiana & Oksiana. 2015. *Pengaruh Penggunaan Model Pembelajaran Problem Based Learning Terhadap Kemampuan Berpikir Kritis Siswa Pada Mata Pelajaran PPKn Kelas X Di SMAN 22 Surabaya*. Jurnal Kajian Moral dan Kewarganegaraan. Volume 02 Nomor 03 tahun 2015, 936-950
- Fuaddilah, Ali Sofyan. 2019. *Implementasi HOTS Pada Kurikulum 2013*. Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Fatah Palembang. Jurnal Inventa Vol 3 (1)
- Heong, YM, Othman, WB, Yunos, J. Bin, Kiong, TT, Hassan, R. Bin, Mohaffyza, M., & Mohamad, B. (2011). *Tingkat Marzano Higher Order Thinking Skills antara Teknis Siswa Pendidikan*, 1 ( 2).
- Kang, M., Kim M., Kim, B., & You, H. (n.d). *Developing an Instrumen to Measure 21st Century Skills for Elementary Student*.
- Komara, E. 2018. Penguatan Pendidikan Karakter dan Pembelajaran Abad 21. *Sipatahoenan: South ASEAN Journal For Youth, Sport and Healty Education*. Volume 4 (1), April. ISSN 2407-7348
- Masidjo. 1995. *Penilaian Pencapaian Hasil Belajar Siswa di Sekolah*. Yogyakarta : Kanisius
- Milles dan Huberman. 1992. *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Moore, B., & Stanly, T. 2010. *Pemikiran kritis dan penilaian formatif*. Larchmount, New York: Eye on Pendidikan, Inc.
- Permendiknas No. 23 Tahun 2006
- Ramdiah, Siti; dkk. 2019. *Understanding, Planning, and Implementation of HOTS by Senior High School Biology Teachers in Banjarmasin-Indonesia*. *International Journal*. ERIC
- Rustaman, N. 2001. *Ilmu dan Aplikasi Pendidikan*. Bandung : Inperial Bakti Utama
- Saputra, Hatta. 2016. *Pengembangan Mutu Pendidikan Menuju Era Global : Penguatan Mutu Pembelajaran dengan Penerapan HOTS (High Order Thingking Skills)*. Bandung : SMILE's Publishing
- Schraw, G., & Robinson, D. H. 2011. *Assessment of Higher Order Thinking Skills. Current Perspectives on Cognition, Learning and Instruction*. ERIC.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- Uno, H.B . 2014. *Model Pembelajaran: Menciptakan Proses Belajar Mengajar*

*Yang Kreatif dan Efektif.*  
Jakarta : Bumi Aksara

- Widihastuti. 2015. *Model Penilaian Untuk Pembelajaran Abad 21 :Sebuah Kajian Untuk Mempersiapkan SDM Kritis dan Kreatif.* Prosiding Seminar Nasional. Vol 10 Tahun 2015. Jurusan Pendidikan Teknik Boga dan Busana Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta
- Wurinanda, Iradhate. 2015. *Rata-rata Nilai UKG Di Bawah Standar.* (internet) Tersedia di <https://news.okezone.com>. Diakses pada tanggal 4 Maret 2019
- Yusmanto, Harry, dkk. 2017. *The Application of Carousel Feedback and Round Table Cooperative Learning Models to Improve Student's Higher Order Thinking Skills (HOTS) and Social Studies Learning Outcomes.* *International Journal.* ERIC

## **PENDIDIKAN KARAKTER BAGI WARGA NEGARA SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN *CYBERBULLYING***

Rika Setyorini

Program Studi PPKn Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Email: [rikasetyorini.98@student.uns.ac.id](mailto:rikasetyorini.98@student.uns.ac.id)

### **ABSTRACT**

*This study aims to determine the role of character education in combating cyberbullying. The method used is a qualitative approach that uses data collection techniques in the form of unstructured interviews and literature studies. The data analysis technique uses the Miles and Huberman model which consists of data reduction, data presentation and data verification. The results of the study show that 1) cyberbullying occurs because of the penetration of internet usage, the influence of peers and men have the same opportunity to do, 2) there is still traditional bullying in schools but the role of PPKn teachers is not maximized and only provides verbal advice. The conclusion of this study is that cyberbullying is a new type of crime when viewed from the media used, namely in the form of electronic media. The prevention of cyberbullying requires the role of teachers, especially PPKn teachers in providing character education in order to create wise characters in social media by providing examples that are in accordance with prevailing values and norms in the community, especially in implementing Pancasila and the 1945 Constitution. supervise the use of social media by children. So that cyberbullying behavior does not exceed the limits and students do not have to deal with the law.*

**Keywords:** *education, character, cyberbullying*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran pendidikan karakter dalam penanggulangan *cyberbullying*. Metode yang digunakan adalah dengan pendekatan kualitatif yang menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara tidak terstruktur dan studi literatur. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri atas reduksi data, sajian data dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) *cyberbullying* terjadi karena adanya penetrasi penggunaan internet, pengaruh teman sebaya dan laki-laki memiliki kesempatan yang sama untuk melakukan, 2) masih terjadi *traditional bullying* disekolah namun peran guru PPKn belum maksimal dan hanya memberikan nasehat secara verbal. Simpulan dari penelitian ini adalah *cyberbullying* merupakan kejahatan jenis baru jika dilihat dari media yang digunakan yaitu berupa media elektronik. Penanggulangan *cyberbullying* diperlukan peran guru terutama guru PPKn dalam memberikan pendidikan karakter agar tercipta karakter bijak dalam bermedia sosial dengan memberikan keteladanan yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat terutama dalam menerapkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu peran keluarga dan pemerintah sangat diperlukan untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaan media sosial

oleh anak. Sehingga perilaku *cyberbullying* tidak melampaui batas dan siswa tidak harus berhadapan dengan hukum.

**Kata Kunci :** pendidikan, karakter, *cyberbullying*

## PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin pesat menimbulkan berbagai persoalan di berbagai bidang kehidupan. Salah satu persoalan yang juga menjadi sorotan adalah di bidang pendidikan. Penyebab utamanya adalah adanya dekadensi moral atau hilangnya karakter bangsa dari masyarakat (Muhtarom, 2017). Dalam dua puluh tahun terakhir ini perilaku warga masyarakat banyak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur. Khusus dunia pendidikan, perilaku menyimpang di kalangan pemuda/pelajar semakin meningkat (Kosim, 2011).

Menurut Koeseoma (2012) pendidikan karakter merupakan usaha sadar manusia untuk mengembangkan dinamika relasional antarpribadi berdasarkan nilai-nilai moral yang menghargai martabat manusia. Berdasarkan Pasal 4 Perpres No. 87 tahun 2017 tentang PPK (Penguatan Pendidikan Karakter) pendidikan karakter tersebut dapat diterapkan baik melalui pendidikan karakter di sekolah formal, informal, maupun non formal. Hal ini juga sebagai wujud dari tujuan pendidikan nasional yang diatur dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yaitu dalam mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.

Masifnya pengguna teknologi internet di Indonesia membawa angin segar bagi kemajuan teknologi bangsa akan tetapi disisi lain menjadi bumerang sendiri yang dapat mengancam dan menghancurkan generasi emas Indonesia (Atem, 2016). Menurut survei Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) jumlah pengguna internet tahun 2017 telah mencapai 143,26 juta jiwa atau setara 54,68 persen jumlah penduduk di Indonesia dengan penetrasi pengguna internet tertinggi berada pada usia 13-18 tahun yaitu 75,50 persen, hal ini berdampak pada penggunaan internet dan media sosial yang dilakukan peserta didik yang terus meningkat. Peningkatan penggunaan media sosial tersebut tidak dibarengi dengan kebijaksanaan dalam penggunaannya sehingga dapat menimbulkan perilaku *cyberbullying* (Fatria, 2018).

*Cyberbullying* yang terjadi pada kalangan remaja merupakan bentuk baru dari *bullying* yang terjadi karena rasio remaja pengguna internet terus meningkat dengan cepat, terutama di situs jaringan sosial atau media sosial, *chat room*, dan aplikasi pesan instan. Perilaku *cyberbullying* memiliki kesamaan dengan *traditional bullying* namun dampak *cyberbullying* lebih parah dibandingkan dengan *traditionald bullying* (Syah, Hermawati, 2018). Dampak dari *cyberbullying* adalah akan

menimbulkan kecemasan, ketidaknyamanan, prestasi di sekolah menurun, tidak mau bergaul, menghindari dari lingkungan sosial hingga upaya bunuh diri bagi si korban (Rifauddin, 2016).

Berdasarkan data UNICEF Indonesia tahun 2016, 41-51% remaja yang berusia 13-15 tahun pernah menjadi korban *cyberbullying*. Data KPAI tahun 2018 terkait persoalan di bidang pendidikan terkait pelanggaran anak terdapat 445 kasus yang terdiri atas kasus kekerasan fisik dan kekerasan seksual yang dilakukan pendidik, kepala sekolah dan peserta didik. Kasus *cyberbullying* dikalangan siswa juga meningkat secara signifikan mencapai 206 kasus per 21 Desember 2018 yang pada tahun 2015 kasus tersebut nol atau tidak ada laporan satu pun terkait *cyberbullying*.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pendidikan karakter dalam penanggulangan *cyberbullying* karena teknologi informasi yang terus berkembang dan tidak dapat dihindarkan maka perlu adanya

upaya di bidang pendidikan terutama oleh para praktisi pendidikan dalam membentuk karakter warga negara. Melihat semakin maraknya kejahatan yang sudah merambah di dunia *cyber* akibat dari digitalisasi maka pendidikan karakter sangat penting agar warga negara khususnya remaja sebagai generasi penerus bangsa tidak kehilangan moralitas dalam berperilaku di sekolah maupun di masyarakat. Berdasarkan pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan bagaimana peran pendidikan karakter sebagai upaya penanggulangan *cyberbullying*?

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa wawancara tidak terstruktur dan studi literatur. Teknik analisis data menggunakan model Miles and Huberman yang terdiri atas reduksi data, sajian data dan verifikasi data. Berikut karakteristik subyek penelitian, yaitu :

Tabel 1. Karakteristik Subyek Penelitian

No	Keterangan	Inisial narasumber	Usia	Jenis kelamin	Kelas
1.	Narasumber 1	LDP	14 th	Perempuan	IX
2.	Narasumber 2	VS	14 th	Perempuan	IX
3.	Narasumber 3	NN	17 th	Perempuan	XI
4.	Narasumber 4	CK	16 th	Laki-laki	X
5.	Narasumber 5	HKR	14 th	Laki-laki	IX

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkembangan teknologi saat ini semakin pesat dan memberikan kemudahan bagi

penggunanya untuk mengakses informasi melalui internet secara cepat. Penggunaan internet bahkan sampai menyentuh hampir

seluruh kalangan masyarakat baik dalam bidang komunikasi, ekonomi maupun sosial (Dewi, Afifah, 2018). Hal ini selaras dengan penggunaan internet yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan.

Pengaruh perkembangan teknologi informasi dan komunikasi tidak hanya memberikan dampak positif saja namun juga dapat berdampak negatif dengan terjadinya perubahan perilaku, etika, norma, aturan dan moral yang bertentangan dengan yang seharusnya. *Handphone* dan internet sebagai wujud perkembangan teknologi memiliki dampak bagi perkembangan kognitif dan perilaku siswa (Taopan dkk, 2019). Penelitian Khodijah dan Nurizzati (2018) terkait dampak penggunaan teknologi informasi di salah satu madrasah aliyah negeri menyebutkan bahwa terjadi perubahan perilaku sosial siswa pada saat menggunakan *handphone* di lingkungan sekolah. Penggunaan *handphone* disekolah pada waktu yang tidak tepat dapat berakibat pada sikap siswa yang tidak fokus pada saat belajar, siswa menjadi individualis dan menghiraukan lingkungan sekitar.

Data survei terkait penggunaan internet menunjukkan penetrasi pengguna internet tertinggi berada pada usia 13-18 tahun yang artinya pengguna tersebut merupakan anak-anak yang duduk di bangku SMP hingga SMA. Penetrasi yang tinggi menyebabkan Indonesia menempati populasi terbesar untuk *digital native* artinya bukan hanya sebagai pengguna saja

namun juga mampu membuat konten yang digunakan dalam berinteraksi di dunia maya (Supratman, 2015). Sehingga tidak mengherankan jika setiap orang memiliki akun media sosial lebih dari satu kepemilikan dan cenderung menggunakan akun palsu untuk disalahgunakan dengan tidak bertanggung jawab.

Lama penggunaan media sosial oleh lima narasumber sebagian besar mengatakan sekitar 5-6 jam per hari. Padahal menurut seorang psikoterapis asal California School of Professional Psychology, Philip Cushman menganjurkan untuk menggunakan media sosial setengah hingga satu jam per hari. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan fisik maupun mental anak. Anak-anak yang kecanduan media sosial memungkinkan untuk melakukan hal-hal beresiko tanpa berpikir panjang seperti memposting hal-hal yang tidak sepatutnya, berkomentar buruk, *body shaming* hingga melakukan *cyberbullying*.

Fenomena *cyberbullying* merupakan kejahatan jenis baru jika dilihat dari media yang digunakan yaitu berupa media elektronik. Faktor penyebab perilaku *cyberbullying* yang dilakukan oleh pelaku berasal dari keluarga, diri sendiri dan juga lingkungan (Pandie, Weismann, 2016). Hal tersebut terjadi karena kurangnya perlindungan digital, perlindungan diri dan perlindungan sosial. Mudahnya akses internet menyebabkan pelaku *cyberbullying* menjalankan aksinya dengan cepat yang dapat merugikan korban karena kurangnya perlindungan diri.

Meskipun sekarang sudah mulai muncul perlindungan terhadap akun-akun tertentu dengan menyalakan *private account* dan membatasi akses untuk semua orang baik pada saat akan menyampaikan pesan atau yang lain namun perilaku *cyberbullying* tidak semudah itu dicegah apalagi media sosial saat ini masih terus mengalami pengembangan dan dapat di *update* setiap saat.

Perilaku *cyberbullying* dapat dilakukan oleh siapa saja baik perempuan maupun laki-laki. Salah satu narasumber mengatakan “Yang melakukan *cyberbullying* di SMP ku itu kebanyakan cewek mbak, cowok biasanya cuma ngomong kasar kalau cewek geng-gengan, bully sosmed, musuhan di sosmed, ngomong kasar juga ada, banyak banget mbak. Sering juga buat status yang menghina teman lain” (HKR, siswa kelas IX). Penggunaan kata-kata kasar merupakan tindakan *cyberbullying* yaitu *cybertalking* yang artinya mengirim pesan kasar berulang kali menggunakan internet atau melalui ponsel (Siegle, 2010). Menghina teman melalui postingan dan musuhan di sosial media merupakan bentuk *flaming* yaitu bentuk perkelahian secara *online* menggunakan pesan elektronik dengan bahasa kasar, kata-kata penuh amarah, frontal dan vulgar seperti mengejek, memaki, dan menggossip (Willard, 2007).

Sedangkan narasumber lain mengatakan “Kebanyakan cowok mbak, temen cewek ada tapi jarang. Seringnya pake kata-kata kasar sih mbak biasanya di grup chat malah setiap hari gitu

temen-temen. Kalau posting status yang pake kata-kata kasar juga banyak. Itukan kan cuma bercanda” (CK, siswa kelas XI). Pelaku *cyberbullying* baik laki-laki maupun perempuan memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan tindakan mengintimidasi, menggunakan kata-kata kasar, maupun menghina teman melalui postingan secara *online*. Perilaku tersebut sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Rahmatan dan Ayunizar (2017) di Banda Aceh yang menyatakan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara perilaku *cyberbullying* yang dilakukan oleh remaja laki-laki maupun perempuan.

Selain itu, *bodyshaming* juga seringkali terjadi di sekolah. Salah satu responden mengaku pernah mengalami *bodyshaming* secara langsung maupun melalui media sosial di grup chat. “*Body shaming* yang aku alami ini termasuk pembulian secara langsung sih tapi dia juga kadang jelek-jelekin di sosmed sih tapi karena aku tipe orang yang cuek jadi terserah dia mau ngomong apa yang pasti aku tutup kuping buat orang yang nggak miror sama kejelekan dia sendiri” (NN, siswi kelas XI). Perilaku menghina, mempermalukan, merusak reputasi orang lain melalui media sosial merupakan bagian dari *cyberbullying* (Nurlaila dkk, 2015). Perilaku yang disengaja dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan melalui internet atau media sosial adalah perbuatan yang salah karena merugikan orang lain. Pada

akhirnya hal tersebut akan merugikan korban terutama dalam perkembangan emosi dalam dirinya yang menjurus pada hal-hal negatif.

Kelompok teman sebaya juga berpengaruh terhadap perilaku *cyberbullying* yang dilakukan oleh pelaku *cyberbullying*. Teman sebaya melalui interaksinya berpengaruh terhadap perilaku *cyberbullying* (Budiarti, 2016). Kecenderungan menjadi pelaku *cyberbullying* berhubungan secara positif dengan teman sebaya sehingga semakin tinggi kelompok teman sebaya maka semakin tinggi pula melakukan perilaku *cyberbullying* (Mawardah, Ardiyanti, 2014). Pengaruh kelompok teman sebaya ini secara tidak sadar dialami oleh korban *cyberbullying* karena merasa perilaku tersebut hanyalah bahan candaan sehingga korban tidak marah dan menganggap apa yang dilakukan oleh temannya adalah hal yang wajar. Apalagi hal tersebut dilakukan melalui media sosial yang artinya dilakukan secara tidak langsung. Remaja sekarang ini cenderung memilih berkomunikasi melalui media sosial yang lebih efektif dibandingkan dengan berkomunikasi secara langsung atau *face to face*.

Meskipun *cyberbullying* semakin berkembang, *tradisional bullying* yaitu perilaku *bully* atau menggertak teman yang lain secara langsung masih kerap terjadi. “Aku belum pernah mengalami *cyberbullying*, tapi kalau di *bully* di sekolah pernah. Malah sering, sama temenku terutama yang cowok. Pernah waktu itu tasku ditaruh diatas

genteng kelas, penghapus papan tulis ditempelin ke mukaku kan jadi hitam, kerudungku juga sering ditarik-tarik” (LDP, siswi kelas IX). “Kalau di *bully* disekolah pernah. Dulu pernah pas bersih-bersih kelas, tinernya diusapin ke muka aku sama kontak pensilku diobrak abrik” (VS, siswi kelas IX). Biasanya *bullying* secara langsung dilakukan oleh teman sekelas yang berinteraksi hampir setiap hari yang didasarkan pada alasan yang sama yaitu hanya bercanda padahal jika itu dilakukan terus menerus secara tidak langsung akan menyakiti hati korban hingga dapat berakibat pada trauma yang dialami korban.

Masifnya tindakan *cyberbullying* ini dapat berdampak buruk bagi perkembangan karakter dan perilaku siswa. *Cyberbullying* merupakan masalah multidimensi yang tidak dapat ditangani dengan solusi yang sederhana. Isu-isu ini memerlukan upaya dari pemangku kepentingan untuk melakukan pendidikan, pencegahan, dan pengawasan sebagai dasar untuk mengatasi masalah di sekolah (Hester, Fenn, 2014). Apabila tidak ada pencegahan maupun penanggulangan yang dilakukan oleh pihak yang bersangkutan seperti sekolah sebagai lembaga pendidikan yang mengajarkan karakter khususnya guru yang mendidik siswa dapat menyebabkan perilaku ini terus berkembang secara luas mengingat arus globalisasi yang kuat dan semakin maju. Karakter tersebut dapat disesuaikan dengan sikap manusia modern saat ini

dengan tidak meninggalkan nilai-nilai moral.

Guru bimbingan konseling dapat menjalankan tugasnya dalam hal menyelesaikan permasalahan tersebut namun guru PPKn juga memiliki andil untuk mengatasi permasalahan dengan memberikan pendidikan karakter bagi siswa yang bermasalah tersebut. Sesuai dengan tujuan Perpres No 87 tahun 2018, PPK dilaksanakan dengan menerapkan nilai-nilai Pancasila melalui pendidikan karakter yang meliputi nilai religius, jujur, toleran, disiplin, hingga bertanggung jawab. Sekolah juga dapat memberikan pelajaran mengenai pengenalan media seperti literasi media sehingga siswa memiliki pemahaman tentang dampak dan bahaya dari penggunaan media sosial yang pada akhirnya siswa mampu menggunakan media sosial dengan bijak.

Karakter diperlukan agar anak-anak terutama usia 13-18 tahun bijak dalam menggunakan media sosial. Karakter tersebut terbentuk karena memiliki tiga bagian yang saling berhubungan yaitu pengetahuan moral (*moral knowing*), perasaan moral (*moral feeling*) dan perilaku moral (*moral action*) (Lickona, 2012). Hal pertama yang perlu dimiliki adalah pengetahuan moral yang didapatkan pada pendidikan formal di sekolah. Peran guru terutama guru Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan sangat penting. Pembentukan karakter warganegara merupakan fungsi pendidikan kewarganegaraan sebagai pendidikan nilai (Winarno, 2014).

Setelah memiliki pengetahuan, selanjutnya muncul perasaan moral dimana tidak ada keinginan untuk melakukan hal-hal negatif yang mungkin merugikan orang lain. Perasaan tersebut diimplementasikan dalam bentuk perilaku moral.

Berdasarkan hasil wawancara menunjukkan jika guru PKn belum maksimal dalam mendidik karakter dan hanya memberikan nasihat secara verbal kepada siswa. "Guru PKn didik karakter belum maksimal" (CK, siswa kelas X). Hal ini berbanding lurus dengan penelitian Julia dan Supriyadi (2018) dari UPI terkait Implementasi Pendidikan Karakter pada Sekolah Menengah Atas di Sumedang menemukan bahwa tidak semua guru memahami konsep pendidikan karakter dan pendidikan karakter belum memiliki model atau desain yang spesifik yang dapat diajarkan kepada siswa. Kebanyakan guru menganggap pendidikan nilai selama proses belajar mengajar merupakan bentuk dari pendidikan karakter namun belum spesifik pada bentuk pembelajaran yang jelas.

Materi terkait *cyberbullying* dalam pembelajaran belum tersirat secara langsung. Teknologi biasa digunakan sebagai pendukung dalam pembelajaran sehingga guru PPKn cenderung hanya memberikan nasehat untuk bersikap bijak dalam menggunakan sosial media atau internet, "Kalau guru PKn ku juga pernah bilang mbak, hati-hati sama media sosial dan jangan sering-sering komen yang kurang baik karena lewat medsos sama

langsung gitu beda mbak, lebih sensitif, makanya dari diri kita sendiri dulu, lebih ngejaga dan nggak sembarangan gitu pake medsos” (NN, siswi kelas XI). Sehingga penggunaan media sosial dapat dilakukan tanpa menghilangkan etika.

Peran guru dalam memberikan pendidikan karakter untuk menanggulangi *cyberbullying* tidak hanya dilakukan oleh guru PKN saja melainkan kerjasama yang baik antara berbagai pihak yang ada baik keluarga, sekolah, dan pemerintah. Pemerintah sebagai pembuat kebijakan terkait pendidikan karakter dapat melakukan *cybertask* yaitu menentukan standar operasi pengendalian penggunaan internet (Jamun, 2018). Agar siswa tidak melakukan penyalahgunaan terhadap media sosial ataupun pada saat mengakses internet dan juga konten-konten yang disebarkan melalui internet tidak berdampak negatif bagi siswa.

Keluarga sebagai pihak pertama yang membentuk karakter anak berperan menurunkan perilaku *cyberbullying* dengan adanya kontrol dan pengawasan dari orang tua (Malihah, Alfiasari, 2018). Adanya sikap tegas orang tua dalam memberikan kepercayaan kepada anak dalam menggunakan media sosial dapat membentuk karakter anak menjadi bertanggung jawab. Anak yang biasa dibiarkan menggunakan media sosial secara bebas lebih susah diatur dibandingkan dengan anak yang diberikan waktu minimal satu hingga dua jam sehari dalam

mengakses internet. Sehingga perilaku *cyberbullying* dapat dicegah apabila orang tua memiliki kesadaran dan pemahaman tentang bahaya penggunaan internet secara berlebihan terlebih jika sudah mulai muncul perilaku *cyberbullying*. Sekolah sebagai pembentuk karakter siswa dapat menanggulangi anak-anak korban *bullying* maupun *cyberbullying* di sekolah dengan memberikan keteladanan berupa sikap dari guru yang mencakup sopan santun, menaati nilai dan norma yang berlaku di masyarakat.

Penanggulangan *cyberbullying* di beberapa negara maju sudah dilakukan dengan baik yaitu melalui program-program berbasis teknologi. Misalnya di Amerika Serikat, telah mendukung program online melalui *website* yaitu [www.stopcyberbullying.org](http://www.stopcyberbullying.org) yang berisi informasi tentang bagaimana mengidentifikasi *cyberbullying*, pencegahannya, dan bagaimana penanganannya jika itu terjadi pada diri kita. Selain itu untuk mengetahui informasi tentang *bullying* maupun *cyberbullying* dapat mengakses [www.stopbullying.gov](http://www.stopbullying.gov), i-SAFE Inc, CyberSmart, Nersmarta, dsb (Charles, et al, 2013). Adanya berbagai website yang dapat diakses guna mendukung pemahaman siswa terkait *cyberbullying* dapat membantu korban untuk menyuarakan apa yang dirasakan olehnya tanpa harus memendamnya sendiri. Hal tersebut menjadi contoh bagi Indonesia dalam mencegah adanya *cyberbullying* yang dapat

terjadi kapanpun, dimanapun dan oleh siapapun. Agar kasus-kasus *bullying* melalui *cyberspace* dapat diatasi melalui program-program online yang membantu para korban *cyberbullying*.

Apabila kasus *bullying* maupun *cyberbullying* telah melampaui batas wajar maka dapat ditindak oleh aparat hukum terkait karena melanggar UU ITE. *Cyberbullying* dalam hukum Indonesia dimasukkan ke dalam definisi pencemaran nama baik atau penghinaan tetapi dari definisi tersebut dirasa kurang memadai karena perilaku *cyberbullying* lebih dari hal tersebut. UU No 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik masih memiliki kelemahan-kelemahan karena dianggap tumpang tindih dan belum mengatur secara rinci dan jelas baik secara tertulis dan penerapannya terhadap *cyberbullying* (Waisnawa, 2017). Meskipun payung hukum untuk kasus *cyberbullying* khususnya anak sebagai korban dirasa kurang namun Pasal 27 ayat (3) UU ITE dapat digunakan sebagai acuan bagi para korban dan juga masyarakat yang ingin mengadakan kasus tersebut.

*Cyberbullying* tidak menutup kemungkinan dilakukan oleh orang dewasa meskipun kecenderungannya dilakukan oleh remaja yang memiliki penetrasi pengguna internet tertinggi dibanding usia di atasnya maka diperlukan perlindungan pula bagi korban yang masih anak-anak. Politik hukum pidana untuk *cyberbullying* terhadap anak juga didasarkan pada pasal 76 C jo dan Pasal 80 ayat (1) UU

Perlindungan Anak (Subaidah dkk, 2018). Hukum ini berlaku bagi pelaku yang melakukan tindakan *cyberbullying* terhadap anak dengan sanksi pidana penjara paling lama tiga tahun enam bulan dan/atau denda paling banyak Rp.72.000.000,-.

## KESIMPULAN

Globalisasi berkembang semakin pesat dengan pengguna internet yang semakin meningkat. Penggunaan internet yang dari tahun ke tahun semakin bertambah tidak hanya berdampak positif namun juga dapat menyebabkan dampak negatif seperti *cyberbullying*. Fenomena *cyberbullying* merupakan kejahatan jenis baru jika dilihat dari media yang digunakan yaitu berupa media elektronik. Penanggulangan *cyberbullying* diperlukan peran guru terutama guru PPKn dalam memberikan pendidikan karakter agar tercipta karakter bijak dalam bermedia sosial dengan memberikan keteladanan yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku dimasyarakat terutama dalam menerapkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu peran keluarga dan pemerintah sangat diperlukan untuk mengendalikan dan mengawasi penggunaan media sosial oleh anak. Sehingga perilaku *cyberbullying* tidak melampaui batas dan siswa tidak harus berhadapan dengan hukum.

## DAFTAR PUSTAKA

- Atem. 2016. *Ancaman Cyber Pornography Terhadap Anak-Anak*. Jurnal Moral Kemasyarakatan, Volume 1 No 2.

- Budiarti, A. I. 2016. *Pengaruh Interaksi dalam Peer Group terhadap Perilaku Cyberbullying Siswa*. Jurnal Pemikiran Sosiologi, Volume 3 No 1.
- Charles, dkk. 2013. *Cyberbullying : Resources for Intervention and Prevention*. Universal Journal of Educational Research, Volume 1 No 3.
- Dewi, N. K & Afifah, D. R. 2018. *Analisis Perilaku Cyberbullying Ditinjau dari Kemampuan Literasi Media Sosial*. Prosiding Seminar Nasional Hasil Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UNIPMA.
- Fatria, R. Q. 2018. *Gambaran Perilaku Cyberbullying Mahasiswa Universitas Pancasila*. Prosiding Konferensi Nasional Peneliti Muda Psikologi Indonesia, Volume 3 No 1.
- Hester, W & Fenn, W. L. 2014. *Transforming School Leadership and Stakeholders Perception Regarding Cyberbullying, Its Effects and Suggestions for Intervention*. Alabama Journal of Education Leadership, Volume 1.  
<http://apjii.or.id/>  
<http://hellosehat.com/>  
<http://www.kpai.go.id/>  
<http://www.unicef.org/>
- Jamun, Y. M. 2018. *Dampak Teknologi terhadap Pendidikan*. Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan Missio, Volume 10 No 1.
- Julia, J & Supriyadi, T. 2018. *The Implementation of Characters Education at Senior High School*. SHS Web OF Conference 42.
- Khodijah, S & Nurizzati, Y. 2018. *Dampak Penggunaan Teknologi Informasi dan Komunikasi terhadap Perilaku Sosial Siswa di MAN 2 Kuningan*. Jurnal Edueksos, Volume 7 No 2.
- Koesoema, D. 2012. *Pendidikan Karakter Utuh dan Menyeluruh*. Yogyakarta: Kanisius.
- Kosim, M. 2011. *Urgensi Pendidikan Karakter Karsa*, Volume 111 No 1.
- Lickona, T. 2012. *Mendidik untuk Membentuk Karakter : Bagaimana Sekolah dapat Memberikan Pendidikan tentang Sikap Hormat dan Tanggung Jawab*. Terjemahan oleh Juma Abdu Wamaungo. Jakarta : Bumi Aksara.
- Malihah, Z & Alfiasari. 2018. *Perilaku Cyberbullying pada Remaja dan Kaitannya dengan Kontrol Diri dan Komunikasi Orang Tua*. Jurnal Ilmu Keluarga dan Konsumen, Volume 11 No 2.
- Mawardah, M & Adiyanti, MG. 2014. *Regulasi Emosi dan Kelompok Teman Sebaya Pelaku Cyberbullying*. Jurnal Psikologi, Volume 41 No 1.
- Muchtarom, M. 2017. *Pendidikan Karakter Bagi Warga Negara Sebagai Upaya Mengembangkan Good Citizen*. Jurnal PKN

- Progresif, Volume 12 No 1.
- Nurlaila, dkk. 2015. *Kepribadian Indonesia Unggul Untuk Mencegah Cyber Bully Akibat Kampanye Politik Ditinjau Dari UU ITE*. Jurnal CICES Volume 1 No 1.
- Pandie, M. M & Weismann, I. T. J. 2016. *Pengaruh Cyberbullying di Media Sosial Terhadap Perilaku Reaktif sebagai Pelaku maupun sebagai Korban Cyberbullying pada Siswa Kristen SMP Nasional Makassar*. Jurnal Jaffray, Volume 14 No 1.
- Perpres No 87 tahun 2017 tentang Penguatan Pendidikan Karakter.
- Rahmatan, R & Ayunizar, S. R. 2017. *Cyberbullying pada Remaja SMA di Banda Aceh*. Jurnal Insight Fakultas Psikologi Universitas Muhammadiyah Jember, Volume 13 No 2.
- Rifauddin, M. 2016. *Fenomena Cyberbullying pada Remaja*. Jurnal Ilmu Perpustakaan, Informasi dan Kearsipan Khizanah Al Hikmah, Volume 4 No 1.
- Siegle, D. 2010. *Cyberbullying and Sexting : Technology Abuses of the 21<sup>st</sup> Centur*. Gifted Child Today, Volume 33 No 2.
- Subaidah, dkk. 2018. *Cyberbullying pada Anak dalam Perspektif Politik Hukum Pidana : Kajian Teoritis tentang UU No. 11 tahun 2008 tentang ITE Sebagaimana Diubah dengan UU No. 19 tahun 2016*. Dinamika Sosial Budaya, Volume 20 No 2.
- Supratman, L. P. 2018. *Penggunaan Media Sosial oleh Digital Native*. Jurnal Ilmu Komunikasi, Volume 15.
- Syah, R & Hermawati, I. 2018. *Upaya Pencegahan Kasus Cyberbullying bagi Remaja Pengguna Media Sosial di Indonesia* Jurnal PKS, Volume 17 No 2.
- Taopan, dkk. 2019. *Dampak Perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi Terhadap Perilaku Moral Remaja di SMA N 3 Kota Kupang*. Jurnal Kependidikan : Jurnal Hasil Penelitian dan Kajian Kepustakaan di Bidang Pendidikan, Pengajaran dan Pembelajaran, Volume 5 No 1.
- UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- UU No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Waisnawa, G. A. 2017. *Kebijakan Formulatif Pengaturan Cyberbullying sebagai Salah Satu Bentuk Tindak Pidana Cybercrime di Indonesia*. Jurnal Magister Hukum Udayana Volume 6 No 4.
- Willard, N. E. 2007. *Cyberbullying and Cyberthreats : Responding to The Challenge of Online Social Aggression*,

*Threats, and Distress.*  
Research Press.

Winarno. 2014. *Pembelajaran  
Pendidikan  
Kewarganegaraan : Isi,  
Strategi dan Penilaian.*  
Jakarta : PT Bumi Aksara.

## **UPAYA HIMPUNAN MAHASISWA PRODI (HMP) PPKN DEMOKRATIA DALAM PEMBENTUKAN SIKAP DEMOKRATIS PENGURUS**

Tesih Lestari  
Prodi PPKn Universitas Sebelas Maret, Surakarta  
Email: [tesihlestari98@student.uns.ac.id](mailto:tesihlestari98@student.uns.ac.id)

### **ABSTRACT**

*The purpose of this study is to: 1) describe how to build democratic attitudes of the HMP PPKn Demokratia management, 2) describe the obstacles in building democratic attitudes, 3) describe the efforts made to overcome obstacles in building democratic attitudes. The method used in this research is qualitative method. Data collection techniques used were interviews, observation, and document studies. In the process of analyzing data using four components, namely data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing. The results of this study are: 1) The involvement of students in the activities of meetings, discussions, and following work programs is a media that can foster the birth of students who have democratic attitudes. 2) obstacles in building democratic attitudes, namely budget constraints and regeneration factors. 3) to overcome these barriers by establishing partnerships and conducting work programs that have the character of family members.*

**Keyword :** Prodi Student Association (HMP), Democratic Attitude

### **ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini untuk: 1) mendeskripsikan tentang bagaimana membangun sikap demokratis pengurus HMP PPKn Demokratia, 2) mendeskripsikan hambatan dalam membangun sikap demokratis, 3) mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam membangun sikap demokratis. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan studi dokumen. Dalam proses menganalisis data menggunakan empat komponen, yaitu pengumpulan data, reduksi data, sajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini yaitu: 1) Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan rapat, diskusi, dan mengikuti program kerja merupakan media yang dapat menumbuhkannya lahirnya mahasiswa yang memiliki sikap demokratis. 2) hambatan dalam membangun sikap demokratis yaitu keterbatasan anggaran dan faktor kaderisasi. 3) untuk mengatasi hambatan tersebut dilakukan dengan cara menjalin kemitraan dan mengadakan program kerja yang sifatnya mengeratkan kekeluargaan pengurus.

**Kata kunci :** Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP), Sikap Demokratis

### **PENDAHULUAN**

Tujuan pendidikan nasional telah ditentukan oleh setiap negara di dunia yang mana dituangkan di dalam konstitusi suatu negara. Tujuan pendidikan nasional Indonesia termuat di dalam Undang-Undang

sistem Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003 yaitu pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang

Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mencapai warga negara yang demokratis, kritis terhadap perkembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta bertanggungjawab terhadap dirinya, lingkungan, bangsa dan negaranya (Pasal 3).

Menurut Trilling dan Fadel (dalam Samani & Hariyanto, 2013), ada tiga macam kategori keterampilan yang diperlukan pada abad ke-21 ini, meliputi: 1) keterampilan belajar dan inovasi yang meliputi: berpikir kritis dan pemecahan masalah, komunikasi dan kolaborasi, serta kreativitas dan inovasi, 2) kecakapan melek digital yang meliputi: melek informasi, melek media, dan melek teknologi informasi dan komunikasi (ICT), dan 3) kecakapan hidup dan kecakapan karier yang meliputi: keluwesan dan menyesuaikan diri, interaksi sosial dan interaksi lintas budaya, produktivitas dan akuntabilitas, kepemimpinan dan tanggungjawab.

Sikap demokratis warga negara diperlukan supaya warga negara mempunyai kemampuan untuk menyesuaikan diri, bersikap menghargai, terbuka terhadap dinamika perbedaan baik perbedaan pemikiran, identitas suku, ras, agama maupun terhadap identitas bangsa yang berbeda. Sikap demokrasi pada anak Indonesia tentu tidak muncul begitu saja. Keterampilan sikap demokratis anak Indonesia merupakan hasil dari adanya proses pendidikan. Kebutuhan pendidikan demokrasi di banyak negara untuk membentuk warga negara yang memiliki sikap yang demokratis menjadi sangat penting sebagai solusi dari permasalahan dunia modern saat ini. Selanjutnya tujuan

dari adanya pendidikan demokrasi yaitu untuk membentuk keterampilan berpikir, menyatakan pikiran secara bebas, rapih, singkat, dan menghormati pikiran orang lain (Sanli & Altun, 2015).

Salah satu isu yang hangat dibicarakan saat ini adalah isu demokrasi. Sebagai contoh, misalnya konsep tentang demokrasi liberal, yang mana kebebasan individu sangat diagungkan, dimana setiap anak Indonesia menuntut kebebasan tersebut, hal ini justru merusak tatanan demokrasi Indonesia yang sudah ada sejak lahir dan berkembang dari karakteristik masyarakat gotong-royong. Bahkan konsep individualism yang merupakan salah satu ciri demokrasi liberal telah masuk dalam konsep Pendidikan Kewarganegaraan Asia (termasuk Indonesia), seperti yang disampaikan oleh Kennedy dan Fairbrother (dalam Samsuri, 2013) yang mengagungkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan Asia ditandai oleh nilai-nilai personal daripada nilai-nilai publik dan kewarganegaraan. Fadhilah & Nuraina (2011) menyatakan bahwa terbentuknya demokrasi dan perkembangannya di Indonesia harus diperkuat dengan faktor internal dari bangsa Indonesia sendiri yaitu dengan demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai budaya dan ideology politik Indonesia.

Warga negara yang memiliki dan menegakkan nilai-nilai demokrasi membuktikan bahwa warga negara tersebut memiliki sikap demokratis. Nilai-nilai demokrasi tersebut meliputi, toleransi, kebebasan mengemukakan pendapat, menghormati perbedaan pendapat, memahami keanekaragaman dalam masyarakat, terbuka dan komunikasi,

menjunjung nilai dan martabat kemanusiaan, percaya diri, tidak menggantungkan pada orang lain, saling menghargai, mampu mengekang diri, kebersamaan, dan keseimbangan (Zamroni dalam Winarno (2007)).

Pasal 13 (1) Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional disebutkan bahwa jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informasi yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Artinya, proses pendidikan tidak hanya didapatkan di dalam ruang kelas dengan segala kurikulum yang ada melainkan dapat berlangsung di luar kelas seperti dalam mengikuti kegiatan ekstrakurikuler. Aspek kegiatan dalam dunia perkuliahan, yaitu kegiatan intrakurikuler (akademik) dan kegiatan ekstrakurikuler (keaktifan dalam berorganisasi) menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari mahasiswa. Dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, menyebutkan bahwa kegiatan ekstrakurikuler dapat dilaksanakan melalui organisasi kemahasiswaan (Pasal 14).

Berdasarkan pernyataan seorang mahasiswa PPKn diketahui masih ada mahasiswa yang kurang demokratis. Selain itu, dari hasil pra observasi, peneliti melihat sikap mahasiswa PPKn UNS yang kurang demokratis yang ditandai oleh kurang berani menyampaikan pendapat, tidak memiliki nilai kejujuran yang tinggi, dan memaksakan kehendak, serta sikap kecenderungan untuk mengikuti pendapat orang lain. Namun peneliti juga menemukan fakta bahwa mahasiswa PPKn sebagiannya mengikuti organisasi

kemahasiswaan, seperti BEM, DEMA, HMP, dan lainnya.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan tentang bagaimana membangun sikap demokratis pengurus HMP PPKn Demokratis, mendeskripsikan hambatan di dalam membangun sikap demokratis, serta mendeskripsikan upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dalam membangun sikap demokratis. Manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah diperolehnya deskripsi nyata di lapangan tentang upaya HMP PPKn Demokratis dalam pembentukan sikap demokratis pengurus.

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan yang dikaji di dalam penelitian ini yaitu: 1) bagaimana membangun sikap demokratis pengurus HMP PPKn Demokratis?. 2) Apa hambatan di dalam membangun sikap demokratis? 3) Bagaimana upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut?

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Tempat penelitian yaitu Prodi PPKn FKIP UNS. Teknik pengumpulan data melalui wawancara dengan pengurus harian tetap (PHT) HMP PPKn Demokratis, observasi lapangan di sekretariat HMP PPKn Demokratis serta studi dokumen. Dalam proses menganalisis data, peneliti menggunakan empat komponen yaitu 1) pengumpulan data. 2) reduksi data dengan mengambil data-data yang terfokus dalam obyek yang diteliti. 3) sajian data berupa petikan wawancara yang berasal dari informan. 4) penarikan kesimpulan dilakukan dengan cara memilih data-data yang sering muncul dari

berbagai sumber dan metode yang telah dilakukan.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Hasil analisis menunjukkan bahwa keterlibatan mahasiswa dalam organisasi HMP dapat meningkatkan sikap demokratis pengurus. “Mahasiswa yang mengikuti HMP akan cenderung bersikap lebih demokratis” (RA, Kadept Kedisiplinan). Mahasiswa yang sebelumnya tidak pernah berani untuk berpendapat, sejak mengikuti HMP mulai berani mengungkapkan pendapatnya dan menghargai pendapat orang lain. Hasil penelitian ini didukung oleh hasil penelitian yang dilakukan oleh (Diarsih, Pitoewas, dan Nurmalisa, 2015) yang berjudul “Pengaruh Partisipasi pada Kegiatan Organisasi Siswa Intra Sekolah terhadap Sikap Demokratis Siswa” terhadap 59 responden siswa di SMA Negeri 1 Seputih Mataram Kabupaten Lampung Tengah bahwa terdapat pengaruh signifikan dengan kategori keeratan tinggi antara keterlibatan dalam organisasi terhadap sikap demokratis.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti diperoleh informasi bahwa Himpunan Mahasiswa Prodi (HMP) PPKn Demokratia berkontribusi di dalam pembentukan sikap demokratis pengurus HMP PPKn Demokratia. Sikap demokratis pengurus dapat dibentuk melalui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh setiap bidang. “Sikap demokratis pengurus HMP dapat terbentuk melalui kegiatan-kegiatan yang tertuang di dalam proker masing-masing bidang” (SD, Kadept Kesma). HMP PPKn Demokratia terdiri dari enam bidang dimana masing-masing bidang dikepalai oleh

seorang kepala bidang dan setiap bidang dibagi menjadi dua departemen yang dikepalai oleh kepala departemen. Dalam menjalankan program kerjanya, setiap bidang selalu mengadakan rapat bidang. Rapat bidang inilah yang nantinya akan membentuk sikap demokratis pengurus himpunan. Setiap pengurus berhak menyampaikan pendapatnya dan wajib menghargai pendapat orang lain. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri sikap demokratis yaitu setiap pengurus sudah mampu mengakui dan menganggap wajar adanya perbedaan. Perbedaan yang dimaksudkan disini yaitu baik perbedaan pendapat, perbedaan agama, dan perbedaan lainnya. Hal ini senada dengan hasil penelitian Palli & Gafur (2017) bahwa keterlibatan mahasiswa dalam aktifitas organisasi yang tersedia di kampus mempunyai hubungan yang signifikan dengan berkembangnya keterampilan berpikir kritis dan berkembangnya sikap demokratis mahasiswa. Hal ini memberikan gambaran bahwa organisasi mahasiswa tidak dapat dikesampingkan keberadaannya dalam lingkungan kampus demi menunjang tercapainya visi dan misi perguruan tinggi.

Pergantian pemimpin secara teratur juga mencirikan demokrasi. HMP PPKn Demokratia selalu mengadakan pergantian ketua yang dilakukan selama satu periode kepemimpinan. Watkins (1992) mengemukakan bahwa kepemimpinan berkaitan dengan anggota yang memiliki kekhasan dari suatu kelompok yang dapat dibedakan secara positif dari anggota lainnya baik perilaku, karakteristik pribadi, perilaku, dan kedudukan

seseorang dalam suatu kelompok. Pergantian ketua dilakukan melalui musyawarah mufakat. Selanjutnya, didalam menyelesaikan masalah atau persoalan sudah dilakukan secara damai dan melembaga. “Langkah awal ketika ada masalah yaitu dibicarakan dengan kepala bidang dan kepala departemen dahulu, jika belum dapat terselesaikan maka dilakukan rapat lengkap pengurus HMP” (RA, Kadept Kedisiplinan). Upaya yang dilakukan untuk menyelesaikan masalah dilakukan melalui pendekatan secara personal oleh kepala bidang dan kepala departemen. Jika masalah belum terselesaikan maka permasalahan tersebut akan dibawa kepada bidang pembinaan yang bertugas untuk membina. Rapat Harian Lengkap (RHL) adalah jalan terakhir jika permasalahan tersebut belum bisa diselesaikan oleh bidang pembinaan.

Selanjutnya setiap pengurus dalam himpunan memiliki kesempatan mengemban tugas sebagai panitia dalam acara bidangnya. “Setiap bidang mempunyai proker yang berbeda dengan bidng lain, proker tersebut dijalankan dengan susunan kepanitiaan yang berbeda pula dengan proker yang lain. Hal tersebut dikarenakan setiap pengurus memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam proker tersebut” (SD, Kadept Kesma). Keterlibatan mahasiswa dalam kegiatan-kegiatan HMP seperti dalam rapat, diskusi, dan mengikuti semua proker HMP merupakan media yang dapat menumbuhkan lahirnya mahasiswa yang memiliki sikap demokratis. Bekoe, Kankam, Ayaaba dkk (2014) dalam hasil penelitian yang berjudul “*Teacher – Trainees Semse of Efficacy in*

*Students in Social Studies Lessons*” memberikan saran agar teknik keterlibatan siswa dalam bermain peran, diskusi, dan debat harus digunakan dalam pembelajaran ilmu sosial untuk membantu siswa menjadi pemikir kritis, pemecah masalah dan mampu menjadi generasi yang toleran.

Mahasiswa yang mengikuti kegiatan HMP dan mengikuti rapat juga menunjukkan kecenderungan untuk berpikir kritis. Terlebih jika ada suatu masalah yang sedang dihadapi dalam keberjalanan himpunan. Mahasiswa akan menyumbangkan ide-ide kritisnya untuk memecahkan masalah yang sedang dihadapi. “...mahasiswa biasanya akan berpikir lebih kritis dalam rapat, yang tadinya di kelas hanya diam dan biasa-biasa saja, tetapi jika sudah di himpunan berani menyampaikan pendapat dan kritis menanggapi masalah yang terjadi” (RA, Kadept Kedisiplinan). Hal ini senada dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Putra (2010) yang mengungkapkan bahwa ada hubungan kasual yang signifikan antara keterlibatan dalam organisasi dengan keterampilan berpikir kritis mahasiswa. Mahasiswa yang terlibat aktif dalam organisasi melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan akan membantu mahasiswa terampil dalam menggunakan pikirannya untuk menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Thompson (2011) mengungkapkan bahwa keterampilan berpikir kritis adalah keterampilan yang paling penting bagi pemecahan masalah.

Melalui HMP dapat terbentuk mahasiswa yang memiliki sikap demokratis seperti hidup toleran, percaya diri, tanggungjawab

terhadap tugasnya dan mampu bermusyawarah untuk mengambil keputusan yang bermanfaat. Winataputra (2012) mengungkapkan bahwa sikap demokratis peserta didik akan memberikan kontribusi yang bernilai bagi peningkatan kualitas demokrasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Keterlibatan mahasiswa dalam organisasi sangat bermanfaat bagi pembinaan dan pengembangan sikap demokratisnya. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Hemafitria, Octavia, & Novianty (2015) yang mengungkapkan bahwa mahasiswa mendapatkan suatu binaan sikap demokrasi di dalam suatu organisasi mahasiswa.

Faktor yang menghambat dalam kegiatan HMP yaitu terkait dengan faktor keuangan dan kaderisasi. Menurut Putu Indah (2018) selain berfungsi sebagai alat perencanaan, anggaran juga berfungsi sebagai alat pengendalian bagi manajemen guna melaksanakan kegiatan organisasi secara efektif dan efisien. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut yaitu dengan mengadakan dana usaha (danusan) yang dilakukan setiap hari minggu di CFD (*Car Free Day*). Selain itu jika ada kegiatan besar seperti proker olimpiade, civic festival maka dana berasal dari permohonan dana ke fakultas dan pengajuan proposal ke sponsor. Solusi lain yang dilakukan terkait dengan masalah keuangan yaitu menghubungi alumni sebagai donatur. Hal ini didukung oleh hasil penelitian Yayuk Hidayah (2017) bahwa faktor internal yang menghambat dalam meningkatkan *civic skills* aktivis BEM UNY yaitu keterbatasan sumber daya manusia, banyaknya program kerja, dan

keuangan. Selanjutnya upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut dengan cara perekrutan kader secara sistematis, mengutamakan program kerja, dan menjalin kemitraan. Terkait dengan permasalahan kaderisasi, bidang pembinaan mengadakan proker yang sifatnya mengeratkan kekeluargaan pengurus, contohnya melalui proker up grading.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa upaya himpunan mahasiswa prodi (HMP) PPKn Demokratia dalam membentuk sikap demokratis pengurus melalui kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan pada proker masing-masing bidang. Setiap acara yang diselenggarakan masing-masing bidang dibentuk kepanitian, sehingga setiap pengurus berkesempatan untuk mengemban amanah yang berbeda untuk proker yang berbeda pula. Sikap demokratis pengurus dapat tumbuh dalam kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan oleh masing-masing bidang. Misalnya dalam kegiatan rapat bidang, pengurus akan menunjukkan sikap demokratis dalam bentuk mengemukakan pendapat, menghargai pendapat pengurus lain, tidak memaksakan kehendak, melaksanakan hasil keputusan rapat dengan penuh tanggungjawab. Kemudian dalam kegiatan bidang lain dengan cara mensukseskan acara yang sedang dilaksanakan dan berpartisipasi aktif dalam kegiatan proker bidang lain serta dalam pergantian pengurus himpunan.

Faktor yang menghambat berjalannya kegiatan himpunan yaitu keuangan dan kaderisasi pengurus.

Untuk mengatasinya pengurus himpunan membuat proposal sponsorship untuk mencari dana sponsor dan pengajuan dana kepada fakultas serta menghubungi alumni sebagai donatur dan mengadakan dana usaha. Untuk masalah kaderisasi, bidang pembinaan mengadakan proker yang sifatnya mengeratkan kekeluargaan pengurus, contohnya melalui *proker up grading*.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Bekoe, S. O., Kankam, B., Ayaaba, D. A., dkk. 2014. "Teacher-trainees sense of efficacy in students engagement, instructional practices and classroom management in social studies lessons". *American Journal of Psychology and Behavioral Sciences*, 1(6), 52-60
- Diarsih, K., Pitoewas, B., & Nurmalisa, Y. 2015. "Pengaruh Partisipasi pada Kegiatan Organisasi Intra Sekolah terhadap Sikap Demokratis Siswa". *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*.
- Fadhilah, & Nuraina. 2011. "Penerapan Demokrasi di Lingkungan Gerakan Mahasiswa UNISMA Bekasi". *Jurnal Kybernan*, 2(2)
- Hemafitria., Octavia, E., & Nobianty, F. 2015. "Implementasi Sikap Demokrasi dalam Proses Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan pada mahasiswa IKIP PGRI Pontianak". *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial*, 2(2), 173-182
- Hidayah, Yayuk., Sunarso. 2017. "Penguasaan *Civic Skills* Aktivistik Badan Eksekutif Mahasiswa (studi di UNY)". *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(2), 153-164
- Indah, Putu., Ratnadi, Dwi. 2018. "Budaya Organisasi Berorientasi Hasil dan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi Pengaruh Partisipasi Penganggaran pada Senjangan Anggaran". *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udaya*. Vol 25. 3. 2352-2378
- Palli, K., Gafur, A. 2017. "Hubungan Keterlibatan dalam Organisasi Badan (BEM) dengan Keterampilan Berpikir Kritis dan Sikap Demokratis Mahasiswa". *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS*, 4(1), 101-112
- Putra, S. A. 2010. "Hubungan Kasual Antara Berorganisasi dan Kemampuan Berfikir Kritis dengan Prestasi Belajar Mahasiswa Program Studi Akuntansi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta". Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Samani, M., Hariyanto. 2013. "Konsep dan Model Pendidikan Karakter". Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset
- Şanlı, Ö., & Altun, M. 2015. "The significance of establishing democratic education environment at schools". *Journal of Educational and Instructional Studies in The World*, 5(2). Retrieved from <http://www.wjeis.org/FileUpl>

- [oad/ds2172](#)  
[32/File/01.onder\\_sanli.pdf](#)
- Samsuri. 2013. "Paradigma Pendidikan Kewarganegaraan dalam Kurikulum 2013". Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta
- Sugiyono. 2015. "Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D". Bandung: Alfabeta
- Thompson, C. 2011. "Critical thinking across the curriculum: process over output". *International Journal of Humanities and Social Science*, 1(9)
- Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
- Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Watkins, P. 1992. "A Critical Review of Leadership Concepts and Research: The Implication for Educational Administration". Geelong: Deakin University Press
- Winarno. 2007. "Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan". Jakarta: PT. Bumi Aksara
- Winataputra, U. S. 2012. "Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Pendidikan untuk Mencerdaskan Kehidupan Bangsa (Gagasan, Instrumentasi, dan Praksis)". Bandung: Widya Aksara Press



# Jurnal PPKn

ASOSIASI PROFESI PENDIDIKAN PANCASILA DAN  
KEWARGANEGARAAN (AP3Kni) - JAWATENGAH